LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2022

Scanned with CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
INSPEKTORAT
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik Ba'a, Telp./Fax (0380) 8571095 Website : www.rotendaokab.go.id

PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Baa, 29 Maret 2022

INSPEKTUR,

PEMERINTAH DAERAH KAB. ROTE NDAO INSPEKTORAT

Arisalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199303 1 011

Scanned with CamScanner

BUPATI ROTE NDAO

KATA PENGANTAR

Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem Pemerintahan Negara yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Dukungan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyajikan/memberikan data, maka pembuatan laporan ini dapat diselesaikan. Untuk itu, kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao, kami ucapkan terima kasih dengan harapan kiranya dukungan yang sangat berharga ini akan menjadi motivasi yang bermakna bagi kiprah penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja kepemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao di masa depan.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini sekaligus Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membuka diri dan mengharapkan adanya berbagai masukan sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih baik kedepan sesuai tuntutan dan perubahan regulasi yang ada. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanat rakyat dan terus membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao tercinta ini.

"**Tuhan Memberkati".**

Ba'a, 26 Maret 2022

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING BULLU,SE

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ..... **i**
Daftar Isi ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Penjelasan Umum 2
a. Undang – Undang Pembentukan Daerah 2
b. Data Geografis Wilayah 3
c. Jumlah Penduduk 6
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 8
e. Jumlah Perangkat Daerah,Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah 9
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 11
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 13
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 13
b. Visi dan Misi Kepala Daerah 25
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 32
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 39
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 64

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **70**
2.1 Capaian Kinerja Makro 70
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 70
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) 71
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) 109
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang Pemerintahan 118
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 120

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN **256**
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten 256
3.1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 256
3.1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan 257
3.1.3 Capaian Kinerja Tugas Pembantuan 259

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota 261
3.3 Permasalahan dan Kendala 261
3.4 Saran dan Tindak Lanjut 261

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 262
4.1 Urusan Pendidikan 262
4.2 Urusan Kesehatan 268
4.3 Urusan Pekerjaan Umum 284
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 291
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 297
4.6 Urusan Sosial 302
4.7 Program dan Kegiatan 308

BAB V PENUTUP 313

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan ayat (2) mengamanatkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi pemerintah. Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao 2019-2024; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0594);
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 022).

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Rote Ndao secara resmi terbentuk sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang pada tahun 2002 berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Data Geografis Wilayah

- Kondisi Geografis, Batas Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

  Kabupaten Rote Ndao merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil di bagian paling selatan kepulauan Nusantara. secara astronomis daerah ini terletak antara 10°25' LS - 11°00' Lintang Selatan dan 121°49' - 123°26' Bujur Timur. Secara geografis Kepulauan Rote Ndao berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Laut Sawu dan Samudera Hindia yang terdiri dari 107 buah pulau dengan 8 pulau berpenghuni (Pulau Rote, Pulau Usu I, Pulau Usu II, Pulau Nuse, Pulau Ndao, Pulau Landu, Pulau Ndana dan Pulau Nusa Manuk) dan 99 pulau lainnya belum berpenghuni yang secara keseluruhan mempunyai luas 1.280,10 km^2 dan luas lautan 2.376 km^2. Wilayah Utama Kabupaten ini terdapat di pulau Rote, sebagai pulau terbesar diantara 107 pulau yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Rote Ndao. Pengelolaan pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Rote Ndao menjadi tantangan bagi Pemerintah khususnya terkait pulau-pulau berpenghuni dalam hal menyediakan sarana dan prasarana konektivitas yang memadai untuk memudahkan transportasi antar pulaupulau tersebut. Sedangkan untuk pulau-pulau tak berpenghuni difokuskan tata kelola aset pada pemantauan aktifitas penguasan lahan agar tidak dikuasai secara ilegal.

  Kabupaten Rote Ndao memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

  Sebelah Utara : Laut Sawu
  Sebelah Selatan: Samudera Hindia
  Sebelah Timur : Selat Pukuafu
  Sebelah Barat : Laut Sawu

  Berdasarkan posisi geografis dan kondisi wilayah yang digambarkan diatas, Kabupaten Rote Ndao selain memiliki potensi daratan juga memiliki potensi bahari yang besar. Kabupaten Rote Ndao memiliki luas wilayah perairan laut cukup luas, dengan total

panjang garis pantai kurang lebih 330 km. Selain itu, Kabupaten Rote Ndao juga memiliki sejumlah pantai yang eksotik, beberapa diantaranya merupakan kawasan surfing terbaik dunia, yakni Pantai Nemberala dan Pantai Boa.

Ditinjau dari kondisi Geostrategis Kabupaten Rote Ndao mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia, dari sudut pandang sumber daya dan perdagangan dapat dilihat sebagai potensi, namun pada kenyataannya masih memiliki potensi konflik antara Indonesia dan Australia sehubungan dengan kegiatan melaut dari nelayan Rote Ndao dan kegiatan transit imigran gelap dari Asia ke Australia.

- Topografis

  Wilayah Rote Ndao memiliki topografi yang relatif datar dengan wilayah yang sebagian besar merupakan daratan berbukit-bukit dengan ketinggian 0-30 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan rincian dataran 35% (45.250 Ha), berbukit dan gunung 25% (32.625 Ha) dan lainnya 40% (50.135 Ha). Rata-rata kemiringan lahan wilayah Kabupaten Rote Ndao berada pada rentang 0≥40%, dapat digambarkan sebagai berikut:

  - Kemiringan lahan khususnya kecamatan Rote Barat dan Rote Timur lebih landai dari kecamatan lainnya di pulau Rote. Lereng dengan kemiringan lebih dari 40% hanya terdapat di Kecamatan Rote Timur sebesar 0,33% dari luas wilayahnya.
  - Kecamatan Pantai Baru 47,74% dari luas wilayahnya kemiringannya 2-15%, 38% berkemiringan 15-40%, sedangkan 11,70% dari luas wilayahnya berkemiringan 0-2%.
  - Kecamatan Rote Tengah merupakan daerah yang berbukit- bukit dan bergunung dilihat dari kemiringan lahan 15% sampai 40% sebesar 49,3% dari luas lahan secara keseluruhan di Kabupaten Rote Ndao dan dari luas lahan yang memiliki kemiringan >40% di Kecamatan Rote Tengah terdapat luas 70% dari luas wilayah secara keseluruhan.

- Hidrologis

  Potensi hidrologi di Kabupaten Rote Ndao relatif terbatas, didominasi air permukaan yang berasal dari sungai dan danau, air bawah tanah dan mata air untuk menyediakan air sepanjang tahun. Jumlah sungai yang berair sepanjang tahun hanya berjumlah 12 buah. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama, dengan panjang sungai 32 km. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun ada 6 buah, dengan total volume kurang lebih 7 (tujuh) juta meter kubik. Potensi penggunaan air permukaan dari sungai atau danau sebagai sumber air baku perlu kiranya mulai diperhitungkan sebagai alternatif agar ketergantungan terhadap mata air dan sumur bor bisa dikurangi.

  Selain air permukaan, sumber air baku dari air bawah tanah memiliki potensi yang besar yakni dari Cekungan air Tanah (CAT). Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Kabupaten Rote Ndao memiliki 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) yakni CAT Nemberala dengan luas 236 Km2 , CAT Batutua luas 229 Km2 , dan CAT Rote luas 250 Km2 . Potensi CAT ini bila dieksplorasi secara maksimal dengan sumur bor, sumur gali ataupun dengan teknologi lainya, dapat menopang kebutuhan air utama di Kabupaten Rote Ndao.

  Potensi air baku lainnya adalah mata air yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao, dimanfaatkan penduduk untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi umumnya berasal dari perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau sehingga kebutuhan air untuk musim kemarau merupakan kendala pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Ketersediaan air pada mata air ini juga sangat tergantung pada kondisi hutan yang memiliki kemampuan sebagai peresap air hujan. Kerusakan hutan baik karena kegiatan dalam hutan maupun alih fungsi lahan untuk kegiatan lain perlu diantisipasi untuk menjaga pasokan air serta kualitasnya.

Selain pengambilan langsung oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pemanfaatan sumber air baku yang dikelola oleh PDAM digunakan untuk pelayanan air minum di Kabupaten Rote Ndao berasal dari 8 (delapan) sumber yakni mata air Siokoen dengan kapasitas 17,5 Liter/detik, Oemau 10 Liter/detik, Lualemba 15 Liter/detik, Lidabesi 10 Liter/detik, Nioen 15 Liter/detik, Lelebe 10 Liter/detik, Sumur Bor Kantor Camat 5 Liter/detik dan Sumur Bor Pantai Baru 5 Liter/detik. Dari total kapasitas terpasang sebesar 87,5 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 34,5 liter/detik terdapat iddle capasity sebesar 53 liter/detik yang dapat dimaksimalkan untuk perluasan jaringan pelayanan air bersih.

- Klimatologi

  Suhu udara di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 berkisar antara 22,6°C sampai dengan 31,1°C, dengan titik tertinggi terjadi pada bulan November dan titik terendah pada bulan Juli. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 73% sampai dengan 88%. Iklim di Wilayah Rote Ndao sama halnya dengan iklim kering karena musim hujan yang lebih pendek dari musim kemarau. Curah hujan meningkat pada bulan November hingga Januari dengan jumlah curah hujan tertinggi pada bulan Januari tercatat 439,3 mm dengan jumlah hari hujan 21 Hari.

c. Jumlah Penduduk

Pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao telah mencapai 149.007 jiwa yang tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan. Struktur penduduk, persebaran penduduk menurut kecamatan dan jumlah kepala kepala keluarga di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Struktur Penduduk Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2021

STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
>75	2.317	2.383	4.700
70-74	1.637	1.681	3.318
65-69	1.893	1.954	3.847
60-64	2.257	2.342	4.899
55-59	2.867	2.784	5.651
50-54	3.287	3.057	6.344
45-49	4.033	4.030	8.063
40-44	5.059	5.146	10.205
35-39	5.479	5.863	11.342
30-34	5.198	5.657	10.855
25-29	5.618	5.860	11.478
20-24	6.955	6.765	13. 720
15-19	8.904	8.471	17.375
10-14	8.632	8.293	16.925
5-9	7.335	6.673	14.008
0-4	3.201	3.076	6.277
TOTAL	**74.972**	**74.035**	**149.007**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao Menurut Kecamatan
Tahun 2021

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*
1. Rote Barat	5.111	4.991	10.102
2. Rote Barat Daya	12.709	12.746	25.455
3. Rote Barat Laut	7.758	7.811	15.569
4. Lobalain	15.713	15.390	31.103
5. Rote Tengah	4.751	4.634	9.385
6. Rote Selatan	3.184	3.130	6.314
7. Pantai Baru	7.533	7.331	14.864
8. Rote Timur	7.581	7.540	15.121

9. Ndao Nuse	1.855	1.930	3.785
10. Landu Leko	2.754	2.666	5.420
11. Loaholu	6.023	5.866	11.889
Kabupaten Rote Ndao	**74.972**	**74.035**	**149.007**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao Menurut Kecamatan
Tahun 2021

No	KABUPATEN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KET
1	ROTE NDAO	39. 516	KK

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Rote Ndao terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 112 (seratus dua belas) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan sebagaimana dapat dilihat berikut :

Tabel 1.4
Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	*2*	*3*	*4*
1	Landu Leko	7	-
2	Pantai Baru	14	1
3	Rote Timur	10	1
4	Rote Tengah	7	1
5	Rote Selatan	7	-
6	Lobalain	15	3
7	Rote Barat Laut	12	1
8	Rote Barat Daya	19	-
9	Rote Barat	7	-
10	Ndao Nuse	5	-
11	Loaholu	10	-
Jumlah		**112**	**7**

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.5 sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	Nama	Pegawai Negeri Sipil			
		Pejabat Struktural (Orang)	Pejabat Fungsional (orang)	Fungsional Umum (orang)	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Inspektorat	10	13	12	35
2.	Sekretariat DPRD	10	-	14	24
3.	Sekretariat Korpri	3	-	5	8
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	10	-	16	26
5.	Dinas Kesehatan	14	456	128	598
6.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	23	1.090	340	1.453
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15	-	9	24
8.	Dinas Sosial	14	-	9	23
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19	-	5	24
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14	-	8	22
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	-	14	29
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17	-	4	21
13.	Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan	16	-	19	35
14.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13	-	7	20
15.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13	-	9	22
16.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	16	-	15	31

17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	-	33	46
18.	Dinas Perhubungan	10	-	10	20
19.	Dinas Pangan	12	-	9	21
20.	Dinas Pertanian	18	42	23	83
21.	Dinas Perikanan	12	-	8	20
22.	Dinas Peternakan	15	-	32	47
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	2	1	14
24.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	15	-	11	26
25.	Badan Keuangan dan Aset	18	-	15	33
26.	Badan Pendapatan	21	-	22	43
27.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12	-	9	21
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	-	5	10
29.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3	-	6	9
30.	Kecamatan Rote Barat Daya	6	-	9	15
31.	Kecamatan Rote Barat Laut	13	-	11	24
32.	Kecamatan Lobalain	17	-	23	40
33.	Kecamatan Rote Tengah	12	-	11	23
34.	Kecamatan Rote Selatan	8	-	12	20
35.	Kecamatan Pantai Baru	11	-	16	27
36.	Kecamatan Rote Timur	9	-	8	17
37.	Kecamatan Landu Leko	6	-	3	9
38.	Kecamatan Rote Barat	8	-	11	19
39.	Kecamatan Ndao Nuse	4	-	5	9
40.	Kecamatan Loaholu	7	-	11	18
41.	Bagian Organisasi	4	-	4	8
42.	Bagian Umum	11	-	25	36
43.	Bagian Hukum	4	-	4	8
44.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3	-	6	9
45.	Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan	4	-	3	7
46.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3	3	6	12
Jumlah/ Total		**517**	**1.606**	**966**	**3.089**

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao

Tabel 1.6
Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao

No	Nama	Jumlah
1.	UPTD `Taman Kanak – Kanak (TK)	3
2.	UPTD `Sekolah Dasar (SD)	122
3	UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP)	40
4.	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	12
5.	UPTD Badan Pendapatan Kabupaten Rote Ndao Wilayah	5
Jumlah		**182**

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2021 sebesar **Rp.777.278.052.926,00** realisasi sebesar **Rp.747.540.766.856,25** atau **96,17%** dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2021

NO	SUMBER PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PENDAPATAN DAERAH		**777.278.052.926,00**	**747.540.766.856,25**	**96,17**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**33.235.744.352,00**	**31.511.204.366,82**	**94,81**
1.1	Pajak Daerah	8.621.871.038,00	7.295.753.984,05	84,62
1.2	Retribusi Daerah	8.341.056.772,00	7.738.476.195,00	92,78
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.347.141.404,00	6.347.141.404,00	100,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.925.675.138,00	10.129.832.783,77	102,06
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**711.825.787.639,00**	**687.613.381.142,00**	**96,60**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	690.196.799.000,00	673.537.880.751,00	97,58
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.628.988.639,00	14.075.500.391,00	65,08
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**32.216.520.935,00**	**28.416.181.347,43**	**88,20**
3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perudang-Undangan	32.216.520.935,00	28.416.181.347,43	88,20

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.833.095.042.264,00** realisasi sebesar **Rp.751.544.314.473,51** atau **90,21%**, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
BELANJA DAERAH		**833.095.042.264,00**	**751.544.314.473,51**	**90,21**
1	**BELANJA OPERASI**	**533.158.667.241,00**	**480.534.585.725,51**	**90,13**
1.1	Belanja Pegawai	303.045.438.264,00	279.191.863.455,00	92,13
1.2	Belanja Barang Dan Jasa	221.595.215.777,00	192.893.663.481,51	87,05
1.3	Belanja Hibah	5.674.508.000,00	5.610.553.789,00	98,87
1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.843.505.200,00	2.838.505.000,00	99,82
2	**BELANJA MODAL**	**121.841.385.009,00**	**105.810.657.251,00**	**86,84**
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.998.555.291,00	18.703.962.914,00	77,94
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.973.074.508,00	25.276.757.114,00	84,33
2.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.688.324.500,00	59.758.354.399,00	90,97
2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.181.430.710,00	2.071.582.824,00	94,96
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**26.470.642.014,00**	**13.993.322.296,00**	**52,86**
4	**BELANJA TRANSFER**	**151.624.348.000,00**	**151.205.749.201,00**	**99,72**
4.1	Belanja Bagi Hasil	1.734.694.000,00	1.316.095.201,00	75,87
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	149.889.654.000,00	149.889.654.000,00	100

Sumber : Data Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

3. Pembiayaan Daerah

Anggaran dan realisasi pembiayaan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.9
Pembiayaan Daerah Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2021

NO	JENIS PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**66.316.989.338,00**	**65.295.375.390,76**	**98,46**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	66.316.989.338,00	65.295.375.390,76	98,46
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.500.000.000,00**	**10.500.000.000,00**	**100**
	Penyertaan modal Daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100
PEMBIAYAAN NETTO		**55.816.989.338,00**	**54.795.375.390,76**	**98,17**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**0,00**	**50.791.827.773,50**	**0,00**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Tahap awal dari suatu perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukananalisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agarperencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu serta melihat permasalahan-permasalahan pembangunan maupun isu-isu strategis apa saja yang menghambat terhadap capaian kinerja pembangunan baik regional maupun nasional. Permasalahan pembangunan dan isu–isu strategis di Kabupaten Rote Ndao akan diuraikan dalam uraian berikut.

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

   Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan evaluasi selama 5 tahun terakhir maka permasalahan pokok pembangunan adalah :

- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, antara lain: IPM : 62,60; Rata-rata lama sekolah 13,19 tahun; Prevalensi Stunting 23,48%; Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak 87 orang.
- Tingginya angka kemiskinan, antara lain: Penduduk miskin 27,54%; Tingkat pengangguran 4,90%
- Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kontribusi pariwisata, antara lain: Pertumbuhan ekonomi 0,30%; Jumlah kunjungan wisata 7.500 orang.
- Belum optimalnya pelayanan infrastruktur, antara lain: Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik 47,02%; Rasio jaringan irigasi 63,75%; Rumah tangga berakses air minum layak 79,79%; Rumah tinggal bersanitasi layak 75,76%.
- Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi terhadap bencana, antara lain: Pengelolaan sampah 17,56%; dampak covid 19 dan siklon tropis seroja.
- Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik, yaitu Nilai SAKIP CC.

2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

a. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan pada aspek geografi dan demografi yaitu:

- Luas dan batas wilayah administrasi desa/kelurahan belum tersedia secara definitif.
- Tingginya angka ketergantungan penduduk diatas 70%.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- Kurang optimalnya kontribusi produk/jasa kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB.
- Masih rendahnya daya beli masyarakat.
- Tingginya angka kemiskinan.

- Masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi.

2) Kesejahteraan Sosial
   - Masih tingginya pengangguran terbuka;
   - Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja;
   - Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah;
   - Masih ditemukannya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang;
   - Tingginya prevalensi *stunting*;
   - Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3) Seni Budaya dan Olahraga
   - Masih rendahnya pembinaan terhadap kesenian dan olahraga;
   - Masih kurangnya event seni budaya dan olah raga.

c. Aspek Pelayanan Umum

1) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
   - Masih adanya ketimpangan sebaran dan kualitas sekolah;
   - Masih tingginya jumlah penduduk usia sekolah tidak bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya;
   - Belum optimalnya akses penduduk usia sekolah terhadap sekolah;
   - Masih tingginya angka putus sekolah;
   - Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
   - Rasio kelas dan murid belum sesuai standar;
   - Masih rendahnya angka pendidikan yang ditamatkan;
   - Rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan.

2. Kesehatan
   - Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka kematian balita (AKABA);
   - Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang;
   - Masih kurangnya Tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu;
   - Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- Belum optimalnya pelayanan kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   - Masih rendahnya proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik;
   - Belum optimalnya layanan jaringan irigasi kabupaten;
   - Kurangnya saluran drainase dan atau trotoar pada sebagian jaringan jalan di Kota Baa;
   - Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   - Masih rendahnya cakupan rumah layak huni;
   - Masih adanya permukiman kumuh;
   - Rendahnya penanganan sampah perkotaan;
   - Rendahnya cakupan rumah tinggal bersanitasi;
   - Masih rendahnya cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak dan akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik;
   - Masih terbatasnya penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik;
   - Masih luasnya lahan kritis.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
   - Rendahnya cakupan layanan petugas linmas/satpol PP.
   - Rendahnya penanganan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3).
   - Upaya mempertahankan optimalisasi cakupan pelayanan bencana yakni : informasi rawan bencana (%), pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di desa (%) dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%).
   - Belum optimalnya cakupan pelaksanaan penegakan perda (%).

6. Sosial
   - Masih lemahnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
   - Masih rendahnya penanganan dan rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

2) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
   - Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan;
   - Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja.
   - Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan.
   - Masih rendahnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Masih adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.
   - Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. Pangan
   - Masih rendahnya ketersediaan pangan utama.
   - Kurangnya pengawasan keamanan pangan.
   - Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi.
4. Pertanahan
   - Masih rendahnya luas lahan bersertifikat.
5. Lingkungan Hidup
   - Belum Tersusunya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
   - Belum optimalnya TPA/TPST/SPA.
   - Belum optimalnya pengendalian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan.
   - Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

6. Kependudukan dan Catatan Sipil
   - Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
   - Masih kurangnya sarana dan prasarana kependudukan dan catatan sipil.
7. Pemberdayaan Masyarakat
   - Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor desa.
   - Masih banyak masyarakat yang perlu diberdayakan baik secara kapasitas, ekonomi dan sosial.
   - Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   - Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian kependudukan dan keluarga berencana (KB).
   - Rendahnya cakupan KB aktif.
   - Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
9. Perhubungan
   - Belum optimalnya pelayanan angkutan umum.
   - Masih terbatasnya sarana prasarana penerbangan.
   - Belum terpenuhinya standar keselamatan transportasi.
10. Komunikasi dan Informatika
    - Belum semua kecamatan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
    - Masih adanya desa yang belum terjangkau jaringan teknologi informasi dan komunikasi.
    - Belum terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
11. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
    - Masih rendahnya jumlah koperasi sehat.
    - Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk.

12. Penanaman Modal
    - Belum adanya regulasi yang mengatur investor yg tidak/belum melakukan aktivitas.
    - Masih rendahnya daya serap terhadap tenaga kerja local.
    - Belum berperannya investasi dalam sistem perekonomian dan memberikan dampak yang siginifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13. Kepemudaan dan Olahraga
    - Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
    - Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
14. Statistik
    - Belum optimalnya sistem data statistik yang terintegrasi.
15. Persandian
    - Belum optimalnya pengamanan data dan informasi daerah.
16. Kebudayaan
    - Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional;
    - Belum optimalnya pelestarian terhadap seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya.
17. Perpustakaan
    - Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.
18. Kearsipan
    - Belum optimalnya pengelolaan kearsipan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata
    - Rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
    - Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata.
    - Rendahnya promosi wisata.

2. Pertanian
   - Kurangnya sarana prasarana pendukung pertanian.
   - Belum adanya regulasi daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan.
   - Penggunaan teknologi budidaya pertanian dan penganekaragaman produk pengolahan hasil pertanian yang belum memadai.
   - Kurangnya pengembangan produk unggulan.
3. Kelautan dan Perikanan
   - Belum optimalnya hasil produksi dan pengolahan perikanan.
   - Belum berfungsinya kawasan minapolitan.
   - Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.
4. Kehutanan
   - Rendahnya upaya rehabilitasi lahan kritis.
5. Perdagangan
   - Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal.
6. Perindustrian
   - Belum optimalnya pembinaan kelompok pengrajin;
   - Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) produk unggulan daerah.
7. Transmigrasi
   - Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi lokal;
   - Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana transmigrasi lokal.
8. Kelautan dan Perikanan
   - Belum berkembangnya perikanan budidaya;
   - Rendahnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan.

4) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Perencanaan
   - Kurangnya konsistensi Perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan;

- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
- Belum optimalnya sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*).

2. Keuangan
   - Belum efektifnya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
   - Belum optimalnya penerapan *e-budgeting*;
   - Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
   - Masih tingginya rasio belanja aparatur dibandingkan dengan belanja publik;
   - Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset.
3. Kepegawaian
   - Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua perangkat daerah;
   - Kurangnya kualitas dan kompetensi ASN;
   - Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;
   - Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional;
   - Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN.
4. Penelitian dan Pengembangan
   - Rendahnya jumlah kelitbangan yang dilaksanakan.
5. Pengawasan
   - Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
   - Belum optimalnya tindaklanjut temuan BPK dan pengaduan masyarakat.
6. Sekretariat Dewan
   - Belum terintegrasinya program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

d. Aspek Daya Saing Daerah

1. Kemampuan Ekonomi Daerah
   - Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi;
   - Pengeluaran masyarakat cukup tinggi dibelanjakan untuk makanan;
   - Tingginya angka ketergantungan;
   - Masih rendahnya daya beli masyarakat;
   - Pola konsumsi non pangan lebih dominan;
   - Gagal tanam, gagal panen.
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
   - Belum optimalnya pengendalian ketaatan terhadap RTRW;
   - Masih terdapat rumah tangga yang belum terlayani air bersih;
   - Masih adanya rumah tangga yang belum terlayani listrik.
3. Iklim Investasi
   - Sosial kemasyarakatan;
   - Belum optimalnya implementasi regulasi yang mendukung iklim usaha;
   - Belum optimalnya proses pelayanan perijinan;
   - Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah, investor dan masyarakat.
4. Sumber Daya Manusia
   - Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian;
   - Masih tingginya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*);
   - Rendahnya rasio kewirausahaan (enterpreneurship).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada masing-masing urusan, maka dilakukan analisa pohon masalah untuk memetakan akibat, masalah utama dan sebab. Pentingnya analisa pohon masalah sehingga dapat diketahui akar-akar masalah sebagai penyebab dari masalah utama yang ada di Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, kelompok-kelompok dari akar masalah nantinya dapat diangkat menjadi isu

strategis daerah. Masalah utama yang dihadapi Kabupaten Rote Ndao yaitu belum optimalnya pembangunan dan pelayanan dasar di Kabupaten Rote Ndao. Masalah utama ini mengakibatkan angka kemiskinan masih tinggi yaitu 27,54%.

Permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2021

a. Kemiskinan
b. Kelaparan
c. Kehidupan sehat dan sejahteran
d. Gender
e. Air bersih dan Sanitasi layak
f. Energi bersih dan terjangkau
g. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
h. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
i. Kesenjangan
j. Kota dan Permukiman berkelanjutan
k. Konsumsi dan Produksi
l. Perubahan Iklim
m. Keanekaragaman Hayati
n. Masyarakat yang damai dan inklusif
o. Kemitraan global dan pembangunan

Isu Strategis Kabupaten

Isu strategis daerah didapatkan dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan sinkronisasi dengan isu-isu strategis global, nasional dan provinsi sehingga isu strategis Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mutu dan tata kelola pendidikan dasar (Kualitas guru dan tenaga pendidik).
2. Kualitas dan aksesibilitas upaya kesehatan serta percepatan penurunan dan penanganan stunting terintegrasi (Stunting).
3. Peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan (Bansos tepat sasaran/guna dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani, pekerja terampil bersertifikat).

4. Penataan dan pengelolaan pariwisata (Paket wisata ber-CHSE).
5. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan (OODARO: Abon ikan dan agar-agar, gula semut dan sopi, sei, produk susu kerbau dan telur, beras).
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, perumahan, tata ruang dan lingkungan hidup (Jalan dan irigasi, rumah (ALADIN), air bersih dan sanitasi, bencana, keselamatan transportasi).
7. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Data, SPBE, WTP, SAKIP, PAD, bangunan/usaha berizin dan liar, kualitas layanan kependudukan, buku yang ditulis tentang Rote).
8. Bencana

   Dampak Covid-19 beberapa tahun kedepan masih akan mewarnai berbagai lini kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Selain itu ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan infrastruktur dan lingkungan hidup pasca siklon tropis seroja.

b. Visi dan Misi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao. Sesuai tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao 2005-2025, RPJMD periode ini dalam tahapan Kemandirian dan Daya Saing (Periode RPJMD III, 2021-2025). Tahap ini mengandung arti kemampuan untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan dan daya inovasi masyarakat dan daerah dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada serta memiliki kemampuan untuk berkompetisi dan mempunyai keunggulan lebih dibandingkan dengan wilayah lain baik di tingkat regional maupun nasional. Untuk itu

kemajuan yang dicapai pada tahap sebelumnya harus terus ditingkatkan dan dimantapkan. Dengan mengacu pada beberapa hal tersebut, sebagai arah pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang maka Visi Kabupaten Rote Ndao adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan".

Pernyataan visi Kabupaten Rote Ndao tersebut mengandung makna sebagai berikut : BERMARTABAT terdiri dari kata BERtumbuh, MAkmuR, TAat dan BersahaBAT, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

1. **ROTE NDAO BERTUMBUH :**
   a. Maju : meningkatnya kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
   b. Mandiri : masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.
2. **ROTE NDAO MAKMUR/SEJAHTERA :**
   a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
   b. Meningkatnya daya beli masyarakat.
   c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
   d. Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru di berbagai sektor.

3. **ROTE NDAO TAAT :**
   a. Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
   b. Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
4. **ROTE NDAO BERSAHABAT :**
   a. Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga dan penuh kegotong-royongan.
   b. Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, dan indah.
   c. Terbuka terhadap perubahan sosial dan IPTEK yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.
5. **BERKELANJUTAN :**
   a. Pembangunan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).
   b. Pembangunan berkelanjutan meliputi aspek BERTUMBUH, MAKMUR/SEJAHTERA, TAAT, dan BERSAHABAT (BERMARTABAT).

Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui misi-misi yang mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi yang dijalankan secara kemitraan dan berkelanjutan meliputi:

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**

   Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter adiluhung yang nilai-nilainya terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur dan masyarakat harus selalu menjadi perhatian utama. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetetif dan berdaya saing di era globalisasi.

Pembangunan kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dan penyuluhan pola hidup sehat, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata didukung oleh pertanian dan perikanan. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai kabupaten kepulauan yang terdiri dari 107 Pulau, 8 Pulau diantaranya berpenghuni dan 99 pulau tidak berpenghuni, dan sekitar 50% merupakan Desa/Kelurahan pesisir yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang dapat menjadi andalan sumber ekonomi yang besar bagi daerah. Pengelolaan sumberdaya tersebut harus tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek ekologis, dan kepentingan masyarakat. Potensi terbesar dalam pengelolaan daerah pesisir dan laut adalah pengembangan pariwisata antara lain wisata bahari berupa kegiatan surfing, diving, snorkeling dan wisata budaya yang sangat cocok dan sangat digemari oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pembangunan pariwisata yang dimaksud mencakup seluruh aspek pembangunan baik tempat wisata maupun lingkungan sumber daya manusia sarana dan prasarana penunjang serta promosi wisata. Untuk mendukung percepatan pembangunan pariwisata daerah maka, orientasi seluruh kebijakan pembangunan yang terkait terutama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diorientasikan pada pengembangan agrowisata, ekowisata dan wanawisata.

Beberapa komoditas andalan yang dapat dikembangkan adalah budidaya tanaman pangan, usaha perikanan, sadap dan pengolahan nira lontar, serta beternak. Diversifikasi produk dan turunannya dari komoditi andalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menjawab kebutuhan pasar luar. Potensi sektor ini apabila dikelola dengan baik diharapkan mampu memberikan daya ungkit dan daya dorong dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Percepatan pengentasan kemiskinan dan penanggulangan masalah pengangguran perlu dipacu dengan penyediaan dan penciptaan lapangan kerja, kemudahan akses permodalan, serta peningkatan keterampilan masyarakat. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, penekanan pada pemberdayaan dan keberpihakan terhadap keluarga dan kelompok marginal berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata sehingga melahirkan pengusaha mikro, kecil, menengah serta pengusaha besar yang kuat dan bermoral yang dapat berkompetisi pada level regional maupun level nasional.

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang melahirkan ekonomi mudah, murah dan cepat. Konektivitas wilayah sebagai urat nadi pembangunan ekonomi daerah makin meningkat apabila di dukung dengan lancarnya akses masuk dan keluar ke Kabupaten Rote Ndao. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang menghubungkan antar pulau serta didukung moda transportasi darat, laut, dan udara yang meningkat jumlah dan kualitasnya, penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, air bersih dan sanitasi layak serta telekomunikasi sangat dibutuhkan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Rote Ndao harus selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao 2013-2033, sehingga pemanfaatan ruang dapat dikendalikan sesuai kaidah-kaidah tata ruang. Sejalan dengan itu, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah juga memperhatikan Tujuan Pembangunan berkelanjutan guna menjaga pembangunan yang tetap mempertimbangkan keseimbangan ekologis baik di daratan maupun di lautan.

4. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dan bersih (clean government) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mampu memfasilitasi operasional dan evaluasi di lapangan maka dibutuhkan aparatur yang profesional. Pengembangan pelayanan publik perlu di dukung dengan sistem

informasi terpadu yang menyediakan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan terkini untuk kepentingan pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pemerintahan yang baik merupakan cermin dari kualitas hubungan berbagai stakeholder yang ada yaitu pemerintah, dunia swasta dan masyarakat sipil. Kualitas hubungan yang baik tercermin dari adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan supremasi hukum dan adanya check and balanced di antara ketiganya dalam pembuatan kebijakan publik dan pengelolaan organisasi publik.

Sinergi ini akan melahirkan pelayanan publik yang prima dan menempatkan penerima pelayanan publik bukan sekedar sebagai konsumen tetapi sebagai warga negara yang memiliki berbagai hak dan kewajiban yang telah diatur dengan konstitusi. Fokusnya adalah pada terwujudnya anggaran publik yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, pengembalian peran pemerintah sebagai pelayan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat dan terwujudnya hukum yang berbudaya, berkemanusiaan, adil dan tidak diskriminatif.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Oleh sebab itu program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Penentuan program pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2019-2024. Seluruh sumberdaya diarahkan dan difokuskan pada program-program tersebut sehingga dapat memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah

sekaligus meningkatkan kesejhateraan masyarakat. Berikut ini diuraikan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024:

1. Penurunan Angka Kemiskinan

   Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi krusial karena target penurunan kemiskinan sampai dengan tahun 2024 diharapkan menjadi kisaran angka 23,5-24%. Perlu kerja keras seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat secara bersama-sama dan bersinergi dalam pembangunan. Pemerintah Daerah mengarahkan penurunan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja pada bidang pariwisata, pertanian dan perikanan, penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan investor melakukan investasi, mengembangkan industri kecil menengah dengan bantuan permodalan/kredit bunga 0% dan pendampingan, serta pengembangan ekonomi digital untuk memperluas pemasaran produk andalan dan unggulan. Disamping itu pemberdayaan BUMDES dan BUMDES bersama melaui pengelolaan produk/komoditi andalan satu desa satu produk dan kapasitas manajemen bumdes diharapkan menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

   Disamping itu pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis guna percepatan penurunan angka kemiskinan. Perencanaan pembangunan secara terpadu diharapkan dapat membantu menurunkan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. Strategi rencana pembangunan meliputi seluruh aspek, yaitu :

   a. Penyediaan rumah layak huni yang akan dituntaskan dalam 5 tahun kedepan dengan kegiatan bantuan ALADIN (Atap Lantai dan Dinding), berupa bantuan untuk memperbaiki rumah penduduk miskin.
   b. Penyediaan Air bersih Layak dan Sanitasi Layak sekaligus dalam rangka penanganan stunting c. Bebas Biaya Pendidikan bagi siswa kurang beruntung.
   c. Bebas biaya kesehatan.

d. Pembangunan Balai Latihan Kerja.
e. Pengembangan listrik bersubsidi dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
f. Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi.

2. Penurunan, Pencegahan dan Penanganan Stunting

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu dari 10 kabupaten di Indonesia yang memiliki angka stunting tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menurunkan prevalensinya lima tahun ke depan hingga mencapai kisaran 16%. Strategi untuk menurunkan dan mencegah terjadinya stunting dilakukan dengan Gerakan Rote CERDAS yang dilakukan secara terpadu dan simultan oleh perangkat daerah terkait yang terkoordinir dalam stunting center.

3. Pengembangan Pariwisata Daerah

Potensi pariwisata di Kabupaten Rote Ndao salah satunya sudah dikenal dunia, yaitu Pantai Nemberala dan Boá. Potensi tersebut menjadi modal dasar yang kuat dalam pengembangan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Disamping itu Kabupaten Rote Ndao juga merupakan salah satu tujuan wisata di Nusa Tenggara Timur. Fokus utama rencana pengembangan pariwisata daerah adalah pengembangan tujuan wisata yang sudah ada dan membangun destinasi wisata baru yang potensial yang diterjemahkan dalam rencana :

a. Pembenahan destinasi wisata dengan penyediaan infastruktur dan sarana prasarana yang memadai, pengembangan amenitas dan atraksi budaya tanpa merubah kekhas-an destinasi wisata.
b. Pengembangan SDM pariwisata.
c. Penyelenggaraan event pariwisata yang digelar secara kontinyu.
d. Pengajuan kedalam jaringan Geopark kawasan Laut Mati di Kecamatan Landuleko pada tingkat Nasional maupun Internasional.
e. Pengembangan produk ekonomi kreatif setempat.
f. Promosi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi digital.

4. Pengembangan Pertanian berkelanjutan

Kedaulatan pangan merupakan kebijakan yang diarahkan pada ketersedian dan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka mengantisipasi dam mengatasi masa-masa sulit/paceklik. Untuk mencapai kedaulatan pangan daerah maka dilaksanakan pembangunan terpadu antar kawasan strategis yang memiliki potensi pertanian dan perikanan dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi komoditas. Dilain pihak penyediaan sarana prasarana alsintan yang memadai, pendampingan, pemberdayaan kemampuan masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya.

Pertanian dalam arti luas termasuk pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan potensi yang ditekuni oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Rote Ndao. Fokus utama pengembangan pertanian adalah mengembangkan gerakan Lakamola Anansio dengan produk unggulan darat pertanian organik dan gula lontar, unggulan laut rumput laut tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, namun mampu pula diantar-pulaukan yang diterjemahkan dalam rencana :

a. Menyediakan logistik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara dalam rangka mendukung pariwisata daerah.
b. Sebagai sumber Ketahanan pangan daerah.
c. Menyediakan pangan sehat yang berkelanjutan dengan adanya produk-produk pertanian organik.
d. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai.

Dengan mempertimbangkan pencapaian program unggulan Bupati dan Wakil Bupati sebagai janji kepada masyarakat dan diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis daerah, maka ditetapkan program pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 sebagai berikut:

1. **Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**
   - Program Pengelolaan Pendidikan
   - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   - Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   - Program Perlindungan Perempuan
   - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   - Program Perlindungan Khusus Anak
   - Program Pengendalian Penduduk
   - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2. **Misi Kedua : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan**
   - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   - Program Penempatan Tenaga Kerja
   - Program Hubungan Industrial
   - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   - Program Pengembangan UMKM
   - Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan
   - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   - Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
   - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Perizinan Usaha Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan

3. **Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**

- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Penanggulangan Bencana

4. **Misi keempat : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- Program Aplikasi Informatika

- Program Penataan Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
- Program Kepegawaian Daerah
- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Program Pengelolaan Perbatasan
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5	11
2	Dinas Kesehatan	3	6
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	12
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9	11
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	3
6	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	4	4
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	3
8	Dinas Sosial	4	6
9	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2	5
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8	17

11	Dinas Ketahanan Pangan	3	5
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	5
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3
14	Dinas Perhubungan	2	2
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4	4
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	6	6
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5	5
19	Dinas Perikanan	3	5
20	Dinas Pertanian	4	6
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	5
22	Dinas Peternakan	5	8
23	Bagian Umum	1	11
24	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	2
25	Bagian Hukum	1	1
26	Bagian Organisasi	1	8
27	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1	3
28	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	1
29	Sekretariat DPRD	1	6
30	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1	1
31	Kecamatan Lobalain	3	3
32	Kecamatan Rote Barat Laut	3	3
33	Kecamatan Rote Barat Daya	3	3
34	Kecamatan Rote Barat	3	3
35	Kecamatan Rote Selatan	3	3
36	Kecamatan Rote Tengah	3	3
37	Kecamatan Pantai Baru	3	3
38	Kecamatan Rote Timur	3	3
39	Kecamatan Ndao Nuse	3	3
40	Kecamatan Landu Leko	3	3

41	Kecamatan Loaholu	3	3
42	Inspektorat	2	3
43	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4	9
44	Badan Keuangan dan Aset	2	6
45	Badan Pendapatan	1	1
46	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2	5
TOTAL		**145**	**192**

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao

Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 berdasarkan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 diuraikan antara lain :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
      - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
      - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
      - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
   b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
   c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
      - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

e. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

2. Dinas Kesehatan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
      - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
      - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
   c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
   d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
   e. Program Pengembangan Permukiman dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
   f. Program Penataan Bangunan Gedung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

h. Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota
      - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
   b. Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
   c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

d. Program Penatagunaan Tanah dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota
   - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota

g. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

h. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

i. Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pengelolaan Sampah

5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota

b. Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyalamatan Non Kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
   b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasioanal Konflik Sosial
   c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
      - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Penaggulangan Bencana dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota
        - Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
        - Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
8. Dinas Sosial dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
    b. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
        - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial
    c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
        - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    d. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota
9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
    b. Program Hubungan Industrial dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota

c. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota

d. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program/kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota
   - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kot
   - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota

b. Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan sebagai berikut
   - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota
   - Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / kota
   - Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota
d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota
e. Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota
   - Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/kot
f. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
   - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota
g. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
   - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota
- Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan kesetaraan ber-KB

h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesehjateraan Keluarga

11. Dinas Ketahanan Pangan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
       - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
    b. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
       - Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
    c. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan

b. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pelayanan Pencatatan Sipil
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan
   - Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyusuna Profil Kependududan

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Administrasi Pemerintah Desa dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
    b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakaatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Provinsi serta Pemberdayan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten
14. Dinas Perhubungan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Peyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    b. Program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal

15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    b. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
    d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simoan pinjam wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
    b. Program Pengembangan UMKM dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pengembangan usaha mikro dengan orentasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
    c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota
    d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera tera ulang dan pengawasan

e. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota

f. Program Pengelolaan System Informasi Industri Nasional dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyediaan informasi industri untuk IUI, IUPKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    b. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bindang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pengembangan Kebudayaan dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

d. Program Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

19. Dinas Perikanan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
       - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

    b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil
       - Pengelolaan Pembudidaya Ikan

    c. Program Pengolahan dan Pemsaran Hasil Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota

20. Dinas Pertanian dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
       - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pengembangan Prasarana Pertanian
   - Pembangunan Prasarana Pertanian
c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
d. Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pengolahan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
       - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    b. Program Pengolahan Arsip dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pengolahan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota
       - Pengolahan Sinpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
    c. Program Perlindungan dan Penyelematan Arsip dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Dinyatakan Hilang
22. Dinas Peternakan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
       - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

d. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

e. Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

23. Bagian Umum dengan program/kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

24. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Administrasi Tata Pemerintahan
        - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
25. Bagian Hukum dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
26. Bagian Organisasi dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
        - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        - Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Penataan Organisasi
27. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- Administrasi Pembangunan
- Pemantauan Kebijakan Terkait Sumberdaya Alam

28. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Penrekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
29. Sekretariat DPRD dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
        - Pembahasan Kebijakan Anggaran
        - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
        - Peningkatan Kapasitas DPRD
        - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
        - Fasilitasi Tugas DPRD
30. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pengembangan Kompetensi ASN
    b. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Pengembangan Kompetensi ASN
31. Kecamatan Lobalain dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum
    c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

32. Kecamatan Rote Barat Laut dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum
    c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
33. Kecamatan Rote Barat Daya dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum
    c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daera
34. Kecamatan Rote Barat dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
        - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daera

35. Kecamatan Rote Selatan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum
   c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daera
36. Kecamatan Rote Tengah dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum
   c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daera
37. Kecamatan Pantai Baru dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daera

38. Kecamatan Rote Timur dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum
   c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daera
39. Kecamatan Ndao Nuse dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum
   c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daera
40. Kecamatan Landu Leko dengan program/kegiatan sebagai berikut:
   a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
      - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daera

41. Kecamatan Loaholu dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Umum
    c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daera
42. Inspektorat dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
       - Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
    b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Pendampingan dan Asistensi
43. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
    a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
       - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
       - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
       - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
    b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Pengembangan inovasi dan teknologi

d. Program Pengelolaan Perbatasan dengan kegiatan sebagai berikut:
- Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

44. Badan Keuangan dan Aset dengan program/kegiatan sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan Barang Milik Daerah

45. Badan Pendapatan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan Pendapatan Daerah

46. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan program/kegiatan sebagai berikut:
a. Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Mutasi dan Promosi ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik

dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

c. Kebijakan Umum Daerah dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024 merupakan periode RPJMD III dalam pentahapan RPJPD Kabupaten Rote Ndao 2005-2025, dimana temanya adalah "kemandirian dan daya saing" dan prioritas pembangunan Rote Ndao diletakkan untuk memantapkan mutu SDM, menjaga dan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah dengan dukungan yang berkualitas dari pembangunan infrastruktur dan perencanaan tata ruang dan Lingkungan Hidup, penegakkan hukum, stabilitas politik, profesionalisme aparatur, serta ketertiban dan keamanan yang kondusif dan terjaga lewat partisipasi aktif semua unsur pembangunan. Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD.

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi, Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

Strategi Kabupaten Rote Ndao	
1	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan dapat dijangkau
2	Percepatan Pencegahan dan penanganan *Stunting* Terintegrasi
3	Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan penyakit
4	Meningkatkan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
5	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
6	Penguatan peran keluarga dan pengarusutamaan gender
7	Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah Kebijakan Kabupaten Rote Ndao	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, tenaga kependidikan dan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah
2	Penduduk usia sekolah bersekolah pada semua jenjang pendidikan sesuai usianya
3	Meningkatkan kesehatan ibu hamil serta status gizi bayi dan balita secara berkesinambungan
4	Kerja sama lintas sektor dalam penanganan dan penanggulangan *stunting*
5	Meningkatkan cakupan imunisasi, asi eksklusif dan kawasan tanpa rokok
6	Meningkatkan pencegahan penularan penyakit kepada kelompok rentan
7	Penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat
8	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga kesehatan minimal 5 jenis tenaga kesehatan setiap puskesmas
9	Penguatan kapasitas institusi kesehatan dengan peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas
10	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
11	Meningkatkan ketahanan dan peran keluarga, serta perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
12	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pendudukan dan KB
13	Menjaga pertumbuhan penduduk dibawah 3.80%

d. Gambaran Orientasi dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Penerapan dan Pencapaian SPM dalam Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun bersarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga dapat terwujud tujuan dan sasaran pembangunan nasional. RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dengan Tema Pembangunan Tahun 2021 adalah

“PERCEPATAN PEMBANGUNAN SDM, PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAERAH DAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR PARIWISATA, PERTANIAN DAN PERIKANAN”.

Sesuai dengan potensi yang dimiliki serta kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao, maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021 yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan
2. Pencegahan dan penanganan stunting
3. Pembangunan pariwisata
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sistem kesehatan daerah.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao secara umum. Capaian kinerja makro secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Indeks Pembangunan Manusia	62,39%	62,6%	+0,337%
2	Angka Kemiskinan	27,54%	28,08%	+1,961%
3	Angka Pengangguran	4,9%	2,73%	-44,286%
4	Pertumbuhan Ekonomi	0,21%	2,08%	+890,476%
5	Pendapatan Per Kapita	1931606.13	1971698.60	+40.092,47
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,40	0,35	-0,5%

Sumber Data : Kabupaten Rote Ndao Dalam Angka 2021 -2022

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*output)*

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Pendidikan**	1) Jumlah Satuan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Negeri : - Swasta : - Akreditasi A : 3 Akreditasi B : 19 Akreditasi C : 4	Dinas PKO	
		2) Jumlah peseta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		3) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Negeri : 1 orang Swasta : 119 orang	Dinas PKO	
		5) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Negeri : 8 Swasta : 44	Dinas PKO	
		6) Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	Negeri : Sarjana :6 Sertifikasi : 2 Swasta Sarjana :37 Sertifikasi : 27	Dinas PKO	
		7) Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Negeri Sarjana : 2 Sertifikasi : 2 Calon Kepsek : - Swasta : Sarjana : 18 Sertifikasi : 18 Calon Kepsek : -	Dinas PKO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD Negeri : Akreditasi A : 6 Sekolah Akreditasi B : 52 Sekolah Akreditasi C : 59 Sekolah SMP Negeri : Akreditasi A : 3 Sekolah Akreditasi B : 24 Sekolah Akreditasi C : 12 Sekolah	Dinas PKO	
		9) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7.100 Orang	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		10) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemda	2.010	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		11) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		12) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		13) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Negeri : 407 orang Swasta : 76 orang	Dinas PKO	
		14) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri : 370 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	940 orang	Dinas PKO	
		16) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri 378 orang Swasta : 2 orang	Dinas PKO	
		17) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Negeri 118 orang Swasta : 19 orang	Dinas PKO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		18) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri : 31 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		19) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Negeri : 3 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		20) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Negeri : 14 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		21) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 732 orang Swasta : 71 Sertifikat Pendidik Negeri : 418 orang Swasta : 43	Dinas PKO	
		22) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 361 orang Swasta : 2 Sertifikat Pendidik Negeri : 204 orang Swasta : 2	Dinas PKO	
		23) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 119 orang Swasta : 19 Sertifikat Pendidik Negeri : 107 orang Swasta : 14 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 81 orang Swasta : 11	Dinas PKO	
		24) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 39 orang Swasta : 1 Sertifikat Pendidik Negeri : 35 orang Swasta : 1 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 32 orang Swasta : 1	Dinas PKO	
		25) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	Negeri : 2 orang Swasta : -	Dinas PKO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		SMA/sederajat			
		26) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Negeri : 11 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		27) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD Negeri : Akreditasi A : 6 Sekolah Akreditasi B : 52 Sekolah Akreditasi C : 59 Sekolah SMP Negeri : Akreditasi A : 3 Sekolah Akreditasi B : 24 Sekolah Akreditasi C : 12 Sekolah	Dinas PKO	
		28) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7.100	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		29) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.010	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		30) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		31) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		32) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Negeri : 407 orang Swasta : 76 orang	Dinas PKO	
		33) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 370 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		34) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	940 orang	Dinas PKO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		35) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri 378 orang Swasta : 2 orang	Dinas PKO	
		36) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Negeri 118 orang Swasta : 19 orang	Dinas PKO	
		37) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 31 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		38) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Negeri : 3 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		39) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 14 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		40) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 732 orang Swasta : 71 Sertifikat Pendidik Negeri : 418 orang Swasta : 43	Dinas PKO	
		41) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 361 orang Swasta : 2 Sertifikat Pendidik Negeri : 204 orang Swasta : 2	Dinas PKO	
		42) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 119 orang Swasta : 19 Sertifikat Pendidik Negeri : 107 orang Swasta : 14 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 81 orang Swasta : 11	Dinas PKO	
		43) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 39 orang Swasta : 1 Sertifikat Pendidik Negeri : 35 orang Swasta : 1 Sertifikat Calon	Dinas PKO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Kepala Sekolah Negeri : 32 orang Swasta : 1		
		44) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Negeri : 2 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		45) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Negeri : 11 orang Swasta : -	Dinas PKO	
		46) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Negeri : - Swasta 1	Dinas PKO	
		47) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		48) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		49) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Negeri 10 Orang Swasta : -	Dinas PKO	
		50) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Negeri : 14 orang Swasta : 41	Dinas PKO	
		51) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	49 orang	Dinas PKO	
		52) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Dinas PKO	Tidak ada Kegiatan
		53) Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Negeri 1 orang Swasta : 3 orang	Dinas PKO	
2	**Kesehatan**	1) Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 RS	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 RS	Dinas Kesehatan	
		3) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12 Paket ANC	Dinas Kesehatan	
		4) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	189 Bidan	Dinas Kesehatan	
		5) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12 Paket Alat Partus	Dinas Kesehatan	
		6) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	189 Bidan	Dinas Kesehatan	
		7) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3048 Amp Vit K Inj. 3048 uniject Vaksin HBO	Dinas Kesehatan	
		8) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	189 Bidan	Dinas Kesehatan	
		9) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	54 Paket	Dinas Kesehatan	
		10) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	10 Orang	Dinas Kesehatan	
		11) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12 Paket	Dinas Kesehatan	
		12) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	60 Orang	Dinas Kesehatan	
		13) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Kit Posbindu = 100 Stik Gula = 39.514	Dinas Kesehatan	
		14) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	47 Orang	Dinas Kesehatan	
		15) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12 KIT Lansia BMHP	Dinas Kesehatan	
		16) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Nakes	Dinas Kesehatan	
		17) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tensimeter Digital = 100	Dinas Kesehatan	
		18) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang	Dinas Kesehatan	
		19) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Alat Pemeriksaan Gula Darah = 50 Stik Gula = 39.514	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		20) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	24 Orang	Dinas Kesehatan	
		21) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Amitriphilin 25 mg (HCl) 1.070 Tab Carbamazepine 200 mg 6.592 Tab Chlorpromazin HCl 100 mg 29.750 Tab Clobamazam tab. 10 mg 5.000 Tab Diazepam tab. 5 mg 11.570 Tab Diazepam 5 mg/ml Inj. 310 Amp Haloperidol tab 5 mg 26.330 Tab Haloperidol Decanoat 50 Inj 297 Amp Phenobarbital Tab 30 mg 9.710 Tab Risperidon tab 2 mg 36.845 Tab Triheksifenidil tab. 2 mg 35.760 Tab	Dinas Kesehatan	
		22) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Dokter 33 Perawat	Dinas Kesehatan	
		23) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	OAT KAT I : 187 Paket OAT KAT II : 0 Paket OAT ANAK : 7 Paket OAT KAT.I Combipak : 9 Paket ZN .: 45 Paket Sputum Pot Dahak : 500 Pot	Dinas Kesehatan	
		24) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter : 2 Perawat : 12	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			ATLM : 8		
		25) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	R1 = 4500 R2 = 225 R3 = 125 ARV = 14 Botol	Dinas Kesehatan	
		26) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	50 orang	Dinas Kesehatan	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha);	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m);	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha);	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m);	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		8) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha);	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		9) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m);	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		10) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha);	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m);	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		12) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		13) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		14) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		15) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik;	120/38.502,42 x 100% = 0,31%	Dinas PUPR	
		16) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik;	4.602,31 / 34.708,33 x 100% = 13,26%	Dinas PUPR	
		17) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		18) Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten;	Ada	Dinas PUPR	
		.9) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten;	Ada	Dinas PUPR	
		20) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten penyelenggaran SPAM;	1 BUMD	Dinas PUPR	
		21) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM;	1	Dinas PUPR	
		22) Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain;	5	Dinas PUPR	
		23) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD- S;	0	Dinas PUPR	
		24) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		25) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T;			
		26) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		27) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		28) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		29) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		30) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		31) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		32) Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		33) Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		34) Kinerja penyediaan prasarana pengangkutan lumpur tinja;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		35) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		36) Kinerja penyampaian jasa penyedotan lumpur tinja;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		37) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi;	1.270/1.270 x 100% = 100%	BKA	
		38) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting;	207 IMB	Dinas PM & PTSP	
		39) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung;	Ada	Dinas PUPR	
		40) Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Dinas PUPR	
		41) Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	3	Dinas Budpar	
		42) Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	0	BKA	Tidak Ada Kegiatan
		43) Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kabupaten	1.419	BKA	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		44) Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kabupaten yang dipelihara/dirawat	1.419	BKA	
		45) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten;	459,83 Km	Dinas PUPR	
		46) Panjang jalan yang dibangun;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		47) Panjang jembatan yg dibangun;	11 Meter	Dinas PUPR	
		48) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi);	29,497 Km	Dinas PUPR	
		49) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		50) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi;	1,28 Km	Dinas PUPR	
		51) Panjang jembatan yang direhabilitasi;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		52) Panjang jalan yang dipelihara;	0,25 Km	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		53) Panjang jembatan yang dipelihara;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		54) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten;	1 Kali	Dinas PUPR	
		55) Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten;	120 Orang	Dinas PUPR	
		56) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten;	120 Orang	Dinas PUPR	
		57) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		58) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		59) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		60) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		61) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		62) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		63) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		64) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis;	120	Dinas PUPR	
		65) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten;	120	Dinas PUPR	
		66) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		67) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		68) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		69) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		70) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya;			
		71) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		72) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		73) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		74) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		75) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		76) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		77) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		78) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya;	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	117	Dinas Perkim & LH	
		2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	117	Dinas Perkim & LH	
		3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	468	Dinas Perkim & LH	
		4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2	Dinas Perkim & LH	
		6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	2 KK/12 Jiwa	Dinas Perkim & LH	
		9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		10) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		11) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		12) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		13) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		14) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		15) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		16) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	77,33	Dinas Perkim & LH	
		17) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		18) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		19) Jumlah rumah di kabupaten	33.135	Dinas Perkim & LH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		20) Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		21) Jumlah rumah tidak layak huni	5.675	Dinas Perkim & LH	
		22) Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		23) Rasio rumah dan KK	39.207/33.135 = 1,18	Dinas Perkim & LH	
		24) Jumlah rumah pembangunan baru	1.333	Dinas Perkim & LH	
		25) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		26) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		27) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		28) Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		29) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		30) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		31) Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		32) Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		33) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindung Masyarakat**	1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani	5 Kasus	Satpol PP	
		2) Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	1.908 Orang	Satpol PP	
		3) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	Satpol PP	
		4) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 Orang	Satpol PP	
		5) Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Satpol PP	
		6) Tersedianya sarana prasarana minimal	9 Unit	Satpol PP	
		7) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0/0 x 100% = 0%	BPBD	Tidak Ada Kegiatan
		8) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	17.700/143.764x100% = 12,311%	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	Tidak Ada Kegiatan
		10) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	Tidak Ada Kegiatan
		11) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD	Tidak Ada Kegiatan
		12) Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD	Tidak Ada Kegiatan
		13) Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	BPBD	Tidak Ada Kegiatan
		14) Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	Tidak Ada Kegiatan
		15) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	1/1 x 100% = 100%	BPBD	
		16) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	1/3 x 100% = 33,33%	BPBD	
		17) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	40/40 x 100% = 100%	BPBD	
		18) Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	2/3 x 100% = 66,66%	BPBD	
		19) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten	0	Satpol PP	Tidak Ada Kegiatan
		20) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	Satpol PP	Tidak Ada Kegiatan
		21) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	Satpol PP	Tidak Ada Kegiatan
		22) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Satpol PP	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		23) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	0	Satpol PP	Tidak Ada Kegiatan
		24) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0	Satpol PP	Tidak Ada Kegiatan
		25) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Satpol PP	Tidak Ada Kegiatan
		26) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	Satpol PP	Tidak Ada Kegiatan
6	**Sosial**	1) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2 Aplikasi	Dinas Sosial	
		2) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinas Sosial	
		4) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	397 Orang	Dinas Sosial	
		5) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 Kendaraan	Dinas Sosial	
		6) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	348 Orang	Dinas Sosial	
		7) Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		8) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	6 Orang	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	170 Orang	Dinas Sosial	
		10) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		11) Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		13) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		14) Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	54 Orang	Dinas Sosial	
		15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		16) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1	Dinas Sosial	
		17) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		19) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		20) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		21) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		22) Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	9.603 KK	Dinas Sosial	
		23) Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		24) Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		25) Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		26) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial	Tidak Ada Kegiatan
		27) Jumlah pekerja social professional /tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	30 Orang	Dinas Sosial	
7	**Tenaga Kerja**	1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		3) Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		4) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		5) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		6) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1/10 x 100% = 0,01%	Dinas Transnaker	
		7) Persentase LPK yang terakreditasi	2/5 x 100% = 0,4%	Dinas Transnaker	
		8) Persentase LPK yang memiliki perizinan	5/5 x 100% = 100%	Dinas Transnaker	
		9) Jumlah penganggur yang dilatih	10 Orang	Dinas Transnaker	
		10) Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan	10/10 x 100% = 100%	Dinas Transnaker	
		11) Presentase penyerapan lulusan	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		12) Lulusan bersertifikat kompetensi	10	Dinas Transnaker	
		13) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		14) Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		15) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	2/107 x 100% = 1,86%	Dinas Transnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		16) Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		17) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	3/46 x 100% = 58,70%	Dinas Transnaker	
		18) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	27/3 x 100% = 133,33%	Dinas Transnaker	
		19) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	3	Dinas Transnaker	
		20) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		21) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	34/27x100%= 125,92%	Dinas Transnaker	
		22) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	5/107 x 100% = 4,67%	Dinas Transnaker	
		23) Jumlah mogok kerja	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada
		24) Jumlah penutupan perusahaan	1 Perusahaan	Dinas Transnaker	
		25) Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada
		26) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada
		27) Jumlah perselisihan PHK	2 Kasus	Dinas Transnaker	
		28) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	2 Orang	Dinas Transnaker	
		29) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	4 Kasus	Dinas Transnaker	
		30) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang diberdayakan	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		31) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	4/5 x 100% = 80%	Dinas Transnaker	
		32) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	195 Orang	Dinas Transnaker	
		33) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten	27	Dinas Transnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		34) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada
		35) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada
		36) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada
		37) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten	4 LPTKS	Dinas Transnaker	
		38) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		39) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		40) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		41) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		42) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		43) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		44) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
		45) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0	Dinas Transnaker	Tidak Ada Kegiatan
8	**Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak**	1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG	0	Dinas P3AP2KB	Tidak Ada Kegiatan
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten	0	Dinas P3AP2KB	Tidak Ada Kegiatan
		3) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk	0	Dinas P3AP2KB	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			
		4) Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga	Dinas P3AP2KB	
		5) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	42/42 x 100% = 100%%	Dinas P3AP2KB	
		6) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 Lembaga	Dinas P3AP2KB	
		7) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab (APBD kabupaten)	1 Lembaga	Dinas P3AP2KB	
		8) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan	0	Dinas P3AP2KB	Tidak Ada Kegiatan
		9) Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih	0	Dinas P3AP2KB	Tidak Ada Kegiatan
		10) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	Dinas P3AP2KB	Tidak Ada Kegiatan
		11) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	4 Lembaga	Dinas P3AP2KB	
		12) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	Dinas P3AP2KB	Tidak Ada Kegiatan
		13) Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 Lembaga	Dinas P3AP2KB	
		14) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	45/45 x 100% = 100%	Dinas P3AP2KB	
9	**Pangan**	1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
		2) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak Ada Kegiatan
		4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Dinas Ketahanan Pangan	
		5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	Peta Ketahanan
		6) Tertanganinya kerawanan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
		7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan	
		8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	Dinas Ketahanan Pangan	
10	**Pertanahan**	1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	0/0 x 100 = 100%%	Dinas PM & PTSP	
		2) SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		3) SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan maksimum/ absentee	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		4) Dokumen Izin membuka tanah	Tidak Ada	Kantor Pertanahan	
		5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
11	**Lingkungan Hidup**	1) Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks Tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		2) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		3) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	30/30 x 100% = 100%	Dinas Perkim & LH	
		4) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten			
		5) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		6) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		7) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		8) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	2/2x100%=100%	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	1) Penerbitan akta perkawinan	1090/1090 x 100% = 100%	Dinas Dukcapil	
		2) Penerbitan akta perceraian	47/47 x 100% = 100%	Dinas Dukcapil	
		3) Penerbitan akta kematian	591/591 x 100% = 100%	Dinas Dukcapil	
		4) Penyajian data kependudukan	2/2 x 100% = 100%	Dinas Dukcapil	
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas PMD	Tidak Ada Kegiatan
		2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Dinas PMD	Tidak Ada Kegiatan
		3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	Dinas PMD	Tidak Ada Kegiatan
		4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga	0	Dinas PMD	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
		5) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas PMD	Tidak Ada Kegiatan
		6) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Dinas PMD	Tidak Ada Kegiatan
		7) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	Dinas PMD	Tidak Ada Kegiatan
		8) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Dinas PMD	Tidak Ada Kegiatan
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas P3AP2KB	Tidak Ada Kegiatan
		2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	14.506.	Dinas P3AP2KB	
		3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	1.434/7.731 x 100% = 18,55%	Dinas P3AP2KB	
		4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	4.320/4.320 x 100% =108%	Dinas P3AP2KB	
		5) Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	57 Stakeholders	Dinas P3AP2KB	
		6) Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	16/16 x 100% = 100%	Dinas P3AP2KB	
		7) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.491/19.211 x 100% = 38,99%	Dinas P3AP2KB	
		8) Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	29 Kelompok	Dinas P3AP2KB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9) Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	691/1.273 x 100% = 54,28%	Dinas P3AP2KB	
		10) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	46/169 x 100%= 27,22%	Dinas P3AP2KB	
		11) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	8.286/10.073 x 100% = 82,26%	Dinas P3AP2KB	
15	**Perhubungan**	1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	1/1 x 100% = 100%	Dinas Perhubungan	
		2) Terlaksananya pelayanan uji berkala	395/487 x 100% = 81,11%	Dinas Perhubungan	
		3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	83/83 x 100% =100%	Dinas Perhubungan	
		4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	831/2.054 x 100% = 40,44%	Dinas Perhubungan	
		5) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten	831/2.054 x 100% = 40,44%	Dinas Perhubungan	
16	**Komunikasi dan Informatika**	1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
		4) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	2/46 x 100% = 4 %	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
		6) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	19/46 x 100% = 41%	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
		7) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		8) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		9) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		10) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		11) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		12) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		13) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		14) Persentase data yang dapat berbagi pakai	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		15) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		16) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		17) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		18) Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		19) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		20) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten	3/3 x 100% = 100%	Dinas Koperindag	
		3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0/203 x 100% = 0%	Dinas Koperindag	
		4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	15/203 x 100% = 7,39%	Dinas Koperindag	
		5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	20/203 x 100% = 9,9%	Dinas Koperindag	
		6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	20/10.835 x 100% = 0,37%	Dinas Koperindag	
		7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	-	Dinas Koperindag	-
		9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	14/203 x 100% = 6,9%	Dinas Koperindag	
		10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		14) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	50/888 x 100% = 6 %	Dinas Koperindag	
		15) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		16) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		17) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		18) Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		19) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		20) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
18	**Penanaman Modal**	1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada Kegiatan
		2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada Kegiatan
		3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada Kegiatan
		4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada Kegiatan
		5) Kegiatan pameran penanaman modal	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada Kegiatan
		6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada Kegiatan
		7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	5 Kali	Dinas PM & PTSP	
		8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	846 izin	Dinas PM & PTSP	
		9) Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 119.446.765.389	Dinas PM & PTSP	
		10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	21 Orang 49 Penanaman Modal	Dinas PM & PTSP	
		11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	52 Perusahaan	Dinas PM & PTSP	
		12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten	846 Data	Dinas PM & PTSP	
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100 Orang	Dinas PKO	
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	6	Dinas PKO	
		3) Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas PKO	Tidak Ada Kegiatan
		4) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas PKO	Tidak Ada Kegiatan
		5) Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	17	Dinas PKO	
		6) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	Dinas PKO	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
20	**Statistik**	1) Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
		2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	46	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
		4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		5) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		6) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	34/46 x 100% = 74%	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
		7) Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	1/46 x 100% = 2%	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
21	**Persandian**	1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
22	**Kebudayaan**	1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	29	Dinas Budpar	
		2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	6	Dinas Budpar	
		3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	6	Dinas Budpar	
		4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	6	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		6) Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	6	Dinas Budpar	
		7) Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		8) Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	2	Dinas Budpar	
		9) Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2	Dinas Budpar	
		10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		13) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		14) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		15) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		16) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		17) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		18) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		19) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		20) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
23	**Perpustakaan**	1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	74.249/103.779 = 0,71	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		2) Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	908/103.779 x 100% = 0,87%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	25/103.779 = 0,002	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0/186 x 100%= 0%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	908	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		6) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan
		7) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan
		8) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	7	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24	**Kearsipan**	1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	291/291 x 100% = 100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		2) Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	5.535/5.535 x 100% = 100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	44/44 x 100% = 100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	44/44 x 100% = 100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		5) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan
		6) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	72	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		7) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan
		8) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan
		9) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	44	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		10) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan
25	**Kelautan dan Perikanan**	1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	2.414 KK	Dinas Perikanan	
		2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Dinas Perikanan	Tidak Ada
		3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	0	Dinas Perikanan	Tidak Ada
		4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	11 Kelompok 55 Orang	Dinas Perikanan	
		5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	9.800 Ekor	Dinas Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
26	**Pariwisata**	1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1 Lokasi	Dinas Budpar	
		2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1 Paket	Dinas Budpar	
		3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		4) Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	51	Dinas Budpar	
		5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	Dinas Budpar	
		6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	90	Dinas Budpar	
		8) Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	0/0 x 100% = 0%	Dinas Budpar	Tidak Ada Kegiatan
		9) Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	20/20 x 100% = 100%	Dinas Budpar	
		10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	36 Desa/Kelurahan (9 Kecamatan)	Dinas Budpar	
27	**Pertanian**	1) Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	227 Unit	Dinas Pertanian	
		2) Prasarana pertanian yang digunakan	5	Dinas Pertanian	
		3) Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada Kegiatan
		4) Persentase prasarana yang digunakan	5/5 x 100% =100%	Dinas Pertanian	
		5) Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	0	Dinas Pertanian	Tidak Ada Kegiatan
		6) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	768 Ha/768 Ha x 100% = 100%	Dinas Pertanian	
28	**Kehutanan**	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	Tidak Ada
		2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Wilayah Kabupaten Rote Ndao	
		3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	Tidak Ada
		4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	Tidak Ada
29	**ESDM**	1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	0		Tidak Ada Kegiatan
30	**Perdagangan**	1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Pusat Perbelanjaan = 5/5 x 100% = 100% Toko Swalayan = 10/10 x 100% = 100%	Dinas PM & PTSP	
		2) Persentase penerbitan TDG	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada
		3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada
		4) Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk: a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada
		5) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		6) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		7) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		8) Persentase koefisien variasi harga antar waktu	23,97	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak Ada Kegiatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9) Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	5.380/(12.141,15+13.490,17) x 100% = 2,10%	Dinas Pertanian	
		10) Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	201/1.240 x 100% = 0,16%	Dinas Koperindag	
		11) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
31	**Perindustrian**	1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada Kegiatan
		2) Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		3) Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada
		4) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada
		5) data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten	2.823/2.823 x 100% = 100%	Dinas Koperindag	
32	**Transmigrasi**	1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	Dinas Transnaker	
		2) Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 UPT	Dinas Transnaker	
		3) Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2 UPT	Dinas Transnaker	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (*outcome*)

No	Fungsi Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Pendidikan**	1) Mengukur Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.909/5.359 x 100% = 54,28%	Dinas PKO	
		2) Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	3.263/19.573 x 100% = 16,67%	Dinas PKO	
		3) Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	3.401/40.309 x 100% = 8,43%	Dinas PKO	
		4) Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100/198 x 100% = 50,50%	Dinas PKO	
2	**Kesehatan**	1) Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100/149.007 x 100% = 0,06%	Dinas Kesehatan	
		2) Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupan/Kota yang telah memiliki akreditasi	1/1 x 100% = 100%	Dinas Kesehatan	
		3) Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.563/3.353 x 100% = 76,44%	Dinas Kesehatan	
		4) Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	2.491/3.200 x 100% = 77,84%	Dinas Kesehatan	
		5) Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2.598/3.048 x 100% = 85,37%	Dinas Kesehatan	
		6) Mengukur persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	11.191/14.111 x 100% = 79,31%	Dinas Kesehatan	
		7) Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26.607/29.456 x 100% = 90,32%	Dinas Kesehatan	

No	Fungsi Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8) Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	39.514/82.955 x 100% = 47,63%	Dinas Kesehatan	
		9) Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1.706/14.636 x 100% = 11,66%	Dinas Kesehatan	
		10) Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.990/21.577 x 100% = 18,49%	Dinas Kesehatan	
		11) Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	400/1.317 x 100% = 30,37%	Dinas Kesehatan	
		12) Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	173/306 x 100% = 56,53%	Dinas Kesehatan	
		13) Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1.014/2.387 x 100% = 42,48%	Dinas Kesehatan	
		14) Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	5.600/3.893 x 100% = 143,85%	Dinas Kesehatan	
3	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	1) Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		2) Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	0	Dinas PUPR	Tidak Ada Kegiatan
		3) Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	425/14.455 x 100% = 2,94%	Dinas PUPR	
		4) Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	25.873/32.555 x 100% = 79,47%	Dinas PUPR	

No	Fungsi Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5) Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	26.018/32.555 x 100% = 79,92%	Dinas PUPR	
		6) Mengukur rasio kepatuhan IMB kabupaten	207/207 x 100% = 100%	Dinas PM & PTSP	
		7) Mengukur tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	28.010/459.833 x 100% = 6,09%	Dinas PUPR	
		8) Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	120/2300 x 100%= 5,22%	Dinas PUPR	
		9) Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	62/62 x 100%= 0%	Dinas PUPR	
4.	**Perumahan Rakyat**	1) Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	2/2 x 100% = 100%	Dinas Perkim & LH	
		2) Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		3) Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		4) Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5.602/33.135 x 100% = 16,91%	Dinas Perkim & LH	
		5) Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan**	1) Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	5/5 x 100% = 100%	Satpol PP	
		2) Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	3/15 x 100% = 20%	Satpol PP	
		3) Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	17.700/149.007 x 100% = 11,87%	BPBD	
		4) Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.500/149.007 x 100% = 1,50%	BPBD	

No	Fungsi Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5) Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	BPBD	
		6) Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	9/10 x 100% = 90%	Satpol PP	
		7) Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,6 Menit	Satpol PP	
6	**Sosial**	1) Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	397/3.159 x 100% = 12,57%	Dinas Sosial	
		2) Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	9.607/10.500 x 100% = 91,49%	Dinas Sosial	
7	**Tenaga Kerja**	1) Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1/1 x 100% = 100%	Dinas Transnaker	
		2) Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	93/1.342 x 100% = 6,93%	Dinas Transnaker	
		3) Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja	0/1.342 x 100% = 0%	Dinas Transnaker	Tidak Ada
		4) Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	34/107 x 100% = 31,776%	Dinas Transnaker	
		5) Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	77/77x 100% = 100 %	Dinas Transnaker	
8	**Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak**	1) Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	141.851.000/ 8.161.617.150 x 100% = 1,738%	Dinas P3AP2KB	
		2) Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	48/52.164 x 100% = 0,092%	Dinas P3AP2KB	
		3) Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan,	45/74.035 x 100% =	Dinas P3AP2KB	

No	Fungsi Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,06%		
9	**Pangan**	1) Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten	33.739/15.742 x 100% =214%	Dinas Ketahanan pangan	
10	**Pertanahan**	1) Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Dinas PM & PTSP	
		2) Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		3) Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	Dinas PM & PTSP	
		4) Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		5) Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	0	Dinas Perkim & LH	Tidak Ada Kegiatan
		6) Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	2/2 x 100% = 100%	Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao	
11	**Lingkungan Hidup**	1) Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	71,60	Dinas Perkim & LH	
		2) Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	7,248/13,244 x 100% = 54,73%	Dinas Perkim & LH	
		3) Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	0	Dinas Perkim & LH	
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	1) Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten	92.470/101.724 x 100% =90,90%	Dinas Dukcapil	
		2) Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	4.658/50.549 x 100% =9,21%	Dinas Dukcapil	
		3) Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	40.409/54.098 x 100% = 74,69%	Dinas Dukcapil	
		4) Mengukur persentase perangkat daerah yang telah	1/46 x 100% = 2,17%	Dinas Dukcapil	

No	Fungsi Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			
13	**Permberdayaan Masyarakat dan Desa**	1) Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	0/42 x 100% = 0%	Dinas PMD	Tidak Ada
		2) Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	0/62 x 100% = 0%	Dinas PMD	Tidak Ada
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	1) Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	3,67 %	Dinas P3AP2KB	
		2) Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	15.186/19.211 x 100% =79,05%	Dinas P3AP2KB	
		3) Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need)	2.594/19.211 x 100% =13,50%	Dinas P3AP2KB	
15	**Perhubungan**	1) Mengukur rasio konektivitas Kabupaten	81,67	Dinas Perhubungan	
		2) Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten	0,32	Dinas Perhubungan	
16	**Komunikasi dan Informatika**	1) Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		2) Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
		3) Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	97.590 /143.764 x 100% = 67,88%	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	1) Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	42/203 x 100% = 21%	Dinas Koperindag	
		2) Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	50/888 x100% =6%	Dinas Koperindag	
18	**Penanaman Modal**	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(61.065.395.000-4.900.000.000)/4.900.000.000 x 100% = 61,06%	Dinas PM dan PTSP	
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	1) Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	31 Orang	Dinas PKO	
		2) Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	85 Orang	Dinas PKO	

No	Fungsi Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Mengukur peningkatan prestasi olahraga	0	Dinas PKO	Tidak Ada Kegiatan
20	**Statistik**	1) Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	46/46 x 100% = 100%	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
		2) Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	46/46 x 100% = 100%	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	
21	**Persandian**	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	0	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Tidak Ada Kegiatan
22	**Kebudayaan**	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	6/23 x 100% = 26%	Dinas Budpar	
23	**Perpustakaan**	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan
		Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	8,95	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan
24	**Kearsipan**	1) Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	(291+5535+44+44)/4 = 1478,5	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
		2) Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan
25	**Kelautan dan Perikanan**	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten di wilayah Provinsi	2.642 Ton + 9,90 Ton = 2.651,90 Ton	Dinas Perikanan	
26	**Pariwisata**	1) Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten	51-96/96 x 100%= -47%	Dinas Budpar	
		2) Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	7449-3510/3510 x 100%= 112,22%	Dinas Budpar	
		3) Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten	101/401 x 100% = 25,19%	Bapenda	Tidak Ada Kegiatan

No	Fungsi Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4) Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten (harga berlaku)	5.967,9	Dinas Budpar	
		5) Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten (harga berlaku)	12.061.000	Dinas Budpar	
27	**Pertanian**	1) Mengukur tingkat produktivitas pertanian	118.350,2 ton/25.336 Ha x 100%=467,12 Ton/Ha	Dinas Pertanian	
		2) Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	(649-1.430)/1.430 x 100% = 54,62%	Dinas Peternakan	
28	**Kehutanan**	Tidak ada	-	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	
29	**ESDM**	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	Tidak Ada	Tidak Ada	
30	**Perdagangan**	1) Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	15/227 x 100% = 6,608%	Dinas PM & PTSP	
		2) Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk	5.380/13.490,17 x 100% = 39,88%	Dinas Pertanian	
		3) Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	201/1.240 x 100% = 0,16%	Dinas Koperindag	
31	**Perindustrian**	1) Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	(2.823-2.766) /2.766 x 100% = 2,82%	Dinas Koperindag	
		2) Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
		3) Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh	o	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada Kegiatan

No	Fungsi Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		instansi terkait			
		4) Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada
		5) Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas PM & PTSP	Tidak Ada
		6) Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	0	Dinas Koperindag	Tidak Ada Kegiatan
32	**Transmigrasi**	Tidak Ada			

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci
Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Perencanaan Keuangan**	1) Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	100.357.700.600/ 762.044.314.473 x 100% = 13,7%	BKA	
		2) Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.	31.511.204.366,82/ 3.146.985.400.000 = 1,001	BKA	
		3) Mlihat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2 (Berkembang) Nilai 2,046	Inspektorat	
		4) Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tidak Ada	Inspektorat	Tidak Ada Kegiatan
		5) Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.	63.930.933.331,51/ 751.544.314.473,51 x 100% = 8,50%	BKA	
		6) Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir	WTP	BKA	
2	**Pengadaan**	1) Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Tidak Ada
		2) Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	96.395.631.008/95.092 .857.575 x 100% = 101,37%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
		3) Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	191.488.488.583/673. 371.660.870 x 100%= 28,44%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	**Kepegawaian**	1) Mengukur rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.486/603 x 100% =412,27%	BKPP	
		2) Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	1.026/1.543 x 100% = 66,49%	BKPP	
		3) Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	60/1.026 x 100% = 5,85%	BKPP	
4	**Manajemen Keuangan**	1) Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	[(762.044.314.473,51/ 796.146.557.412) -1]x 100% = 4,28%	BKA	
		2) Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	[(31.511.204.366,82/ 796.146.557.412) -1]x 100% = 96,04%	BKA	
		3) Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	Ada	BKA	
		4) Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	(62.201.201.572,53/ 599.138.717.910,35 x 100% = 0,07%	BKA	
5	**Transparansi dan Partisipasi Publik**	1) Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	187/187 x100% = 100%	Dinas Kominfo	
		2) Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	3/187x100%= 1,60%	Dinas Kominfo	Tidak Ada Kegiatan

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan pengukuran kinerja pemerintah merupakan bentuk pengukuran akuntabiltas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan pengukuran kinerja adalah pengukuran kineja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Rote Ndao melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, yang disusun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Perngukuran Kinerja Tahun 2021 memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi.**
  Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- **Hasil Sedang.**
  Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.
- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah.**
  Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja	≥	Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja	<	Target Kinerja	:	Tidak Mencapai Target
Realisasi Kinerja	>	Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja	<	Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran program pendukung capaian kinerja, jika persentase efisiensi anggaran diatas 0% maka dikategorikan **"Efisien"**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sama dengan 0% maka dikategorikan **"Kurang Efisien"**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥1 maka dikategorikan **"Efektif"** dan sebaliknya jika nilai rasio <1 sehingga dikategorikan **"Kurang Efektif"**.

B. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2		3	4	5	6	7
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING							**92,18**	**SANGAT TINGGI**
1.	**Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia**	**1.**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**65,62**	**62,60**	**95,40**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,11	13,19	93,48	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.	Kasus Kematian Ibu	Kasus	10	10	100,00	Sangat Tinggi
		4.	Prevalensi Stunting	%	23,48	23,48	100,00	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Sasaran					100,00	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2		3	4	5	6	7
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.	Indeks Pembanguan Gender (IPG)	Poin	92,03	84,08	91,36	Sangat Tinggi
		6.	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang	77	87	87,01	Tinggi
						Rata-Rata Capaian Sasaran	89,19	Tinggi
	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	7.	Laju pertumbuhan Penduduk	%	1,50	1,83	78,00	Tinggi
MISI 2 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN							**95,82**	**SANGAT TINGGI**
2.	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing**	**8.**	**PDRB Per Kapita ADHB**	**Rp**	**23.405.000**	**21.976.886,99**	**93,90**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	9.	Kemiskinan Ekstrem	%	15	15,00	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian	10.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	%	8,19	6,86	83,76	Tinggi
3.	**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan**	**11.**	**PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**	**Miliar Rupiah**	**1.697**	**1581,77**	**93,21**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	12.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	153.364	156.802,30	102,24	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah	13.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	9.000	7.500	83,33	Tinggi
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	14.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	67,30	76,90	114,26	Sangat Tinggi
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN							**114,56**	**SANGAT TINGGI**
4.	**Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air dan Permukiman Yang Layak**	**15.**	**Cakupan Kualitas Infrastruktur**	**%**	**69,78**	**70,61**	**101,19**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Konektivitas	16.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	47,42	47,02	99,16	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1		2		3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air	17.	Rasio Jaringan Irigasi	%	62,97	63,75	101,24	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	5.589	5.602	100,23	Sangat Tinggi
5.	**Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**	**19.**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**70,58**	**71,60**	**101,45**	**Sangat Tinggi**
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	20.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	%	24,00	54,73	228,04	Sangat Tinggi
		21.	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	460.662	460.662	100,00	Sangat Tinggi
						Rata-Rata Capaian Sasaran	164,02	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	22.	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,02	96,80	99,77	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah	23.	Desa Tangguh Bencana	Desa	10	10	100,00	Sangat Tinggi
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA							**77,88**	**TINGGI**
6.	**Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik**	**24.**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)**	**Predikat**	**CC**	**CC**	**100,00**	**Sangat Tinggi**
		25.	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**65**	-	**0,00**	**Sangat Rendah**
						Rata-Rata Capaian Tujuan	**50,00**	**Rendah**
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	26.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	27.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	79	88,10	111,52	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI							**95,11**	**SANGAT TINGGI**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA							**98,47**	**SANGAT TINGGI**

Keterangan :
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 yang terdiri dari 6 (enam) tujuan, 17 (tujuh belas) sasaran dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja

Indikator Kinerja Utama sebesar **98,47%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**, dengan rata-rata capaian kinerja Misi sebesar **95,11%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"** yakni Misi 1 sebesar 92,18% (*Sangat Tinggi*), Misi 2 sebesar 95,82% (*Sangat Tinggi*), Misi 3 sebesar 114,56% (*Sangat Tinggi*) dan Misi 4 sebesar 77,88% (*Tinggi*).

Gambar 2.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menunjukan bahwa:

a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *"Sangat Tinggi"* sejumlah 22 (dua puluh dua) indikator atau 81,48%;
b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *"Tinggi"* sejumlah 4 (empat) indikator atau 14,81%;
c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "Sedang" sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%;
d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Rendah*" sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%; dan
e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *"Sangat Rendah"* sejumlah 1 (satu) indikator atau 3,70%.

2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING						**95,40**	**SANGAT TINGGI**
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,62	62,60	95,40	Sangat Tinggi
MISI 2 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN						**93,55**	**SANGAT TINGGI**
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing	2.	PDRB Per Kapita ADHB	Rp	23.405.000	21.976.887	93,90	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan	3.	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Miliar Rupiah	1.697	1.581,77	93,21	Sangat Tinggi
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN						**101,32**	**SANGAT TINGGI**
Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air dan Permukiman Yang Layak	4.	Cakupan Kualitas Infrastruktur	%	69,78	70,61	101,19	Sangat Tinggi
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,58	71,6	101,45	Sangat Tinggi
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA						**50,00**	**RENDAH**
Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Predikat	CC	CC	100,00	Sangat Tinggi
	7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	65	-	0,00	Sangat Rendah
	Rata-Rata Capaian Tujuan					**50,00**	**Rendah**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR						**83,59**	**TINGGI**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 yang terdiri dari 6 (enam) tujuan dan 7 (tujuh) indikator menunjukan bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan sebesar **83,59%** atau dikategorikan **"Tinggi"**.

Gambar 2.2
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

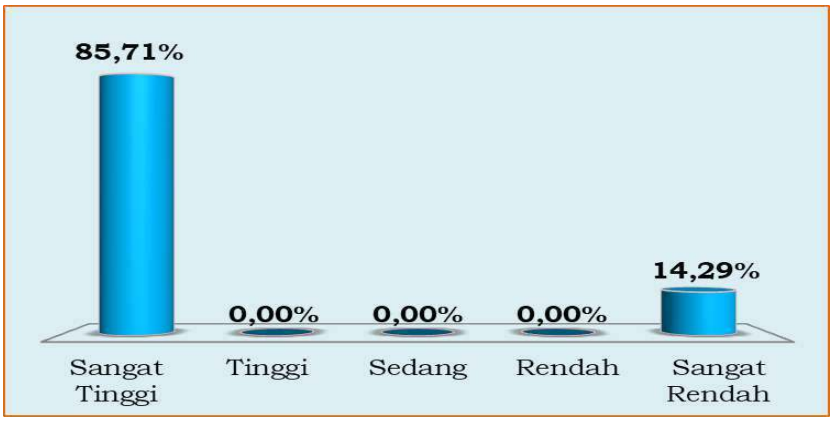

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menunjukan bahwa:

a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Sangat Tinggi*" sejumlah 6 (enam) indikator atau 85,71%;
b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Tinggi*" sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%;
c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Sedang*" sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%;
d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Rendah*" sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%; dan
e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori *"Sangat Rendah"* sejumlah 1 (satu) indikator atau 14,29%.

3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING						**91,64**	**SANGAT TINGGI**
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,11	13,19	93,48	Sangat Tinggi
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.	Kasus Kematian Ibu	Kasus	10	10	100,00	Sangat Tinggi
	3.	Prevalensi Stunting	%	23,48	23,48	100,00	Sangat Tinggi

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7
	Rata-Rata Capaian Sasaran					100,00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.	Indeks Pembanguan Gender (IPG)	Poin	92,03	84,08	91,36	Sangat Tinggi
	5.	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang	77	87	87,01	Tinggi
	Rata-Rata Capaian Sasaran					89,19	Tinggi
Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	6.	Laju pertumbuhan Penduduk	%	1,5	1,83	78	Tinggi
MISI 2 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN						**96,72**	**SANGAT TINGGI**
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	7.	Kemiskinan Ekstrem	%	15	15	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian	8.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	%	8,19	6,86	83,76	Tinggi
Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	9.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	153.364,00	156.802,30	102,24	Sangat Tinggi
Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah	10.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	9.000	7.500	83,33	Tinggi
Meningkatnya Ketahanan Pangan	11.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	67,30	76,90	114,26	Sangat Tinggi
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN						**118,35**	**SANGAT TINGGI**
Meningkatnya Konektivitas	12.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	47,42	47,02	99,16	Sangat Tinggi

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2		3	4	5	6	7
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air	13.	Rasio Jaringan Irigasi	%	62,97	63,75	101,24	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	5.589	5602	100,23	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	15.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	%	24,00	54,73	228,04	Sangat Tinggi
	16.	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	460.662	460.662	100,00	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Sasaran					164,02	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	17.	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,02	96,80	99,77	Sangat Tinggi
Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah	18.	Desa Tangguh Bencana	Desa	10	10	100,00	Sangat Tinggi
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA						**105,76**	**SANGAT TINGGI**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	19.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	20.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	79	88,1	111,52	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR						**103,67**	**SANGAT TINGGI**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator menunjukan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Sasaran sebesar **103,67%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Gambar 2.9
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

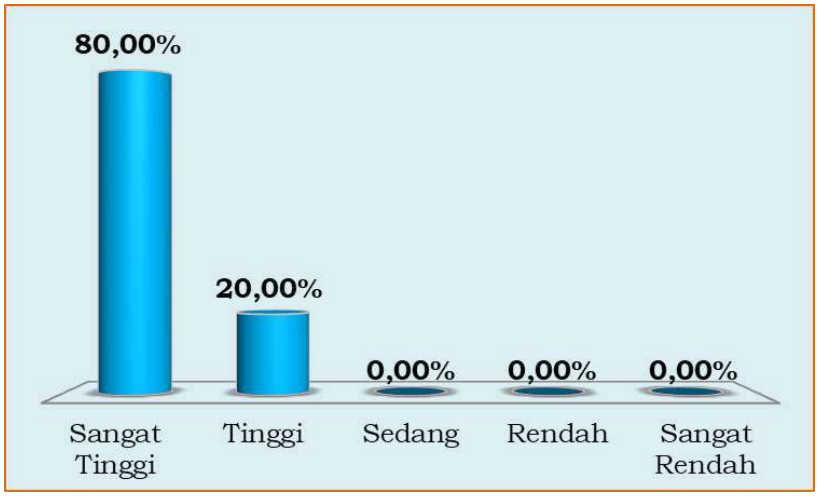

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menunjukan bahwa:

a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "Sangat Tinggi" sejumlah 16 (enam belas) indikator atau 80%;
b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "Tinggi" sejumlah 4 (empat) indikator atau 20%;
c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "Sedang" sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%;
d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "Rendah" sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%; dan
e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "Sangat Rendah" sejumlah 0 (nol) indikator atau 0%.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meliputi 2 (dua) aspek, yaitu aspek capaian kinerja tujuan dan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja tujuan tahun 2021 akan diuraikan berdasarkan misi, sebagai berikut:

MISI 1
Tujuan : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat Rote Ndao yang memiliki daya saing dalam tantangan global dan menjadikan masyarakat yang maju dan mandiri, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik aparatur dan masyarakat menjadi perhatian utama. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila SDM yang ada, memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga menghasilkan produk-produk yang kompetetif dan berdaya saing di era globalisasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimiliknya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Tabel 2.10
Nilai Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Dimensi	Nilai
Umur Harapan Hidup (Tahun)	64,88
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,19
Rata-rata Lamanya Sekolah (Tahun)	7,71
Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	6.503,00
Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	**62,60**

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao, 2022

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021 adalah 62,60 poin dengan rincian dimensi umur harapan hidup sebesar 64,88 tahun, dimensi harapan lama sekolah sebesar 13,19 tahun, dimensi rata-rata lamanya sekolah sebesar 7,71 tahun dan dimensi pengeluaran riil perkapita disesuaikan sebesar Rp.6.503,00 (*enam ribu lima ratus tiga rupiah*).

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	62,39	65,62	62,60	95,40	70,00	100,34	89,43
Capaian Kinerja Tujuan						**95,40**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 95,40%, sehingga capaian kinerja tujuan **Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia** tahun 2021 sebesar **95,40%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Indeks IPM Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Nilai IPM ditargetkan sebesar 65,62 poin dan terealisasi sebesar 62,60 poin dengan capaian kinerja sebesar 95,40%.

Gambar 2.4
Perbandingan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rote Ndao Terhadap Capaian Tingkat Provinsi dan Beberapa Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

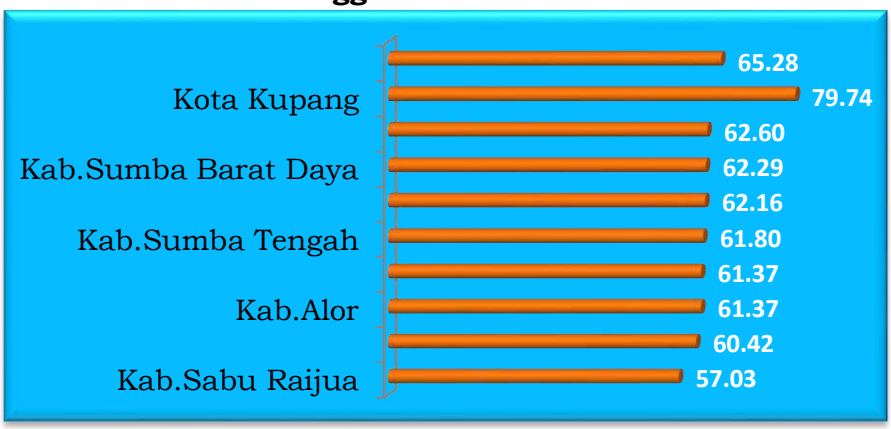

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, 2022

Capaian Nilai IPM Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 masih dibawah capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang, namun capaian Nilai IPM Kabupaten Rote Ndao melampaui capaian Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Sabu Raijua.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks IPM Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 0,21 poin dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 100,34%.

Tren realisasi Nilai IPM Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan peningkatan kinerja yaitu sejak tahun 2017 IPM Kabupaten Rote Ndao terus tumbuh secara konsisten sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 pertumbuhan IPM Kabupaten Rote Ndao menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao. Perlambatan pertumbuhan IPM umumnya disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan umur harapan hidup dan pendidikan, serta menurunnya pengeluaran riil per kapita sebagai akibat dari kontraksi pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.5
Tren Capaian IPM Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021 dan Gap Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

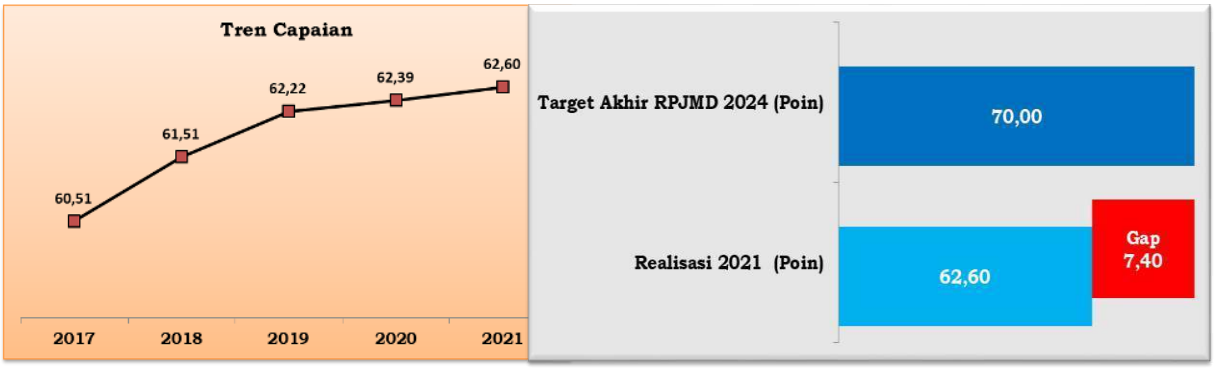

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupatem Rote Ndao dan Data Olahan, 2022

Realisasi indikator kinerja Nilai IPM Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 62,60 poin jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 70,00 poin, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 89,43% dan masih terdapat gap sebesar 7,40 poin (10,57%), sehingga upaya strategis

akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing**" melalui upaya-upaya strategis peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao;
3) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dimensi umur harapan hidup yang meningkat setiap tahun;
4) Peningkatan kualitas pendidikan dimensi harapan lama sekolah dan dimensi rata-rata lamanya sekolah yang meningkat setiap tahun; dan
5) Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyakarat dimensi pengeluaran riil perkapita yang meningkat setiap tahun.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Rote Ndao dalam menerapkan pola hidup sehat dan seimbang;
2) Masih rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut menyumbang terhadap kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan ketersediaan pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan tingkat pendidikan yang rendah;
3) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga dokter, bidan, perawat dan medis lainnya serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; dan
5) Perkembangan Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut:

1) Pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat menjadi prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao;
2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao dan Puskesmas Pembantu serta Posyandu;
3) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
4) Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal; dan
5) Peningkatan standar hidup layak dengan penyediaan lapangan pekerjaan serta menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp. 143.998.795.365,- (s*eratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.113.805.398.232,51 (s*eratus tiga belas miliar delapan ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh satu sen*) atau sebesar 79,03%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.12
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
95,40	**79,03**	**20,97**	**Efisien**	**1,21**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 17,42% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 2

Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (*region*) per periode tertentu atas dasar harga berlaku. PDRB Perkapita (*Income per Capita*) ADHB merupakan PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah (*region*).

Tabel 2.13
Jumlah PDRB ADHB, Jumlah Penduduk dan PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Indikator	Satuan	Jumlah	Sumber Data
PDRB ADHB	Miliar Rupiah	3.274,71	BPS Kab. Rote Ndao, 2022
Jumlah Penduduk	Jiwa	149.007	Dinas Dukcapil Kab. Rote Ndao, 2022
PDRB ADHB Perkapita	Rp.	21.976.886,99	

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Rote Ndao, 2022

Total PDRB ADH Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 3.274,71 miliar rupiah, maka dengan jumlah penduduk sebesar 149.007 (*seratus empat puluh sembilan ribu tujuh*) jiwa menunjukan bahwa PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar Rp.21.976.886,99 (*dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah sembilan puluh sembilan sen*).

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	PDRB Per Kapita ADHB	Rp	22.061.000*	23.405.000,00	21.976.886,99**	93,90	27.172.000,00	99,62	80,88
Capaian Kinerja Tujuan						**93,90**	**Sangat Tinggi**		

*Keterangan : ***)** Angka Sementara, ****)** Angka Sangat Sementara.*

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 93,90%, sehingga capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing** tahun 2021 sebesar **93,90%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, PDRB Perkapita ADHB ditargetkan sebesar Rp.23.405.000,- (*dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.21.976.886,99 (*dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah sembilan puluh sembilan sen*) dengan capaian kinerja sebesar 93,90%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.84.113,01 (*delapan puluh ribu seratus tiga belas rupiah satu sen*) dari capaian tahun 2020 dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 99,62%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas perekonomian masyarakat.

Tren realisasi PDRB Perkapita ADHB selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan periode tahun 2017-2020 terus tumbuh sampai dengan tahun 2021, namun pada tahun 2021 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Rote Ndao menghadapi tantangan dengan pertumbuhan yang melambat akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.6
Tren Capaian PDRB Perkapita ADHB
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

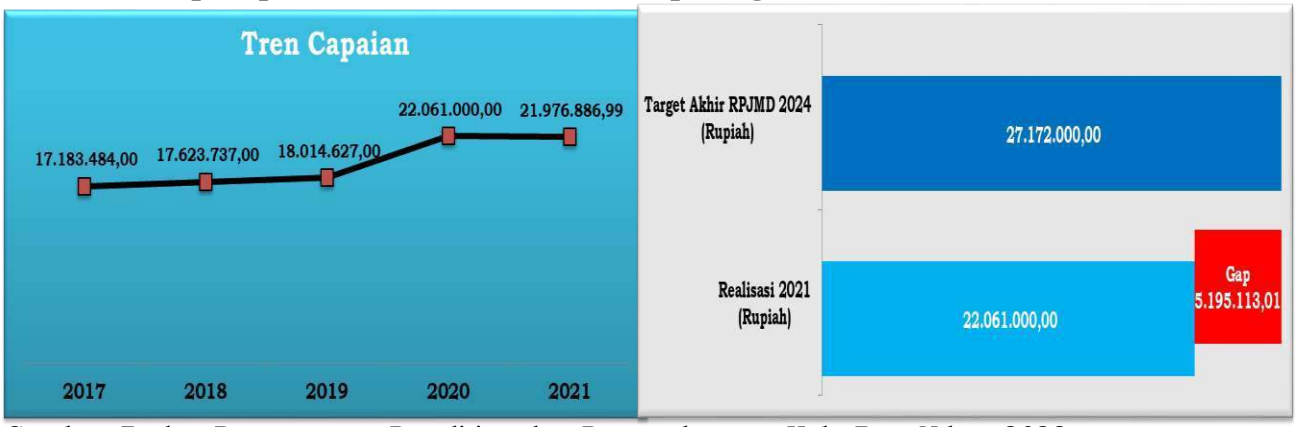

Sumbe: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kab. Rote Ndao, 2022

Realisasi indikator kinerja PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar Rp.21.976.886,99 (*dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah sembilan puluh sembilan sen*) jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar Rp.27.172.000,- (*dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 80,88% dan masih terdapat gap sebesar sebesar Rp.5.195.113,01 (*lima juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah satu sen*) atau 19,12%, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan***" melalui upaya-upaya peningkatan perekonomian daerah.
2) Efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan perekonomian daerah.
3) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
4) Ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi dan informasi yang mendukung kinerja pembangunan daerah melalui *E-Planning* dan lain sebagainya;
5) Koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Rote Ndao; dan
6) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1) Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
2) Masih terbatasnya sumber daya manusia aparatur perencana di Kabupaten Rote Ndao.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur bidang perencanaan.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Program Pengelolaan Perbatasan, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.2.782.963.200,- (*dua miliar tujuh*

ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua raus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.742.776.680,- (*dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) atau sebesar 98,56%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.15
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
93,90	**98,56**	**1,44**	**Efisien**	**0,95**	**Kurang Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,44% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif.

MISI 2

Tujuan 2 : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan

Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan merupakan sektor primer pembangunan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Miliar Rupiah	1.510,00	1.697,00	1.581,77	93,21	2.026,00	104,75	78,07
Capaian Kinerja Tujuan						**93,21**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 93,21%, sehingga disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan** tahun 2021 sebesar **93,21%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ditargetkan sebesar 1.697,00 miliar rupiah dan terealisasi sebesar 1.581,77 miliar rupiah dengan capaian kinerja sebesar 93,21%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 71,77 miliar rupiah dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 100,34%.

Tren realisasi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan peningkatan kinerja yaitu sejak tahun 2017 PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao terus tumbuh secara konsisten sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao menghadapi tantangan dengan pertumbuhan yang melambat akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.7
Tren Capaian PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

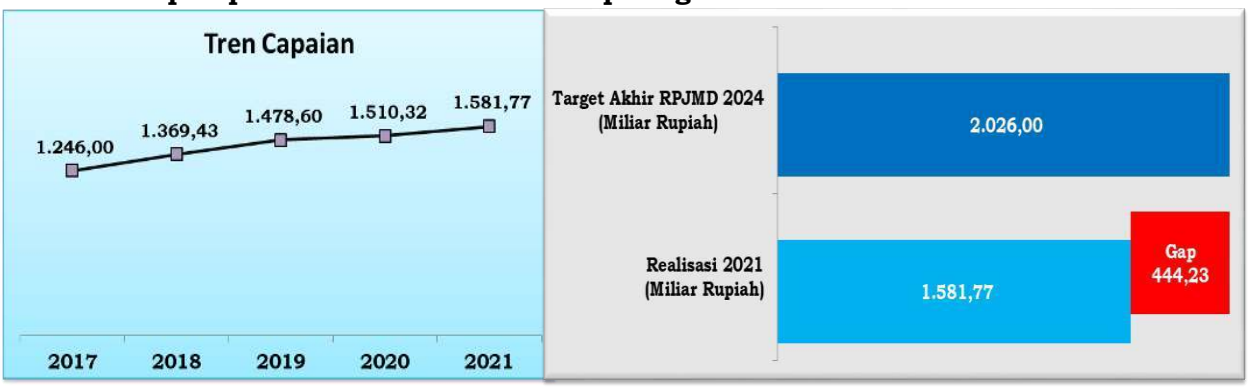

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan Olahan Data, 2022

Realisasi indikator kinerja PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 1.581,77 miliar rupiah jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 2.026,00 miliar rupiah, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 78,07% dan masih terdapat gap sebesar 444,23 miliar rupiah (21,93%), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah yaitu Ibu Bupati Rote Ndao dan Bapak Wakil Bupati Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan***" melalui upaya-upaya meningkatkan produksi pertanian, kehutanan dan perikanan; dan
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Rote Ndao;
3) Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian di Kabupaten Rote Ndao seperti bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan lainnya.
4) Tersedianya sumberdaya petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang bersinergi dengan petugas lapang Pertanian dan Penyuluh Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Rendahnya curah hujan yang mengakibatkan kemarau panjang dengan debit air irigasi yang sangat rendah;
2) Masih tingginya alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian;
3) Banyaknya infrastruktur/jaringan irigasi pertanian yang rusak;
4) Makin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian;
5) Masih tingginya susut hasil komoditi pertanian;
6) Belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi; dan
7) Harga jual yang rendah pada saat panen.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1) Penyediaan sumber-sumber air baku tanah melalui pembagunan embung dan sumur bor pertanian;
2) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas perangkat daerah dan instansi lainnya mengenai pentingnya fungsi lahan pertanian serta dampak alih fungsi lahan pertanian;
3) Optimalisasi dan rehabilitasi sumber-sumber air dan infrastruktur/jaringan irigasi pertanian yang rusak;
4) Penyediaan upah tenaga kerja pertanian melalui optimalisasi anggaran;
5) Penanganan pasca panen yang baik untuk meminimalkan susut hasil komoditi pertanian; dan
6) Pemenuhan kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi; dan
7) Peningkatan peran BULOG untuk bekerja sama dengan kelompok tani/ gapoktan untuk menampung gabah/beras dari petani.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.4.710.613.850,- (*empat miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.4.510.637.763,- (*empat miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*) atau sebesar 95,75%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.17
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
93,21	**95,75**	**4,25**	**Efisien**	**0,97**	**Kurang Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif, namun realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 4,25% atau dikategorikan Efisien.

MISI 3

Tujuan 1 : Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Permukiman Yang Layak

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan kualitas infrastruktur terutama pembangunan jalan, irigasi, permukiman, sanitasi dan air bersih dapat berfungsi sebagai *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao.

Cakupan kualitas infrastruktur Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 merupakan kumulatif dari pembangunan jalan (20%), irigasi (20%), permukiman (20%), sanitasi (20%) dan air bersih (20%) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Proporsi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik

   Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik yang dibangun tahun 2021 sebesar 216,21 km jika dibandingkan dengan panjang total jalan Kabupaten 459,83 km maka capaian proporsi jalan jembatan dalam kondisi baik yang dibangun tahun 2021 sebesar 47,02%.

2. Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik

   Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik yang dibangun tahun 2021 sebesar 84,39 Ha, jika dibandingkan dengan luas irigasi Kabupaten 132,69 Ha, maka capaian rasio irigasi dalam kondisi baik tahun 2021 adalah 63,75%.

3. Cakupan Permukiman Layak

   Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 27.460 Unit, jika dibandingkan dengan keseluruhan rumah sebanyak 33.135 Unit maka cakupan permukiman layak huni di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 82,87%.

4. Cakupan Sanitasi Layak

   Jumlah rumah tangga yang bersanitasi layak tahun 2021 sebanyak 26.017,52 RT, jika dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 32.555,18 RT maka cakupan sanitasi layak di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 79,92%.

5. Cakupan Akses Air Minum

   Jumlah Rumah Tangga yang berakses air bersih di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 25.872,81 RT, jika dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 32.555,18 RT maka cakupan akses air minum di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 79,47%.

Perhitungan kumulatif cakupan kualitas infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Perhitungan Kumulatif Cakupan Kualitas Infrastruktur

Indikator	Perhitungan Kumulatif
Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (20%)	$\frac{20}{100}$ x 47,02 = 9,40
Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (20%)	$\frac{20}{100}$ x 63,75 = 12,75
Cakupan Permukiman Layak (20%)	$\frac{20}{100}$ x 82,87 = 16,57
Cakupan Sanitasi Layak (20%)	$\frac{20}{100}$ x 79,92 = 15,98
Cakupan Akses Air Minum (20%)	$\frac{20}{100}$ x 79,47 = 15,89
Cakupan Kualitas Infrastruktur (%)	**70,61**

Sumber : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao, Tahun 2022
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kab.Rote Ndao, Tahun 2022

Tabel perhitungan diatas menunjukan bahwa cakupan kualitas infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021 sebesar 70,61%, yang merupakan kumulatif dari Proporsi Panjang Jalan

Kabupaten dalam Kondisi Baik (20%) sebesar 9,40%, Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (20%) sebesar 12,75%, Cakupan Permukiman Layak (20%) sebesar 16,57%, Cakupan Sanitasi Layak (20%) sebesar 15,98% dan Cakupan Akses Air Minum (20%) sebesar 15,89%

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Permukiman Yang Layak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Cakupan Kualitas Infrastruktur	%	67,03	69,78	70,61	101,19	84,59	105,34	83,47
Capaian Kinerja Tujuan						**101,19**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Cakupan Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 101,19%, sehingga capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Permukiman Yang Layak** tahun 2021 sebesar **101,19%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Cakupan Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 melampaui target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Cakupan Kualitas Infrastruktur ditargetkan sebesar 69,78% dan terealisasi sebesar 70,61% dengan capaian kinerja sebesar 101,19%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Cakupan Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 3,58% dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 105,34%.

Tren realisasi Cakupan Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan peningkatan kinerja yaitu sejak tahun 2019 Cakupan Kualitas Infrastruktur Kabupaten Rote Ndao terus meningkat secara konsisten sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 menghadapi tantangan dengan terbatasnya aktivitas pembangunan infrastruktur akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.8
Tren Capaian Cakupan Kualitas Infrastruktur
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao, Tahun 2022
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kab.Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Cakupan Kualitas Infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 70,61% jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 84,59%, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 83,47% dan masih terdapat gap cakupan kualitas infrastruktur sebesar 13,98% atau gap kinerja sebesar 16,53%, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**";
2) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pembangunan infrastruktur berjalan efektif;
3) Adanya pemeliharaan dan penambahan infrastruktur secara bertahap serta peningkatan dari sisi teknologi;
4) Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastrukur daerah; dan
5) Tersedianya anggaran bagi pembangunan dan rahibiltasi infrastruktur.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih terdapat sejumlah infrastruktur yang perlu peningkatan dan pemeliharaan secara berkala dan kontinu;
2) Rawannya kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, khususnya pada musim penghujan;
3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembangunan infrastruktur; dan
4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1) Penyediaan anggaran secara kontinu bagi pemeliharaan infrastruktur jalan untuk menjaga selalu dalam kondisi baik;
2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam;
3) Peningkatan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasasarana penunjang pembangunan infrastruktur; dan
4) Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum , Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Penatagunaan Tanah , Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Pengelolaan Persampahan, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.86.161.085.328,- (*delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.79.463.751.272,- (*tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau sebesar 92,93%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.20
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Permukiman Yang Layak

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/ (2)	(6)
101,19	92,23	7,77	Efisien	1,10	Efektif

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 7,77% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif.

MISI 3

Tujuan 2 : Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diamanatkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan suatu fokus utama pembangunan daerah. Pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan

dengan baku mutu air yang ditetapkan. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

IKLH menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

   Perhitungan IKA di Kabupaten Rote Ndao dihitung berdasarkan hasil laboratorium 12 (dua belas) titik sampel dengan 7 (tujuh) parameter untuk setiap sampelnya. Titik sampel tahun 2021 yaitu Hulu Sungai Menggelama (Oemau), Hulu Sungai Menggelama (Sekoen), Hulu Sungai Menggelama (Tanggaloi), Sungai Menggelama Tengah, Sungai Menggelama Hilir, dan Sungai Holoama Hulu (Tilonisi) dengan 2 x pemantauan.

   Hasil laboratorium dihitung berdasarkan rumus IKA menurut metode IP :

$$: IP = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Rata-rata} + \left(C_i/L_{ij}\right)^2_{Maksimum}}{2}}$$

   Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen.

Tabel 2.21
Perhitungan IKA Kabupaten Rote Ndao

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel	Prosentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air
Memenuhi	5	42%	70	29,2
Cemar Ringan	6	50%	50	30,27
Cemar Sedang	-	0%	30	0,00
Cemar Berat	1	8%	10	0,83
Indeks Kualitas Air				**60,30**

Sumber :Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kab.Rote Ndao, Tahun 2022.

Tabel perhitungan diatas menunjukan bahwa IKA Kabupaten Rote Ndao adalah 60,30 poin.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung dengan rumus : **IKU= 100−(500,9×(Ieu−0,1))**. Data untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) diambil dari 4 lokasi sampel (transportasi, industri, permukiman dan perkantoran) dengan 2 x pemantauan.

Tabel 2.22
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Udara
Kabupaten Rote Ndao

Parameter	Rerata Pemantauan	Baku Mutu	Index
NO2	3,23	40	0,0808
SO2	5,87	20	0,2933
Indeks Udara (Indeks Annual Model EU-leu)			0,1870
Indeks Kualitas Udara			**95,1658**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kab.Rote Ndao, Tahun 2022.

Tabel perhitungan diatas menunjukan bahwa IKU Kabupaten Rote Ndao adalah 95,1658 poin.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Lahan IKL dihitung dengan rumus: **IKL=100−((84,3−((LTLLW−DKK) x 100)) x 5054,3)**. Data IKL diperoleh dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 2.23
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Rote Ndao

Luas Tutupan Hutan (Ha)	Luas Semak/ Belukar dan Semak/ Belukar Rawa Pada Fungsi lahan tertentu (Ha)	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Persentase Luas Tutupan Hutan/ Lahan	IKTL
32229,46	7187,45	20,1017997	134434,56	0,2719092	27,19091808	47,4134

Sumber :Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kab.Rote Ndao, Tahun 2022

Tabel perhitungan diatas menunjukan bahwa IKL Kabupaten Rote Ndao adalah 47,4134 poin.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung menggunakan rumus **IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)** yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24
Perhitungan Nilai IKLH Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
Indeks Kualitas Air	60,30	37,6%	22,6728
Indeks Kualitas Udara	95,1658	40,5%	38,54215
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,4134	21,9%	10,38353
		IKLH	**71,60**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kab.Rote Ndao, Tahun 2022

Tabel perhitungan diatas menunjukan bahwa IKLH Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 adalah 71,60 poin.

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,69	70,58	71,60	101,45	71,80	97,16	99,72
Capaian Kinerja Tujuan						**101,45**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 101,45%, sehingga capaian kinerja tujuan **Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan** tahun 2021 sebesar **101,45%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 melampaui target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 70,58 poin dan terealisasi sebesar 71,60 poin dengan capaian kinerja sebesar 101,45%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menurun sebesar 2,09 poin dari capaian tahun 2020 dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 97,16%.

Tren realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukan penurunan kinerja. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan satu titik sampel di Hilir Sungai Menggelama dimana banyak aktifitas masyarakat di

batang air yang mengakibatkan kualitas air semakin menurun (cemar berat) dan banyaknya aktifitas masyarakat yang tidak terkendali sepanjang alur-alur sungai seperti pembuangan limbah cair maupun limbah padat dari limbah rumah tangga yang terakumulasi pada hilir sungai.

Gambar 2.9
Tren Capaian Cakupan Indeks Kualitas Air
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao, Tahun 2022
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kab.Rote Ndao, Tahun 2022.

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 71,60 poin jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 71,80 poin, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 99,72% dan masih terdapat gap sebesar 0,20 poin (0,28%), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target akhir RPJMD.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**" melalui upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao; dan
3) Adanya dukungan dana dalam rangka pemantauan dan pengujian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja tujuan masih menghadapi hambatan dan kendala yaitu:

1) Belum berfungsi laboratorium lingkungan di Kabupaten Rote Ndao; dan
2) Masih kurang optimalnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup karena keterbatasan pembiayaan, sarana prasarana, SDM Aparatur Lingkungan Hidup.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja tujuan ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi laboratorium lingkungan yang didukung dengan pembiayaan, sarana prasarana dan SDM Aparatur Lingkungan Hidup yang memadai; dan
2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur lingkungan hidup.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.366.000.000,- (*tiga ratus enam puluh enam juta rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.317.930.111,- (*tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sebelas rupiah*) atau sebesar 86,87%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.26
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
101,45	**86,87**	**13,13**	**Efisien**	**1,17**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 13,13% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 4

Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan terus ditingkatkan dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik. Tujuan akhir yang diharapkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang berbasis kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Predikat	CC	CC	CC	100,00	A	100	50,00
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	-	65	-	-	71	-	-
Capaian Kinerja Sasaran						**50,00**	**Rendah**		

Keterangan : - (belum ada pemilaian)

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 adalah Predikat CC dan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 belum dilakukan penilaian sehingga capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Akuntabilitas,**

Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik tahun 2021 sebesar **50%** atau dikategorikan **"Rendah"**.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut:

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dibagi menjadi 7 kategori yaitu paling rendah kategori D, kemudian kategori C, kategori B, kategori BB, kategori A dan kategori tertinggi yaitu kategori AA.

Penghitungan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja pemerintah menggunakan metode kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut:

Tabel 2.28
Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kategori	Bobot Nilai
AA	7
A	6
BB	5
B	4
CC	3
C	2
D	1

Berdasarkan tabel diatas maka capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2021 dengan target Nilai CC dan terealisasi Nilai CC dihitung secara kuantitatif sebagai berikut:

$$\textit{Capaian kinerja} = \frac{\textit{Bobot Nilai Realisasi}}{\textit{Bobot Nilai Target}} x\ 100$$

$$= \frac{C}{C} x\ 100$$

$$= \frac{3}{3} x\ 100$$

$$= 100$$

Berdasarkan penghitungan nilai dan bobot akuntabilitas kinerja pemerintah menggunakan metode kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 100%.

Capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ditargetkan predikat nilai CC dan terealisasi predikat nilai CC dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 mencapai target yang sama dengan capaian tahun sebelumnya dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 100%.

Tren realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa periode tahun 2017-2019 mencapai predikat nilai C sedangkan pada periode tahun 2020-2021 mengalamim peningkatan mencapai predikat nilai CC.

Gambar 2.10
Tren Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021 dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Kementerian PAN-RB Republik Indonesia, 2017-2021.

Realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 predikat nilai CC jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 predikat nilai A, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 50% dan masih terdapat gap sebesar 50%, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target akhir RPJMD.

2) Indeks Refromasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima***" melalui upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Rote Ndao;
3) Dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan SAKIP.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi;
2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola SAKIP dan Reformasi Birokrasi;
3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang berbasis teknologi informasi; dan
4) Masih terbatasnya anggaran pendukung penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi dalam penyelenggaraan SAKIP dan PMRB;
2) Peningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur penyelenggara SAKIP dan Reformasi Birokrasi;
3) Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi; dan
4) Peningkatan anggaran pendukung penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.654.815.580,- (*enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.651.213.636,- (*enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) atau sebesar 99,45%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.29
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
50,00	**99,45**	**0,55**	**Efisien**	**0,50**	**Kurang Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif, namun realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,55% atau dikategorikan Efisien.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran.

Evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021 akan diuraikan berdasarkan misi sebagai berikut:

MISI 1

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Bidang pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar dalam upaya penurunan kemiskinan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting bagi masyarakat termasuk penerapan program wajib belajar. Hal ini relevan dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari kesenjangan serta mengacu pada salah satu tujuan SDGs yaitu mengenai pendidikan berkualitas pada tujuan *goal* ke-4 serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang didukung oleh masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur, tenaga, anggaran dan program yang tepat dan memadai.

Peningkatan pembangunan bidang pendidikan merupakan prioritas Kebijakan urusan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia potensial dan kompetitif. Prioritas permasalahan yang harus diperbaiki saat ini adalah bagaimana meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat. HLS merupakan lamanya sekolah yang dihitung dalam tahun yang diharapkan ditempuh seseorang pada umur yang ditentukan. HLS digunakan untuk memantau tingkat pembangunan sistem pendidikan yang diterapkan di berbagai jenjang dihitung mulai pada usia tujuh tahun. Pemilihan umur tujuh tahun didasarkan pada program wajib belajar yang penyelenggaraannya diatur oleh pemerintah.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,18	14,11	13,19	93,48	15,00	100,08	87,93
Capaian Kinerja Sasaran						**93,48**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 93,48%, sehingga capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Kualitas Pendidikan** tahun 2021 sebesar **93,48%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Harapan Lama Sekolah ditargetkan sebesar 14,11 tahun dan terealisasi sebesar 13,19 tahun dengan capaian kinerja sebesar 93,48%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 0,01 tahun dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 100,08%.

Tren realisasi Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan peningkatan kinerja yaitu sejak tahun 2017 Cakupan Kualitas Infrastruktur Kabupaten Rote Ndao terus bertumbuh sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 menghadapi tantangan dengan terbatasnya ruang gerak aktivitas penyelenggaraan pendidikan akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.11
Tren Capaian Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

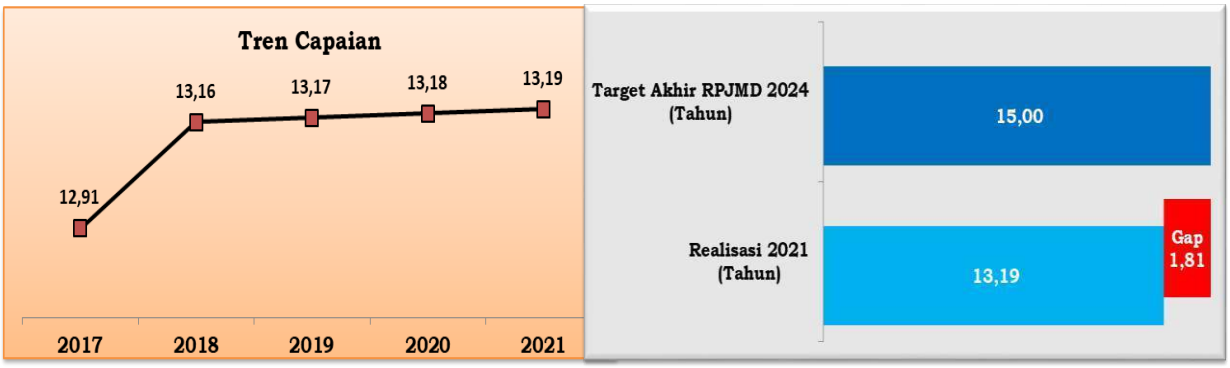

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao, Tahun 2022.

Realisasi indikator kinerja Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 13,19 tahun jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 15 tahun, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 87,93% dan masih terdapat gap sebesar 1,81 tahun (12,07%),

sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing**" melalui upaya-upaya strategis peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao; dan
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao;
3) Adanya dukungan dana dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Rote Ndao.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; dan
3) Perkembangan Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas (mutu), relevansi dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada;
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
3) Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.48.768.171.802,- (*empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam*

puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.47.975.366.173,51 (*empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen*) atau sebesar 98,37%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.31
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
93,48	**98,37**	**1,63**	**Efisien**	**0,95**	**Kurang Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif, namun realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,63% atau dikategorikan Efisien.

MISI 1

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan dapat didefenisikan sebagai keadaan dimana seseorang menjadi sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna menurunkan kasus angka kematian ibu. Selain itu, percepatan

penanganan dan penurunan angka Stunting ini harus segera dilakukan agar tidak terjadi putusnya generasi penerus pembangunan yang cerdas dan kreatif.

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Kasus Kematian Ibu	Kasus	5,00	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.	Prevalensi Stunting	%	25,83	23,48	23,48	100,00	16,00	109,10	53,25
Capaian Kinerja Sasaran						**100,00**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Kasus Kematian Ibu dan Prevalensi Stunting di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** tahun 2021 sebesar **100%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Kasus Kematian Ibu

Kasus Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan (nifas) disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah kasus kematian ibu tahun 2021 di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 10 (sepuluh) kasus.

Capaian kinerja Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Kasus Kematian Ibu ditargetkan sebesar 10 (sepuluh) kasus dan terealisasi sebesar 10 (sepuluh) kasus dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebanyak 10 (sepuluh) kasus dari capaian tahun 2020.

Gambar 2.12
Tren Capaian Kasus Kematian Ibu
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2022.

Tren realisasi Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukan terjadi peningkatan kinerja karena kasus kematian ibu dan bayi masih meningkat setiap tahunnya namun keadaan tersebut tidak melampaui target kinerja tahunan. Realisasi indikator kinerja Kasus Kematian Ibu dan di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 10 (sepuluh) kasus belum mencapai target akhir RPJMD tahun 2024 yaitu sebanyak 0 kasus, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja guna menurunkan kasus kematian ibu agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

2) Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Stunting merupakan masalah gizi yang serius dimana faktor penyebab anak mengalami stunting adalah karena Perilaku (pola asuh, pola makan), Lingkungan (sanitasi/air bersih) dan Pelayanan Kesehatan. Balita Stunting adalah Jumlah anak balita usia 0-59 bulan dengan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya, diukur pada kurun waktu tertentu. Prevalensi balita stunting dihitung berdasarkan jumlah balita stunting dibagi dengan jumlah total balita yang diukur disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 100%.

Prevalensi stunting merupakan perbandingan jumlah balita stunting dengan seluruh balita yang dilakukan pengukuran di Kabupaten Rote Ndao. Menurut standar WHO, suatu wilayah

dikatakan mengalami masalah gizi kronis bila prevalensi bayi *stunting* sama/lebih dari 20% atau balita kurus di atas 5%.

Kemiskinan, pola makan, pola asuh, sanitasi dan rendahnya pengetahuan orang tua terhadap kesehatan anak menjadi faktor penting terhadap tingginya prevalensi balita *stunting* (tinggi anak di bawah standar menurut usianya/kerdil) di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan banyak anak Indonesia yang mengalami masalah asupan gizi sejak masih berupa janin hingga berusia 24 bulan (1.000 hari pertama).

Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 berdasarkan data hasil pengukuran dan penimbangan di Posyandu yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan dan 12 (dua belas) wilayah kerja Puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Distibusi Data Balita Stunting menurut Puskesmas di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

NO	Nama Puskesmas	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	%
1	Eahun	1330	270	20.30
2	Sotimori	521	187	35.89
3	Sonimanu	490	126	25.71
4	Korbafo	719	124	17.25
5	Feapopi	690	138	20.00
6	Ba'a	2569	379	14.75
7	Oele	522	106	20.31
8	Busalangga	1508	399	26.46
9	Oelaba	1217	487	40.02
10	Batutua	2388	611	25.59
11	Delha	985	238	24.16
12	Ndao	276	38	13.77
	Total	**13215**	**3103**	**23.48**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah balita stunting di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 3.103 balita dari 13.215 balita yang ditimbang dan diukur di 406 Posyandu yang tersebar di 119 Desa/Kelurahan dengan Prevalensi Balita Stunting sebesar 23,48%.

Capaian kinerja Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Prevalensi Balita Stunting ditargetkan sebesar 23,48% dan terealisasi sebesar 23,48% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menurun sebesar 2,35% dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja sebesar 109,10%.

Tren realisasi Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan peningkatan kinerja yang konsisten yaitu sejak tahun 2017 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Rote Ndao terus menurun sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 menghadapi tantangan dengan terbatasnya aktivitas pelayanan kesehatan akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.13
Tren Capaian Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 13,19 tahun jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 16%, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 53,25% dan masih terdapat gap prevalensi sebesar 7,48% atau kinerja sebesar 46,75%, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya**

Manusia Yang Berdaya Saing" melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao;
3) Pelaksanaan strategi deteksi dini dalam menekan angka kematian dan salah satu strategi yang telah diterapkan oleh Dinas Kesehatan sampai dengan Puskesmas yakni membuat Link sederhana untuk pengisian form/data ibu dengan nama aplikasi ***" Mama Bo'I Rote "*** yang telah dirilis pada awal tahun 2020, sehingga dapat memantau perkembangan data kehamilan sampai persalinan untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
4) Pelaksanaan gerakan pencegahan Stunting melalui Gerakan RevOlusi TErpadu **(ROTE) CERDAS** yaitu:
   C : Cek kehamilan secara rutin dan bersalin di faslitas kesehatan (revolusi KIA);
   E : Enyahkan asap rokok dan ingat tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri;
   R : Rutin ke Posyandu untuk pantau pertunbuhan dan perkembangan balita;
   D : Dekatkan ibu dan anak pada pangan lokal serta nutrisi yang cukup (gemar makan ikan/revolusi laut);
   A : Ayo imunisasi balita secara lengkap dan selalu gunakan jamban sehat; dan
   S : Selalu beri asi eksklusif.
5) Alokasi anggaran yang memadai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan baik DAK fisik maupun non fisik yang cukup berkontribusi besar dalam mendukung semua program/kegiatan ditingkat Dinas sampai dengan Puskesmas yang juga mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
6) Dukungan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan dari aspek kualitas maupun kuantitas; dan
7) Komitmen pencapaian target berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 273/KEP/HK/2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang mengacu pada Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mewajibkan setiap Kabupaten/Kota melakukan 12 indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan target

wajib 100% sehingga banyak strategi telah dilakukan untuk mendukung SPM Bidang Kesehatan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Belum maksimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap indikator, target serta capaian yang dihasilkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari program–program yang ditetapkan.
2) Belum sistematisnya pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan;
3) Pelaksanaan Program/Kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif karena Pandemi COVID-19 yang tidak diduga sebelumnya yang mengakibatkan pembatasan aktifitas program dan kegiatan seperti operasi timbang di Posyandu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan masyarakat.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan kerja sama lintas sektor untuk kegiatan operasi timbang di setiap posyandu;
2) Perningkatan dukungan Dana Desa untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan;
3) Peningkatan koordinasi dan sosialisasi baik lintas sektor terkait maupun kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mengenai pentingnya gizi balita, optimalkan kegiatan operasi timbang, pelatihan tenaga kesehatan, pelatihan kader untuk pengolahan makan bergizi dan pemberian makanan tambahan dan suplementasi gizi bagi anak;
4) Peningkatan promosi dan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat; dan
5) Peningkatan monitoring program/kegiatan sampai dengan tingkat Puskesmas dan Pustu.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.95.230.623.563,- (*sembilan*

puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.65.830.032.059,- (*enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga puluh dua ribu lima puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 69,13%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.34
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	**69,13**	**30,87**	**Efisien**	**1,45**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 30,87% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 1

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung dari peran serta seluruh

penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Peningkatan perlindungan perempuan dan anak memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Indeks Pembanguan Gender (IPG)	Poin	84,62	92,03	84,08	91,36	93,53	99,36	89,90
2.	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang	80	77	87,00	87	34	91,25	-55,88
Capaian Kinerja Sasaran						**89,19**	**Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,36% dan capaian kinerja Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebesar 87,01%, sehingga capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak** tahun 2021 sebesar **89,19%** atau dikategorikan **"Tinggi"**.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Gender ditargetkan sebesar 92,03 poin dan terealisasi sebesar 84,08 poin dengan capaian kinerja sebesar 91,36%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menurun sebesar 0,54 poin dari capaian tahun 2020 dengan persentase realisasi capaian kinerja sebesar 99,36%.

Tren realisasi Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa periode tahun 2017-2020 terdapat peningkatan kinerja yaitu sejak tahun 2017 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Rote Ndao terus meningkat sampai dengan tahun 2020, namun Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 mengalami penurunan hal ini menghadapi tantangan dengan terbatasnya aktivitas pembangunan gender akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.14
Tren Capaian Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 84,08 poin jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 93,53 poin, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 89,90% dan masih terdapat gap sebesar 9,45 poin (10,10%), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

2) Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan dan anak sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan.

Capaian kinerja Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ditargetkan sebanyak 77 orang dan terealisasi sebanyak 87 orang dengan capaian kinerja sebesar 87,01%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebanyak 7 orang dari capaian tahun 2020 dengan persentase realisasi capaian kinerja sebesar 91,25%.

Tren realisasi Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Rote Ndao selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 belum menunjukan peningkatan kinerja karena jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya.

Gambar 2.15
Tren Capaian Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 87 orang jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebanyak 37 orang, menunjukan bahwa target akhir RPJMD belum tercapai dengan gap prevalensi sebesar +53 poin (orang), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing**" melalui kebijakan strategis meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Rote Ndao;
3) Meningkatnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional perempuan yang menduduki jabatan; dan
4) Meningkatnya sumbangan pendapatan perempuan karena kesadaran perempuan makin meningkat untuk bekerja dan membangun usaha.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Budaya patriarki yang masih kental sehingga belum sepenuhnya perempuan dipercayai untuk berprestasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen/ DPRD; dan
2) Kecenderungan rendahnya kepercayaan diri dan kurangnya persiapan perempuan dalam kontestasi politik.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi program–program pemberdayaan perempuan; dan
2) Penguatan kapasitas perempuan dengan meningkatkan kualitas diri melalui sosialisasi maupun pendidikan dan pelatihan sehingga mampu bersaing dengan laki–laki dalam berbagai lapangan pekerjaan maupun kontestasi politik.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak

Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.369.994.200,- (*tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 349.614.246,- (*tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*) atau sebesar 94,49%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.36
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
89,19	**94,49**	**5,51**	**Efisien**	**0,94**	**Kurang Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif, namun realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 5,51% atau dikategorikan Efisien.

MISI 1

Sasaran 5 : Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Laju pertumbuhan Penduduk	%	3,60	1,50	1,83	78,00	1,50	149,17	78,00
Capaian Kinerja Sasaran						**78,00**	**Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rote Ndao sebesar 78% sehingga capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk** tahun 2021 sebesar **78%** atau dikategorikan **"Tinggi"**.

Capaian kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Laju Pertumbuhan Penduduk ditargetkan sebesar 1,50% dan terealisasi sebesar 1,83% dengan capaian kinerja sebesar 78%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menurun sebesar 1,77% dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja sebesar 149,17%.

Tren realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa sejak tahun 2017 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rote Ndao terus mengalami penurunan, hal ini menunjukan cenderung mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya.

Gambar 2.16
Tren Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 1,83% jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 1,5%, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 78% dan masih terdapat gap laju pertumbuhan penduduk sebesar +0,33% atau kinerja sebesar 22%, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-1 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing**" melalui upaya-upaya pengendalian penduduk;
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Rote Ndao;
3) Dukungan lintas sektoral dalam mensukseskan Program Keluarga Berencana;
4) Adanya dukungan dana yang memadai dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
5) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana sebagai dampak dari intervensi dan penggerakan program Keluarga Berencana.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih rendahnya keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam mengikuti Keluarga Berencana (KB);
2) Pasangan Usia Subur (PUS) yang Keluarga Berencana (KB) sudah memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang; dan
3) Pengaruh adat istiadat yang mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk memiliki anak lebih dari 2 (dua) orang.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program KB (Keluarga Berencana);
2) Peningkatan mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
3) Peningkatan peran kader dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.5.650.206.600,- (*lima miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.5.081.009.934,- (*lima miliar delapan puluh satu juta sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) atau sebesar 89,93%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.38
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
78,00	**89,93**	**10,07**	**Efisien**	**0,87**	**Kurang Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif, namun realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 10,07% atau dikategorikan Efisien.

ISI 2

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan permasalahan sosial klasik yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah berkomitmen untuk terus mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem

- setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*) disebut sebagai Kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Sinergi bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem sangat diperlukan. Kompleksitas budaya dan karakter penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan perlu adanya sentuhan sosial dan pembinaan mental agar mereka nantinya dapat mandiri dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat sehingga tidak terus menerus bergantung dengan bantuan pemerintah.

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Kemiskinan Ekstrem	%	16,14	15,00	15,00	100,00	0	107,06	0
Capaian Kinerja Sasaran						**100,00**	**Sangat Tinggi**		

Sumber : Dinas Sosial Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Kimiskinan Ekstrem di Kabupaten Rote Ndao sebesar 100% sehingga capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Sosial** tahun 2021 sebesar **100%** atau dikategorikan **"Tinggi"**.

Capaian kinerja Kimiskinan Ekstrem di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Kimiskinan Ekstrem ditargetkan sebesar 15% dan terealisasi sebesar 15% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Kimiskinan Ekstrem di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menurun sebesar 1,14% dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja sebesar 107,06%.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-2 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kontribusi Sektor Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**" melalui upaya-upaya pengentasan kemiskinan ekstrem;
2) Efektifitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan untuk menekan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun diantaranya melalui Program Lakamola Anansio, Program Aladin (Atap Lantai dan Dinding), pemberian dana hibah dan berbagai bentuk bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
3) Koordinasi lintas sektoral dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rote Ndao.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1) Belum optimalnya pendataan kemiskinan dengan kebutuhan sektoral yang berbeda-beda;
2) Masih rendahnya peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam penanggulangan kemiskinan; dan
3) Belum efektifnya sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi warga miskin (sandang, pangan dan papan).

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi pendataan kemiskinan melalui Sistem Rote Satu Data;
2) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha untuk terlibat aktif dalam penanggulangan kemiskinan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
3) Peningkatan sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi warga miskin (sandang, pangan dan papan).

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pemberdayaan Sosial , Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.1.219.170.600,- (*satu miliar dua ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 1.122.948.920,- (*satu miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus*

empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 92,11%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.40
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Sosial

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	**92,11**	**7,89**	**Efisien**	**1,09**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 7,89% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 2

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian

Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas perekonomian daerah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, apabila perekonomian daerah tidak stabil akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan memiliki peran yang strategis di sektor perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kinerja perkonomian daerah suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga

tinggi. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus berupaya meningkatkan PDRB khususnya di sektor perdagangan yang memilki prospek potensial untuk dikembangkan. Kontribusi sektor perdagangan sangatlah penting dalam meningkatkan PDRB, dengan meningkatnya aktivitas perdagangan maka dapat berdampak positif terhadap PDRB.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	%	6,67	8,19	6,86	83,76	9,39	102,85	73,06
Capaian Kinerja Sasaran						**83,76**	**Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 83,76%, sehingga capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian** tahun 2021 sebesar **83,76%** atau dikategorikan **"Tinggi"**.

Capaian kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB ditargetkan sebesar 8,19% dan terealisasi sebesar 6,86% dengan capaian kinerja sebesar 83,76%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 2,53% dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 102,85%.

Tren realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa periode tahun 2017-2020 cenderung mengalami penurunan namun mengalami peningkatan pada tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 menghadapi tantangan

dengan terbatasnya aktivitas perdagangan akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.17
Tren Capaian Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021 dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rote Ndao, Tahun 2022.

Realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 6,86% jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 9,39%, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 73,06% dan masih terdapat gap kontribusi sebesar 2,53% (12,07%), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian Dan Perikanan***" melalui upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan; dan
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur bidang perdagangan;
2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan;

3) Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penataan dan pembinaan kepada kelompok pedagang/ usaha informal; dan
4) Adanya Pandemi Covid 19 yang membatasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang perdagangan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Aparatur bidang perdagangan;
2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi dan pengembangan perdagangan, terutama revitalisasi pasar tradisional, sehingga mendorong pertumbuhan produk unggulan lokal;
3) Peningkatan anggaran untuk melaksanakan penataan dan pembinaan kepada kelompok pedagang/usaha informal sehingga cakupan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal bisa senantiasa meningkat; dan
4) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraa program dan kegiatan.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengembangan UMKM, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen , Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.8.418.395.510,- (*delapan miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.8.073.798.400,- (*delapan miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) atau sebesar 95,91%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.42
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam_Stabilitas Perekonomian

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
83,76	**95,91**	**4,09**	**Efisien**	**0,87**	**Kurang Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif, namun realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 4,09% atau dikategorikan Efisien.

MISI 2

Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang dominan dalam pendapatan masyarakat dan memiliki peranan penting di Kabupaten Rote Ndao karena mayoritas penduduk Kabupaten Rote Ndao bekerja adalah petani. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan masih memegang peranan penting dalam struktur ekonomi Kabupaten Rote Ndao dengan kontribusi di atas 47% terhadap PDRB Kabupaten Rote Ndao setiap tahunnya. Prioritas pembangunan daerah menempatkan Sektor Pertanian sebagai salah satu sektor primer kebijakan pembangunan yang merupakan upaya strategis pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.43
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Pangan (Ton)								
		Padi Sawah	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Shorgum	Total
1	Rote Barat Daya	19.491,30	1.560,20	-	156,00	3,60	34,20	51,60	0,60	21.297,50
2	Rote Barat Laut	20.104,80	2.271,00	-	98,90	-	490,20	522,00	6,20	23.493,10
3	Lobalain	22.954,70	2.412,80	-	4,20	-	192,10	-	-	25.563,80
4	Rote Tengah	16.847,20	252,00	-	15,40	13,80	259,90	43,50	-	17.431,80
5	Rote Selatan	1.886,40	1.170,60	-	27,30	6,00	345,00	348,00	-	3.783,30
6	Pantai Baru	11.874,40	1.690,70	-	197,80	9,60	102,60	129,00	-	14.004,10
7	Rote Timur	12.947,40	571,30	-	41,40	16,90	125,40	33,20	1,60	13.737,20
8	Landu Leko	2.599,00	210,00	-	72,60	-	11,40	43,00	-	2.936,00
9	Rote Barat	3.067,20	1.709,10	-	36,00	-	57,00	127,50	1,80	4.998,60
10	Ndao Nuse	15,60	48,30	-	4,20	-	11,20	25,50	-	104,80
JUMLAH		**111.788,00**	**11.896,00**	**-**	**653,80**	**49,90**	**1.629,00**	**1.323,30**	**10,20**	**127.350,20**

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa total produksi tanaman pangan di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 127.350,20 ton, yang terdiri dari Padi Sawah sebanyak 111.788 ton, Jagung sebanyak 11.896 ton, Kacang Tanah sebanyak 653,80 ton, Kacang Hijau sebanyak 49,90 ton, Ubi Kayu sebanyak 1.629 ton, Ubi Jalar sebanyak 1.323,30 dan Shorgum sebanyak 10,20 ton.

Tabel 2.44
Produksi Tanaman Sayur-Sayuran di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Sayur-sayuran (Ton)															
		Bawang Merah	Bawang Putih	Kubis	Petsai/ Sawi	Bayam	Buncis	Cabe Besar	Cabe Rawit	Kacang Panjang	Kangkung	Mentimun	Terung	Tomat	Melon	Semangka	Total
1	Rote Barat Daya	2.361,0	10,3	-	60,0	11,5	-	5,0	115,0	20,0	32,5	14,0	26,0	61,0	-	300,0	3.016,3
2	Rote Barat Laut	750,0	-	18,0	21,5	7,0	12,0	1,5	16,0	22,0	5,0	21,0	15,0	17,8	20,0	75,0	1.001,8
3	Lobalain	1.165,0	-	-	70,3	12,6	-	-	10,0	9,0	60,0	7,5	8,0	19,0	15,0	195,0	1.571,4
4	Rote Tengah	860,0	-	-	66,5	29,5	-	-	18,0	22,3	121,0	43,0	79,5	65,0	-	134,0	1.438,8
5	Rote Selatan	550,0	9,7	-	15,0	3,0	-	-	10,5	10,0	42,0	8,0	10,0	87,5	-	27,0	772,7
6	Pantai Baru	5.742,0	-	-	42,5	59,0	-	-	176,2	105,2	119,0	100,0	117,0	-	-	90,0	6.550,9
7	Rote Timur	7.010,0	-	-	142,5	90,5	-	-	21,0	65,0	328,5	127,5	90,0	90,0	-	121,0	8.086,0
8	Landu Leko	570,0	-	-	11,0	-	-	-	14,0	-	17,6	11,0	-	-	-	-	623,6
9	Rote Barat	405,0	-	-	20,0	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	445,0
10	Ndao Nuse	-	-	-	24,0	-	-	-	12,0	15,0	15,0	-	-	10,5	-	-	76,5
JUMLAH		**19.413,0**	**20,0**	**18,0**	**473,3**	**213,1**	**12,0**	**6,5**	**392,7**	**268,5**	**760,6**	**332,0**	**345,5**	**350,8**	**35,0**	**942,0**	**23.583,0**

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa total produksi tanaman Sayur-Sayuran di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 23.583 ton, yang terdiri dari komoditas Bawang Merah, Bawang Putih, Kubis, Petsai/Sawi, Bayam, Buncis, Cabe Besar, Cabe Rawit, Kacang Panjang, Kangkung, Mentimun, Terung, Tomat, Melon dan Semangka.

Tabel 3.45
Produksi Tanaman Buah-Buahan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Buah (Ton)											
		Alpukat	Belimbing	Jambu Biji	Jambu Air	Jeruk Siam/ Keprok	Jeruk Besar	Mangga	Pisang	Pepaya	Sirsak	Sukun	Nangka	Total
1	Rote Barat Daya	1,00	1,00	-	-	-	-	164,00	974,00	39,00	2,00	-	-	1.181,00
2	Rote Barat Laut	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	150,00	894,00	20,00	1,00	1,00	-	1.070,00
3	Lobalain	13,00	2,00	2,00	-	-	5,00	87,00	715,00	34,00	2,00	14,00	-	874,00
4	Rote Tengah	6,00	-	1,00	-	-	-	5,00	582,00	13,00	-	-	-	607,00
5	Rote Selatan	3,00	1,00	-	1,00	-	2,00	215,00	1.152,00	9,00	2,00	1,00	14,00	1.400,00
6	Pantai Baru	-	4,00	3,00	-	-	-	15,00	441,00	2,00	1,00	2,00	4,00	472,00
7	Rote Timur	-	-	5,00	-	-	3,00	40,00	117,00	50,00	1,00	3,00	-	219,00
8	Landu Leko	-	-	-	-	-	-	1,00	10,00	2,00	-	-	-	13,00
9	Rote Barat	-	-	-	1,00	-	1,00	3,00	8,00	3,00	-	-	1,00	17,00
10	Ndao Nuse	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1,00	-	-	-	4,00
JUMLAH		**24,00**	**9,00**	**12,00**	**2,00**	**1,00**	**11,00**	**680,00**	**4.896,00**	**173,00**	**9,00**	**21,00**	**19,00**	**5.857,00**

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa total produksi Tanaman Buah-Buahan di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 5.857 ton, yang terdiri dari komoditas Alpukat, Belimbing, Jambu Biji, Jambu

Air, Jeruk Siam/Keprok, Jeruk Besar, Mangga, Pisang, Pepaya, Sirsak, Sukun dan Nangka.

Tabel 2.46
Produksi Tanaman Hias di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Hias (Ton)									
		Palem	Aglaonema	Euphobia	Phylodendron	Monstera	Cordyine	Sanseviera	Mawar	Melati	Total
1	Rote Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rote Barat Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lobalain	0,07	0,25	0,03	0,10	0,08	0,30	0,65	10,00	0,10	11,58
4	Rote Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rote Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pantai Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rote Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Landu Leko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Rote Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ndao Nuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**0,07**	**0,25**	**0,03**	**0,1**	**0,08**	**0,30**	**0,65**	**10,00**	**0,10**	**11,58**

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa total produksi Tanaman Hias di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 11,58 ton, yang terdiri dari komoditas Palem, Aglaonema, Euphobia, Phylodendron, Monstera, Cordyine, Sanseviera, Mawar dan Melati.

Tabel 2.47
Produksi Tanaman Obat di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Obat (Ton)				
		Jahe	Laos/ Lengkuas	Kencur	Kunyit	Total
1	Rote Barat Daya	-	-	-	-	-
2	Rote Barat Laut	-	0,02	0,03	-	0,05
3	Lobalain	-	0,10	0,01	0,01	0,12
4	Rote Tengah	-	-	-	-	-
5	Rote Selatan	-	-	-	-	-
6	Pantai Baru	-	-	-	-	-
7	Rote Timur	-	-	-	-	-
8	Landu Leko	0,07	0,06	0,04	0,10	0,27
9	Rote Barat	0,03	0,06	0,02	0,02	0,13
10	Ndao Nuse	-	-	-	-	-
JUMLAH		**0,10**	**0,24**	**0,10**	**0,13**	**0,57**

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa total produksi Tanaman Obat di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 0,57 ton, yang terdiri dari komoditas Jahe, Laos/Lengkuas, Kencur dan Kunyit.

Berdasarkan uraian tabel dan penjelasan diatas, maka total produksi pertanian di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.48
Produksi Pertanian di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Produksi Pertanian	Jumlah (Ton)
Tanaman Pangan	127.350,20
Tanaman Sayuran	23.582,95
Tanaman Buah	5.857,00
Tanaman Hias	11,58
Tanaman Obat	0,57
Total	**156.802,30**

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa total produksi pertanian di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak **156.802,30** ton, yang terdiri dari Tanaman Pangan sebanyak 127.350,20 ton, Tanaman Sayuran sebanyak 23.582,95 ton, Tanaman Buah sebanyak 5.857,00 ton, Tanaman Hias sebanyak 11,58 ton dan Tanaman Obat sebanyak 0,57 ton.

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Produksi Sektor Pertanian	Ton	147.592,00	153.364,00	156.802,30	102,24	157.356,00	106,24	99,65
Capaian Kinerja Sasaran						**102,24**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 102,24%, sehingga capaian kinerja **Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan** tahun 2021 sebesar **102,24%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 melampaui target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Produksi Sektor Pertanian ditargetkan sebesar 153.364,00 ton dan terealisasi sebesar 156.802,30 ton dengan capaian kinerja sebesar 102,24%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 9.210,30 ton dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 106,24%.

Tren realisasi Kontribusi Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa sejak tahun 2017 Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Rote Ndao terus tumbuh sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 Produksi Sektor Pertanian menghadapi tantangan dengan tumbuh melambat akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.18
Tren Capaian Produksi Sektor Pertanian
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

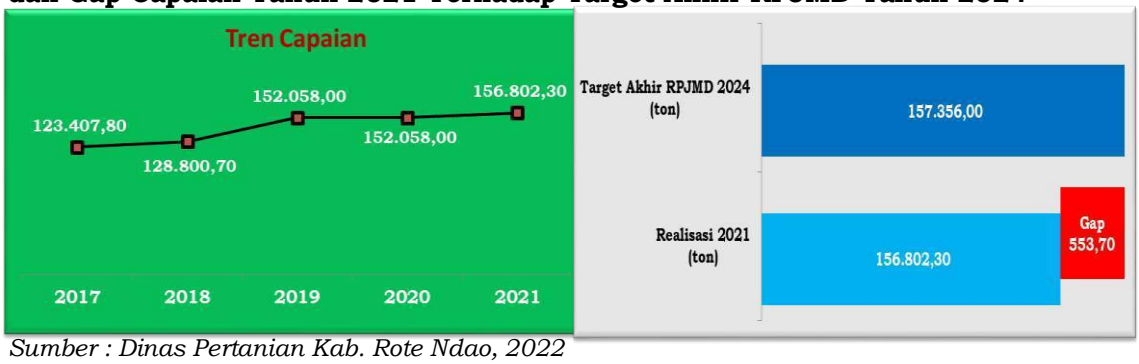

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, 2022

Realisasi indikator kinerja Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 156.802,30 ton jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 157.356,00 ton, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 99,65% dan masih terdapat gap produksi sebesar 553,70 ton (0,35%), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan***" melalui upaya-upaya meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Rote Ndao;
3) Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Rote Ndao seperti bantuan bibit/benih, vaksin, bibit pakan, sarana prasarana dan lainnya; dan
4) Tersedianya sumberdaya petani, peternak dan nelayan yang bersinergi dengan petugas teknis dinas terkait dan tenaga fungisonal lapangan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Belum optimalnya pengembangan pertanian pada lahan kering perlu ditingkatkan agar produksi hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani;
2) Curah hujan yang sangat rendah dan sulit dikendalikan; Rendahnya curah hujan yang mengakibatkan kemarau panjang dengan debit air irigasi yang sangat rendah;
3) Terjadinya alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian;
4) Banyaknya infrastruktur/jaringan irigasi pertanian yang rusak;
5) Makin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian;
6) Masih tingginya susut hasil komoditi pertanian dan Harga jual yang rendah pada saat panen; dan
7) Belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi;

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas perangkat daerah dan instansi lainnya dalam rangka pengembangan lahan kering dan advokasi fungsi lahan pertanian dan sosialisasi dampak alih fungsi lahan petanian;
2) Optimalisasi dan rehabilitasi sumber-sumber air dan infrastruktur/jaringan irigasi pertanian yang rusak;
3) Pembangunan embung untuk menampung air hujan sehingga pada musim kemarau kelangkaan air dapat dikurangi;
4) Penyediaan upah tenaga kerja pertanian melalui optimalisasi anggaran;

5) Pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian, pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi; dan
6) Penanganan pasca panen yang baik untuk meminimalkan susut hasil komoditi pertanian dan Peningkatan peran BULOG untuk bekerja sama dengan Kelompok Tani/Gapoktan untuk menampung gabah/beras dari petani.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian , Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.4.710.613.850,- (*empat miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tigas belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.4.510.637.763,- (*empat miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*) atau sebesar 95,75%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.50
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
102,24	**95,75**	**4,25**	**Efisien**	**1,07**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 4,25% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 2		
Sasaran 4	**:**	**Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah**

Dalam perekonomian Daerah, pariwisata merupakan sektor yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan melalui penerimaan daerah. Dengan mengacu pada maka Visi Kabupaten Rote Ndao : **"Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan"**. Pariwisata merupakan *leading sector* pembangunan yang sangat potensial di Kabupaten Rote Ndao untuk dikembangkan dan diperkenalkan baik dalam dan luar negeri. Banyak obyek wisata yang telah dikembangkan dan dikunjungi wisatawan dengan keragaman daya tariknya.

Tabel 2.51
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisata
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2021

Kunjugan Wisatawan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Manca Negara	1.585	1.801	2.507	96	51
Nusantara	1.525	2.060	2.481	3.510	7.449
Jumlah	**3.110**	**3.861**	**4.988**	**3.606**	**7.500**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao, 2021-2022.

Tabel diatas menunjukan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Rote Ndao terus meningkat tiap tahunnya dan ditargetkan meningkat signifikan pada tahun 2020 namun akibat Pandemik COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao juga terkena dampak kunjungan wisata baik nusantara maupun manca Negara.

Tabel 2.52
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	Bulan	Wisatawan Mancanegara			Wisatawan Domestik			Total (Wisman + Domestik)
		Laki-Laki	Perempuan	Jlh	Laki-Laki	Perempuan	Jlh	
1	Januari	1		1	22	14	36	37
2	Februari	-		0	60	77	137	137
3	Maret	8	9	17	874	177	1051	1068
4	April	-	2	2	464	163	627	629
5	Mei	5	4	9	537	252	789	798
6	Juni	12	3	15	782	262	1044	1059
7	Juli	1	3	4	543	168	711	715
8	Agustus	-		0	412	204	616	616
9	September	1		1	427	208	635	636
10	Oktober	1	1	2	467	227	694	696
11	November	-		0	319	194	513	513
12	Desember	-		0	369	227	596	596
Jumlah		**29**	**22**	**51**	**5.276**	**2.173**	**7.449**	**7.500**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao, 2022.

Pada tahun 2021 jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 7.500 orang (wisatawan) terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 51 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 7.449 orang. Jumlah kunjungan wisatawan tertinggi pada bulan Maret dan bulan Juni tahun 2021.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	3.606	9.000	7.500	83,33	30.000	207,99	25,00
Capaian Kinerja Sasaran						**83,33**	**Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 83,33%, sehingga capaian kinerja **Meningkatnya Peran**

Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah tahun 2021 sebesar **83,33%** atau dikategorikan **"Tinggi"**.

Capaian kinerja Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Jumlah Kunjungan Wisata ditargetkan sebanyak 9.000 orang dan terealisasi sebanyak 7.500 orang dengan capaian kinerja sebesar 83,33%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebanyak 3.894 orang dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 207,99%.

Tren realisasi Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa sejak tahun 2017 Jumlah Kunjungan Wisata terus meningkat sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020 Sektor Pariwisata menghadapi tantangan dengan kunjungan wisata yang menurun akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.19
Tren Capaian Jumlah Kunjungan Wisata
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao, 2022.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 7.500 orang jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebanyak 30.000 orang, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 25% dan masih terdapat gap sebesar 22.500 orang (75%), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen yang kuat Pemerintah Kanupaten Rote Ndao melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sektor Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian Dan Perikanan**";
2) Potensi Alam Kabupaten Rote Ndao; alam merupakan salah satu faktor pendorong seorang melakukan perjalanan wisata karena ada orang berwisata hanya sekedar menikmati keindahan alam, ketenangan alam, serta ingin menikmati keaslian fisik flora dan faunanya;
3) Potensi Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao; dalam arti luas bukan hanya meliputi seperti kesenian atau kehidupan kerajinan dan lain-lain. Akan tetapi meliputi adat istiadat yang ada dan segala kebiasaan yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan pengunjung bisa tertahan dan dapat menghabiskan waktu di tengah-tengah masyarakat dengan kebudayaannya yang dianggap menarik; dan
4) Adanya dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka penataan pariwisata dan pelayanan bidang kepariwisataan di Kabupaten Rote Ndao.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Belum optimalnya promosi, informasi dan pemasaran pariwisata yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri;
2) Belum optimalnya penyelenggaraan event pariwisata yang dilaksanakan secara periodik yang dikemas dalam atraksi yang menarik dan atraktif serta berskala luas yang mampu menarik wisatawan berkunjung;
3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata;
4) Masíh rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata lainnya;
5) Belum maksimalnya kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat; dan

6) Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimanaditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan promosi, informasi dan penyelenggaraan event pariwisata, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata;
2) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan obyek dan daya tarik wisata untuk menarik wisatawan; dan
3) Melakukan kolaborasi dan sinergitas antar pelaku bidang pariwisata dari hulu hingga hilir serta meningkatkan peran pemerintah dalam pembinaan kelompok sadar wisata, pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku pariwisata lainnya.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.905.279.870,- (*sembilan ratus lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 899.256.476,- (*delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*) atau sebesar 99,33%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.54
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
83,33	**99,33**	**0,67**	**Efisien**	**0,84**	**Kurang Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa meskipun rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif, namun realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 4,25% atau dikategorikan Efisien.

MISI 2

Sasaran 5 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi. Saat ini, skor PPH telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dibidang ketahanan pangan Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Terkait dengan hal tersebut, pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik ditingkat pusat dan di daerah, sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2012 tersebut. Untuk memudahkan pengukuran Skor PPH baik di pusat maupun di daerah, maka perlu disusun panduan penghitungan Skor PPH.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	83,60	67,30	76,90	114,26	100,00	91,99	76,90
Capaian Kinerja Sasaran						**114,26**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 114,26%, sehingga capaian kinerja **Meningkatnya Ketahanan Pangan** tahun 2021 sebesar **114,26%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 67,30% dan terealisasi sebesar 76,90% dengan capaian kinerja sebesar 114,26%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menurun sebesar 6,70% dari capaian tahun 2020 dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 91,99%.

Gambar 2.20
Tren Capaian Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

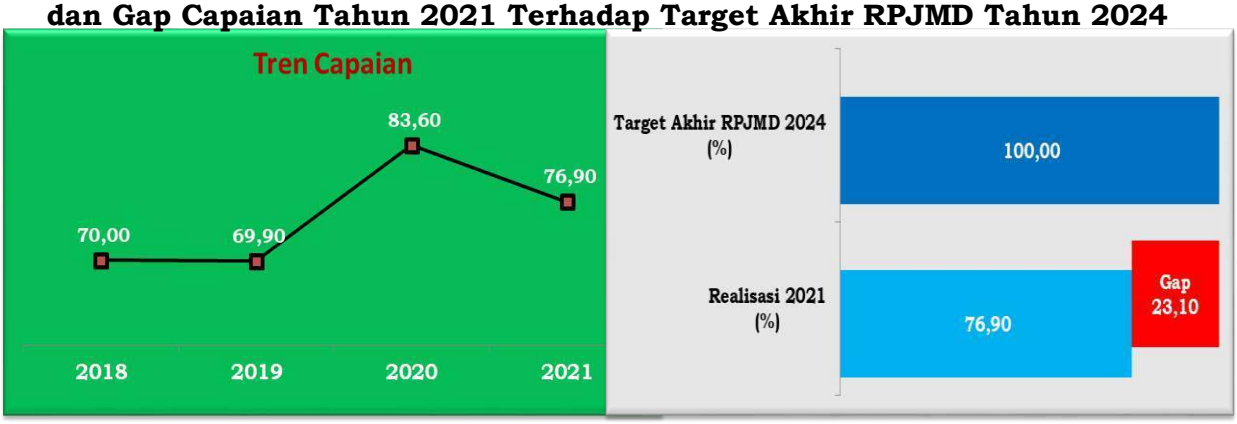

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Rote Ndao, 2022.

Tren realisasi Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Rote Ndao selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukan masih fluktuatif capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diatas 50%. Selain itu, Realisasi indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 76,90% jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100%, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 76,90% dan masih terdapat gap sebesar 23,10%, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-2 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing**" melalui kebijakan strategis peningkatan ketahanan pangan daerah;
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan di Kabupaten Rote Ndao; dan
3) Dukungan lintas sektoral dalam mensukseskan peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1) Belum optimalnya pengembangan pertanian pada lahan kering perlu di tingkatkan agar produksi hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pendapatan petani;

2) Sulitnya mengubah pola konsumsi masyarakat, dari beras ke non beras;
3) Belum optimalnya upaya-upaya pengamanan pangan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam rangka pengembangan lahan kering;
2) Kampanye dan sosialisasi tentang diversifikasi pangan secara lebih intensif; dan
3) Optimalisasi upaya-upaya pengamanan pangan seperti uji kandungan gizi pangan.

Program-program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.520.911.800,- (*lima ratus dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.508.673.421,- (*lima ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*) atau sebesar 97,65%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.56
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
114,26	**97,65**	**2,35**	**Efisien**	**1,17**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 2,35% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 3

Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas

Salah satu faktor kunci dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi geografis adalah aksesibilitas wilayah yang melahirkan ekonomi mudah, murah dan cepat. Konektivitas antarwilayah ditingkatkan dengan cara pembangunan insfrastruktur. pembangunan infrastruktur mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mengakselerasi perekonomian rakyat.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao giat membangun jalan sehingga membuka konektivitas antar wilayah/daerah. Dampak konektivitas tersebut memberikan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Konektivitas antarwilayah tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah dalam Daerah Kabupaten, tetapi secara aktif mempersatukan dan membangun kesejahteraan rakyat. Konektivitas wilayah sebagai urat nadi pembangunan ekonomi daerah makin meningkat apabila di dukung dengan lancarnya akses masuk dan keluar ke Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Konektivitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	43,48	47,42	47,02	99,16	60,46	108,14	77,77
Capaian Kinerja Sasaran						**99,16**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 99,16%, sehingga capaian

kinerja **Meningkatnya Konektivitas** tahun 2021 sebesar **99,16%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 47,42% dan terealisasi sebesar 47,02% dengan capaian kinerja sebesar 99,16%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 3,54% dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 108,14%.

Tren realisasi Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Rote Ndao selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukan bahwa sejak tahun 2016 Jumlah Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik terus meningkat secara konsisten sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 pembangunan Sektor Infrastruktur menghadapi tantangan akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.21
Tren Capaian Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2021 dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 47,02% jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 60,46%, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 77,77% dan masih terdapat gap proporsi sebesar 13,44% atau kinerja sebesar 22,23%, sehingga upaya strategis akan

dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**" melalui upaya-upaya peningkatan kualitas infrastruktur;
2) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi jalan dan jembatan di wilayah selesai tepat waktu;
3) Adanya pemeliharaan dan penambahan perlengkapan jalan dan jembatan secara bertahap serta peningkatan dari sisi teknologi;
4) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan program kebinamargaan; dan
5) Tersedianya anggaran yang cukup guna pemeliharaan dan penambahan perlengkapan jalan dan jembatan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih terdapat beberapa ruas jalan kabupaten yang perlu peningkatan dan pemeliharaan secara berkala dan kontinyu untuk menjaga kondisi jalan selalu dalam kondisi baik;
2) Rawannya kerusakan jalan akibat bencana alam, khususnya pada musim penghujan;
3) Masih kurangnya Peralatan penunjang pendukung bidang pekerjaan umum, seperti alat berat dan peralatan uji kebinamargaan; dan
4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan jalan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut:

1) Penyediaan anggaran secara kontinyu bagi pemeliharaan infrastruktur jalan dan saluran drainase untuk menjaga selalu dalam kondisi baik;
2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam yang berdampak pada kerusakan jalan dan jembatan;

3) Peningkatan anggaran untuk pengadaan alat berat dan peralatan uji kebinamargaan; dan
4) Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan jalan.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Penyelenggaraan Jalan, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.44.240.561.560,- (*empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.41.015.393.178,- (*empat puluh satu miliar lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau sebesar 92,71%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.58
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Konektivitas

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
99,16	**92,71**	**7,29**	**Efisien**	**1,07**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 7,29% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 3		
Sasaran 2	**:**	**Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air**

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang vital baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan.

Irigasi merupakan sumber daya air sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian yang tinggi. PengeIoIaan jaringan irigasi yang dalam kondisi baik akan menjamin adanya peIayanan air yang baik bagi petani dan meemberikan manfaat bagi petani berupa tingkat produksi dan tingkat pendapatan masyarakat yang makin meningkat.

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Rasio Jaringan Irigasi	%	60,19	62,97	63,75	101,24	69,76	105,91	91,38
Capaian Kinerja Sasaran						**101,24**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 101,24%, sehingga capaian kinerja **Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air** tahun 2021 sebesar **101,24%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Rasio Jaringan Irigasi ditargetkan sebesar 62,97% dan terealisasi sebesar 63,75% dengan capaian kinerja sebesar 101,24%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 3,56% dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 105,91%.

Tren realisasi Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Rote Ndao selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukan bahwa sejak tahun 2016 Rasio Jaringan Irigasi terus meningkat secara konsisten sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 pembangunan jaringan irigasi menghadapi tantangan akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.22
Tren Capaian Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

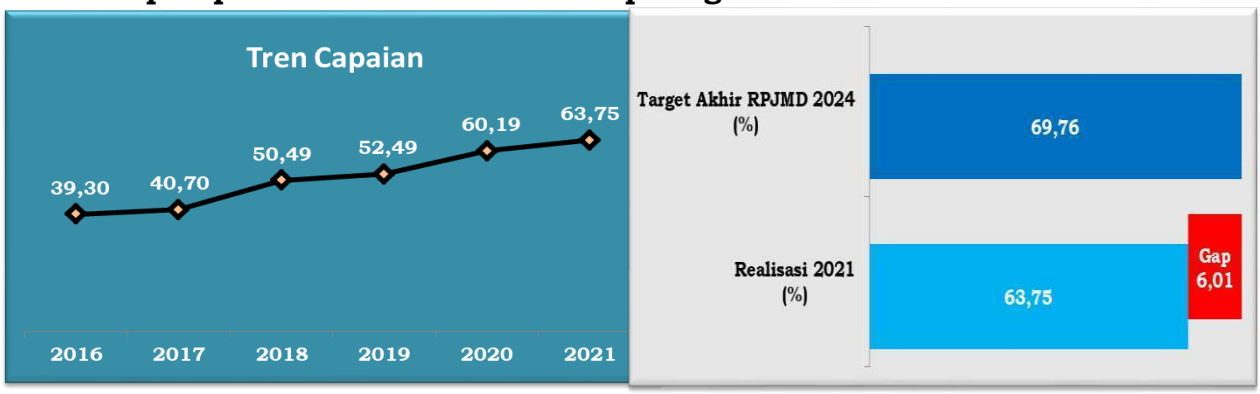

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 63,75% jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 69,75%, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 77,77% dan masih terdapat gap rasio sebesar 6,01% atau kinerja sebesar 8,62%, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat melalui kebijakan strategis dalam mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**" melalui upaya-upaya peningkatan rasio jaringan irigasi;
2) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pengerjaan konstruksi jaringan irigasi selesai tepat waktu;
3) Adanya pemeliharaan dan jaringan irigasi secara bertahap serta peningkatan dari sisi teknologi;
4) Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam melaksanakan program ciptakarya; dan
5) Tersedianya anggaran yang cukup guna pemeliharaan dan penambahan jaringan irigasi.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1) Masih terdapat beberapa titik jaringan irigasi yang perlu peningkatan dan pemeliharaan secara berkala dan kontinyu untuk menjaga jaringan irigasi selalu dalam kondisi baik;
2) Rawannya kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam, khususnya pada musim penghujan;
3) Masih kurangnya peralatan penunjang pendukung bidang ciptakarya; dan
4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut:

1) Penyediaan anggaran secara kontinyu bagi pemeliharaan jaringan irigasi dan saluran drainase untuk menjaga selalu dalam kondisi baik; dan
2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam;
3) Peningkatan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasaran ciptakarya; dan
4) Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.19.154.421.840,- (*sembilan belas miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.18.369.191.450,- (*delapan belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 95,90%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.60
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
101,24	**95,90**	**4,10**	**Efisien**	**1,06**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 4,10% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 3

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan permukiman sendiri adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.

Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan dasar, berupa peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Sejalan dengan itu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan berupa stimulah pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni atau disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Berdasarkan UUD 1945 sesuai pasal 5 ayat (2), karena itulah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Dasar.

Pada tahun 2020 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rote Ndao telah tercapai sebanyak 4.262 unit dan pada pada tahun 2021 bertambah menjadi 5.602 unit karena terdapat penambahan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.340 unit pada tahun 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 302 unit, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 74 unit, APBN/BSPS sebanyak 99 unit dan Dana Desa/Kelurahan sebanyak 865 unit.

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	4.262	5.589	5.602	100,23	11.264	131,44	49,73
Capaian Kinerja Sasaran						**100,23**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 100,23%, sehingga capaian kinerja **Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman** tahun 2021 sebesar **100,23%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 melampaui target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ditargetkan sebanyak 5.589 unit dan terealisasi sebanyak 5.602 unit dengan capaian kinerja sebesar 100,23%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rote Ndao di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebanyak 1.340 unit dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 131,44%.

Tren realisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rote Ndao selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan bahwa sejak tahun 2019 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni terus meningkat secara konsisten sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni menghadapi tantangan akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.23
Tren Capaian Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 5.602 unit jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebanyak 11.264 unit, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 49,73% dan masih terdapat gap 5.662 unit (50,27%), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**" melalui upaya-upaya peningkatan bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni melalui Program ALADIN (Atap, Lantai dan Ubin) dan melalui intervensi Dana Desa/Kelurahan; dan
2) Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Rote Ndao derta Dana Desa dalam rangka Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni melalui Dana APBD/DAU, APBN/DAK dan Dana Desa.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala yaitu Rendahnya kemampuan masyarakat dalam swadaya pembangunan rumah layak huni sehingga masih terdapat banyak rumah tidak layak huni di pedesaan. Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka langkah yang akan ditempuh yaitu Peningkatan program bantuan stimulan perumahan swadaya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Kawasan Permukiman, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.11.637.870.708,- (*sebelas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah*) dan terealisasi sebesar 100%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.62
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,23	**100,00**	**0,00**	**Efisien**	**1,00**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 0% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio 1,00 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 3

Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan, dan penataan lingkungan hidup.

Tabel 2.63.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	%	46,62	24,00	54,73	228,04	30,00	117,40	182,43
2.	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	460.662	460.662	460.662	100	460.662	100,00	100,00
Capaian Kinerja Sasaran						**164,02**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Meningkatnya Pengelolaan Sampah sebesar 228,04% sedangkan capaian kinerja Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 100%, sehingga capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan** tahun 2021 sebesar **164,02%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan saat ini masih dilakukan dengan sistem "Open dumping" dan belum menerapkan teknik 3R (*reduce, reuse, recycle*). Kinerja pengelolaan persampahan sampai saat ini masih sebatas pengangkutan sampah dari sumber sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tabel 2.64
Cakupan Pengelolaan Sampah
Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Total Timbulan Sampah (M3)	36278	13797	13244
Volume Timbulan Sampah Yang Ditangani (M3)	4708	6432	7248
Cakupan Pengelolaan Sampah (%)	36,50	46,62	54,73

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao, 2022

Total produksi sampah di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebanyak 36.278 M^3 dengan kapasitas angkut timbunan sampah yang ditangani Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 4.708 M^3 atau sebesar 36,50%. Total produksi sampah tahun 2020 adalah sebanyak 13.797 M^3 dengan kapasitas angkut timbunan sampah yang ditangani Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 6.432 M^3 atau sebesar 46,62%. Total produksi sampah tahun 2021 adalah sebanyak 13.244 M^3 dengan kapasitas angkut timbunan sampah yang ditangani Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 7.248 M^3 atau sebesar 54,73%.

Capaian kinerja Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 melampaui target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Meningkatnya Pengelolaan Sampah ditargetkan sebesar 24,00% dan terealisasi sebesar 54,73% dengan capaian kinerja sebesar 228,04%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rote Ndao di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 8,11% dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 117,40%.

Tren realisasi Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rote Ndao selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukan bahwa sejak tahun 2018 Meningkatnya Pengelolaan Sampah terus meningkat secara konsisten sampai dengan tahun 2021, meskipun pada tahun 2020-2021 pelaksanaan pelayanan pengelolaan persampahan menghadapi tantangan akibat PandemiCOVID-19 yang melanda dunia secara global termasuk di Kabupaten Rote Ndao.

Gambar 2.24
Tren Capaian Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 54,73% jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 30%, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah terlampaui dan terjadi capaian over target peningkatan pengelolaan sampah sebesar 24,73% dengan kinerja sebesar 182,43% sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja dan tren realisasi kinerja menunjukan optimis pencapaian target akhir RPJMD.

2) Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca adalah jumlah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca yaitu CH4, CO2 dan lain-lain. Gas rumah kaca merupakan gas yang berada di atmosfer dan biasanya bisa muncul secara alami di lingkungan dan ada juga yang timbul akibat aktivitas manusia yang terlalu banyak. Contohnya hasil emisi dari kendaraan yang dipakai oleh manusia juga bisa meningkatkan kadar karbon di udara, pembakaran sampah, pembakaran ladang, karhutla, operasional industri (pabrik, PLTD, PLTM dan lain-lain).

Alur Perhitungan Emisi gas rumah kaca dimulai dengan penetapan baseline, pengumpulan data dan perhitungan reduksi (mitigasi) meliputi beberapa sektor antar lain: energi, kehutanan, pertanian dan limbah. Penetapan Baseline juga harus memperhitungkan kemungkinan sumber karbon yang akan timbul berdasarkan data aktivitas pada daerah/ wilayah yang akan dijadikan objek perhitungan (Kabupaten), demikian juga dengan perhitungan reduksi (mitigasi).

Pada tahun 2021 belum dilakukan pengukuran sehingga capaian kinerja Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Rote Ndao yang ditargetkan sebesar 460,662 tCO2eq dan realisasinya merujuk data capaian tahun 2020 sebesar 460,662 tCO2eq dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang**

Berkelanjutan" melalui upaya-upaya pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup;

2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Rote Ndao; dan
3) Adanya dukungan dana dan tenaga kebersihan, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan khususnya daerah kota Ba'a.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan sehingga masih ditemukan banyak sampah yang dibuang sungai/kali maupun selokan;
2) Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan sampah;
3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana operasional pengelolaan persampahan seperti TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya di wilayah kota Ba'a;
4) Belum adanya koordinasi yang efektif lintas sektor terkait dalam rangka informasi dan data untuk perhitungan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Rote Ndao;
5) Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung mitigasi (reduksi) Gas Rumah Kaca (GRK) pada setiap sektor; dan
6) Belum adanya sarana dan prasarana pendukung dalam mengukur Emisi Baseline GRK untuk tiap sektor.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan melalui sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan lingkungan;
2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat dalam Kegiatan Jumat Bersih; dan
3) Pembangunan TPS Sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*), Penataan TPA, pengadaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan persampahan;
4) Perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan yang mendukung penurunan emisi gas rumah kaca;

5) Peningkatan koordinasi yang efektif lintas sektor terkait dalam rangka informasi dan data untuk perhitungan emisi gas rumah kaca.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.1.001.940.900,- (*satu miliar satu juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.944.775.100,- (*sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah*) atau sebesar 94,29%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.65
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
164,02	**94,29**	**5,71**	**Efisien**	**1,74**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 5,71% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 3		
Sasaran 5	**:**	**Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Ruang adalah wadah secara keseluruhan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, dengan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.

Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan

Kebijakan daerah dalam penataan ruang Kabupaten Rote Ndao tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 yang bertujuan mewujudkan tertib penataan ruang yang berkelanjutan yang dilakukan melalui penataan kembali tata ruang wilayah ke dalam unit-unit operasional yang tepat dari sisi ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara.

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan perbandingan realisasi RTRW dengan rencana peruntukan wilayah di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.66
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW

Indikator	Persentase
Realisasi RTRW	96,80
Rencana Peruntukan RTRW	100,00
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	**96,80**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

Pada tahun 2021, perbandingan atas realisasi RTRW dan rencana peruntukannya dengan Rasio Ketaatan Terhadap RTRW yaitu 96,80%. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran seluruh stakeholder di Kabupaten Rote Ndao dalam mengikuti prosedur pembangunan bangunan baik untuk rumah tinggal maupun untuk tempat usaha.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	96,80	97,02	96,80	99,77	97,05	100,00	99,74
Capaian Kinerja Sasaran						**99,77**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 99,77%, sehingga capaian kinerja **Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang** tahun 2021 sebesar **99,77%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Perbaikan Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Ketaatan terhadap RTRW ditargetkan sebesar 97,02% dan terealisasi sebesar 96,80% dengan capaian kinerja sebesar 99,77%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menghasilkan capaian kinerja yang sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 96,80% dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 100%.

Tren realisasi Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menghasilkan capaian kinerja yang sama setiap tahunnya yaitu sebesar 96,80%.

Gambar 2.25
Tren Capaian Ketaatan terhadap RTRW
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 96,80% jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 97,05%, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 99,74% dan masih terdapat gap 0,25% atau presentase kinerja sebesar 0,26%, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**", melalui upaya-upaya strategis untuk Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
2) Adanya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam penerbitan perizinan pemanfaatan ruang serta meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui pelibatan peran masyarakat dalam penataan ruang dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur dibidang penataan ruang; dan
2) Masih terbatasnya pembiayaan dan sarana prasarana dibidang penataan ruang.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi dibidang penataan ruang; dan
2) Peningkatan pembiayaan dan sarana prasarana dibidang penataan ruang.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.32.832.000,- (*tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.24.010.000,- (*dua puluh empat juta sepuluh ribu rupiah*) atau sebesar 73,13%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.68
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
99,77	**73,13**	**26,87**	**Efisien**	**1,36**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 26,87% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 3
Sasaran 6 : Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah

Ketangguhan bencana daerah merupakan kemampuan daerah dalam mengantisipasi, mengatasi, dan melakukan pemulihan, sehingga menjadi keadaan yang normal dan baik kembali. Ketangguhan menghadapi bencana ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana (PRB), dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi, dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Arah pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Rote Ndao meningkatkan kapasitas dan kemampuan desa secara mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana melalui pemberdayaan relawan bencana. Sampai dengan pada tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) desa yang memiliki relawan bencana dan diberdayakan yaitu Desa Lifuleo, Desa Batefalu, Desa Batulilok, Desa Maubesi, Desa Inaoe, Desa Oeseli, Desa Oelaba, Desa Mbueain, Desa Nuse dan Desa Oelunggu.

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Desa Tangguh Bencana	Desa	10	10	10	100,00	30	100,00	33,33
Capaian Kinerja Sasaran						**100,00**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja **Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah** tahun 2021 sebesar **100%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Desa Tangguh Bencana ditargetkan sebanyak 10 (sepuluh) desa dan terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) desa dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menghasilkan capaian kinerja yang sama dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) desa dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 100%.

Tren realisasi Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menghasilkan capaian kinerja yang sama setiap tahunnya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) desa.

Gambar 2.26
Tren Capaian Desa Tangguh Bencana
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) desa jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) desa, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 33,33% dan masih terdapat gap sebanyak 20 (dua puluh) desa (66,67%), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar target akhir RPJMD dapat tercapai.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-3 Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**", melalui upaya-upaya strategis peningkatan ketangguhan bencana daerah;
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam meeningkatkan ketangguhan bencana daerah; dan
3) Optimalisasi sumber daya sarana dan prasarana pendukung.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi teknis bidang kebencanaan;
2) Belum tersedianya anggaran pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana (Destana); dan
3) Masih terbatasnya sarana prasarana dibidang kebencanaan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi teknis bidang kebencanaan; dan
2) Peningkatan pembiayaan dan sarana prasarana dibidang kebencanaan.

MISI 4

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan

keuangan pemerintah memuat opini, sebagaimana penjelasan pasal tersebut yaitu *Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).*

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao oleh BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 adalah mendapatkan Opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghitungan indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan metode kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut:

Tabel 2.70
Bobot Nilai Opini BPK

Kategori Opini	Bobot Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar	2
Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)	1

Berdasarkan tabel diatas, maka capaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 dengan target Opini WTP dan terealisasi Opini WTP dihitung secara kuantitatif sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Bobot Nilai Realisasi}}{\text{Bobot Nilai Target}} \times 100$$

$$= \frac{WTP}{WTP} \times 100$$

$$= \frac{4}{4} \times 100$$

$$= 100$$

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00	100,00
Capaian Kinerja Sasaran						**100,00**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah** tahun 2021 sebesar **100%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditargetkan Opini WTP dan terealisasi Opini WTP dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 menghasilkan capaian kinerja yang sama dengan tahun 2020 yaitu Opini WTP dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 100%.

Tren Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan bahwa periode tahun 2017-2019 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mendapatkan Opini WDP, namun pada periode tahun 2020-2021 telah mengalami peningkatan dengan mendapatkan Opini WTP.

Gambar 2.27
Tren Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021 dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 yaitu Opini WTP jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 yaitu Opini WTP , menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai yaitu Opini WTP, sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pencapaian target akhir RPJMD.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen yang kuat Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**" melalui upaya-upaya peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2) Adanya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas lembaga antara DPRD dan Pemerintah serta lintas perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
3) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Akuntansi Keuangan;
4) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan Daerah;

5) Pendampingan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan untuk seluruh Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
6) Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
7) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penatausahaan Laporan Keuangan Daerah.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan SKPD;
2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola Keuangan daerah;
3) Belum optimlanya Sistem pengelolaan Keuangan Daerah melalui Aplikasi SIPD, SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD; dan
4) Masih berlanjutnya Pandemi COVID – 19 di daerah sehingga berdampak pada pembatasan ruang gerak aktifitas mengakibatkan pencapaian realisasi keuangan belum maksimal.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Keuangan SKPD;
2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur pengelola Keuangan Daerah; dan
3) Pelatihan dan optimalisasi Sistem pengelolaan Keuangan Daerah melalui Aplikasi SIPD, SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.182.911.917.814,- (*seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat belas rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.169.298.414.902,- (*seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus dua rupiah*) atau sebesar 92,56%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.72
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	**92,56**	**7,44**	**Efisien**	**1,08**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 7,44% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

MISI 4

Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik. Salah satu upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Rote Ndao diwujudkan melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan kemudahan akses pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayanan publik lingkup Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017). Dengan SKM diharapkan dapat mengetahui mutu layanan dan kinerja setiap unsur pelayanan, serta mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan

atas layanan yang diberikan sebagai bentuk evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan, penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih berkualitas, serta menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat/*customer* dalam upaya peningkatan transparansi dan responsibilitas pelayanan publik.

Tabel 2.73
Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai SKM	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan	Media Survei
1	Puskesmas Ba'a	97,31	A	Sangat Baik	Online
2	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	96,46	A	Sangat Baik	Manual
3	Badan Keuangan Dan Aset	96,05	A	Sangat Baik	Manual
4	Dinas Kesehatan	95,86	A	Sangat Baik	Manual
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	92,25	A	Sangat Baik	Online
6	Bagian Hukum	91,85	A	Sangat Baik	Online
7	Badan Pendapatan	90,94	A	Sangat Baik	Online
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	90,02	A	Sangat Baik	Manual
9	Bagian Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat	89,69	A	Sangat Baik	Manual
10	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	89,60	A	Sangat Baik	Manual
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	89,38	A	Sangat Baik	Manual
12	Dinas Kebudayaan dan Parawisata	88,58	A	Sangat Baik	Manual
13	Bagian Organisasi	88,37	A	Sangat Baik	Online
14	Dinas Perumahan, Kawasan Perkumiman Dan Lingkungan Hidup	87,65	A	Sangat Baik	Online
15	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	87,50	A	Sangat Baik	Manual
16	Bagian Umum	87,47	A	Sangat Baik	Manual
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	87,36	A	Sangat Baik	Manual
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,30	A	Sangat Baik	Manual
19	Satuan Polisi Pamong Praja	84,81	A	Sangat Baik	Online
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,53	A	Sangat Baik	Manual
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	84,14	A	Sangat Baik	Manual
22	Dinas Kelautan Dan Perikanan	82,31	A	Sangat Baik	Online
23	Dinas Peternakan	78,50	B	Baik	Online

No	Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai SKM	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan	Media Survei
24	Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a	78,43	B	Baik	Manual
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78,14	B	Baik	Manual
Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao		**88,10**	**A**	**Sangat Baik**	**Manual dan Online**

Sumber : Olahan Data, 2022

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik tahun 2021 dilakukan oleh 25 (dua puluh lima) perangkat daerah/unit pelayanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan rata-rata nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik sebesar 88,10 poin dengan kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik).

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021			Target Akhir RPJMD 2024	% realisasi 2021 terhadap tahun 2020	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	78,74	79	88,10	111,52	90	111,89	97,89
Capaian Kinerja Sasaran						**111,52**	**Sangat Tinggi**		

Tabel pengukuran indikator diatas menunjukan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 111,52%, sehingga capaian kinerja **Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik** tahun 2021 sebesar **111,52%** atau dikategorikan **"Sangat Tinggi"**.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 melampaui target yang diharapkan. Pada tahun 2021, Indeks Kepuasan Pelayanan Publik ditargetkan sebesar 79 poin dan terealisasi sebesar 88,10 poin dengan capaian kinerja sebesar 111,52%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 meningkat sebesar 9,36 poin dari capaian tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan kinerja dengan persentase realisasi capaian kinerja terhadap capaian tahun 2020 sebesar 111,89%.

Gambar 2.28
Tren Indeks Kepuasan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2021
dan Gap Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2024

Sumber : Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rote Ndao, Tahun 2022

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 sebesar 88,10 poin jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 90 poin, menunjukan bahwa target akhir RPJMD telah tercapai 97,89% dengan gap sebesar 1,90 poin (2,11%), sehingga upaya strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan tren capain kinerja menunjukan optimis pencapaian target akhir RPJMD.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu "***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima***" melalui upaya-upaya peningkatan penyelengaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penataaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
3) Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terkhususnya melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur pengelola ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur penyelenggara penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
3) Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.654.815.580,- (*enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.651.213.636,- (*enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) atau sebesar 99,45%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2021 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.75
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Sumber Daya Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
111,52	**99,45**	**0,55**	**Efisien**	**1,12**	**Efektif**

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi anggaran program pendukung kinerja mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,55% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

D. INOVASI DAERAH.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Adapun jumlah inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

Tabel 2.76
Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Perangkat Daerah Pelaksana
1	E-Planning	Klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun	Bepelitbang Kab. Rote Ndao

No	Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Perangkat Daerah Pelaksana
		secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.	
2	"SUARA PAGI"	Agar semua pasien yang datang ke puskesmas memperoleh informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya	UPTD Puskesmas Baa
3	MAI HITA FO'A FO SELA AI'FO dengan M3SC	1. Agar komoditas tanaman *Ai,fo* dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga dan pemenuhan gizi; 2. Agar komoditas tanaman *Ai'fo* dapat ditanam di pekarangan sekolah sebagai pemenuhan gizi serta media pembelajaran bagi warga sekolah, khusunya para siswa sebagai Program Gizi Masuk Sekolah; 3. Agar meningkatnya hasil produksi tanaman *Ai'fo* ; 4. Adanya home industry *Ai'fo* di Daerah yang memiliki brand produk Rote (susu *Ai'fo* dan biscuit *Ai'fo* serta lain2nya); dan 5. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari *Ai'fo*.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Rote Ndao
4	Mama Bo'i Rote (Data Base Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir)	Tersedianya data yang akurat dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao
5	Management Pengelolaan Dana Desa untuk Pencegahan Korupsi	1. Pencegahan penyalahgunaan dana desa; dan 2. Membantu Pemerintah desa untuk tertib pengelolaan keuangan desa.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rote Ndao
6	Pendataan dan Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Berbasis Android menggunakan Aplikasi AVENSA MAPS	Menghasilkan Pemetaan Sarana Sanitasi Berbasis Android (Samrt Phone) dengan Aplikasi Avensa Maps	UPTD Puskesmas Korbafo
7	Operasi Timbang Terpadu (OTT) Lintas Sektor	Tersedianya Data yang Lengkap (Kuantitas) dan Valid (Kualitas) tentang Hasil Penimbangan dan Pengukuran Balita di Kabupaten Rote Ndao	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao
8	Karantina Desa bagi Orang dari Area Resiko Covid 19	Pencegahan penularan Covid 19 yang terbawa oleh warga yang melakukan perjalanan dari zona Merah Covid	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rote Ndao
9	Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Dinas Dukcapil Kab. Rote Ndao

No	Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Perangkat Daerah Pelaksana
10	Aplikasi Administrasi Perkantotaran (SIMAYA)	Menigkatkan Koordinasi dan pekerjaan administrasi perkantoran	Dinas Kominikasi, Informatika, Stastistik dan Persandian Kab. Rote Ndao
11	Promosi Destinasi Pariwisata Lewat Media elektronik	Mempromosikan tempat wisata di Rote Ndao sebagai tempat tujuan yang menarik dan menguntungkan wisatawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao
12	SAKIP AWARD	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SAKIP	Bagian Organisasi SETDA Kab. Rote Ndao
13	SingkapSasanDo	1. Semua kejadian kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Rote Ndao dapat dilaporkan; 2. Merahasiakan identitas pelapor dan korban terhadap laporan kejadian kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabpuaten Rote Ndao; dan 3. Membantu meringankan masyarakat dalam melaporkan kejadian kasus kekerasan pada perempuan dan anak.	Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao
14	IDAMAN (IKATAN DINAS MAHASISWA KEDOKTERAN)	Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan khususnya tenaga dokter untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara merata kepada masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao
15	Operasi Timbang Terpadu (OTT)	Tersedianya data yang lengkap (kuantitas) dan valid (kualitas) tentang hasil penimbangan dan pengukuran balita di kabupaten rotendao	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao
16	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN	**1.** Menjaring aspirasi di bidang pembauran; **2.** Menyelenggarakan forum dialog dengan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku/etnis dan masyarakat; dan **3.** Merumuskan rekomensadi kepada bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang pembauran kebangsaan	Kantor Kesbangpol Kab. Rote Ndao
17	JEBOL HAMIL (JEMPUT BOLA IBU HAMIL)	1. Meningkatkan Kesehatan Ibu secara Biopsikososciospiritual; 2. Untuk mendeteksi secara dini Faktor resiko pada ibu hamil 3. Mempersiapkan kesehatan ibu pasca persalinan sehingah	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao

No	Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Perangkat Daerah Pelaksana
		dapat memberikan ASI 4. Memelihara Kesehatan ibu agar mengurangi kejadian prematur, Kelahiran mati, dan BBLR (Berat Badan Bayi lahir Rendah) 5. Dapat mendeteksi secara dini lewat pemeriksaan Lab : HBsAg dan HIV	
18	PEMERIKSAAN IVA	Untuk mendeteksi secara dini kanker servik	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao
19	Pelatihan Pembuatan Ti'i Langga	1. Menciptakan SDM yang terampil membuat/menganyam Topi Ti'i Langga; 2. Menciptakan wirausaha produksi Topi Ti'i Langga melalui SDM yang terlatih; dan 3. Melestarikan Topi Ti'i Langga sebagai ciri khas budaya orang Rote.	Kelurahan Onatali Kec. Rote Tengah
20	Operasi Timbang Terpadu	Untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan bayi balita serta status gizi balita	UPTD USKESMAS OELABA
21	" ITA ESA TAFOFO'A ROTE NDAO "	Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao Yang BERMARTABAT Bertumpu Pada Pengembangan Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan.	Bagian Perekenomian dan Adm. Pembangunan SETDA Kab. Rote Ndao
22	Kerajinan Hasil Olahan	Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang produksinya melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda–benda kebutuhan hidup. Produksi kerajinan dirancang untuk tujuan fungsional (kegunaan) sekaligus memiliki nilai keindahan.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rote Ndao
23	PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)	1. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; 2. Mendukung pencapaian SPM Kabupaten/Kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; 3. Mendukung pelaksanaa JKN dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN; dan 4. Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam Renstra Kemenkes tahun 2015-2019.	UPTD PUSKESMAS BUSALANGGA

No	Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Perangkat Daerah Pelaksana
24	"BUKA MATA POSYANDU"	1. Menigkatkan Pemahaman Orang Tua Tentang Manfaat Makanan Bergizi; 2. Meningkatkan Pemahaman Orang Tua Tentang Pola Asuh Terhadap Anak; 3. Mencegah Stunting; dan 4. Menigkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Datang Ke Posyandu.	UPTD PUSKESMAS DELHA
25	Penilaian Koperasi Sehat	Untuk mengukur kinerja Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang dibina agar kondisi koperasi tetap sehat dan tetap terkontrol.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rote Ndao
26	Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan	1. Agar aktivitas ekonomi di daerah semakin berkembang dan para pedagang dapat melakukan usaha dengan benar serta memperluas jaringan pemasaran dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan Pedagang kaki Lima dan Asongan, menambah wawasan dan motivasi tentang dunia usaha atau bisnis, menambah pengetahuan tentang cara pengelolaan asset sebagai modal utama dalam berusaha dan terjalinnya kerjasama antar pelaku usaha. 2. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang telah memperoleh pelatihan kewirausahaan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rote Ndao
27	LAPORAN KAJI CEPAT MENGGONAKAN GOOGLE FORM	Membangun data pelaporan kaji cepat setiap kejadian bencana secara baik dan real time sesuai dengan kebutuhan guna tindaklanjut penanganan yang tepat dan terukur.	BPBD Kab. Rote Ndao
28	WHAATS UP INFO BENCANA DESA/KELURAHAN	1. Sebagai media sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat baik pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat/Saat Bencana dan Pasca Bencana/Pemulihan Dini, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	BPBD Kab. Rote Ndao

No	Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Perangkat Daerah Pelaksana
		2. Sebagai media komunikasi dan konsultasi antara Perangkat Desa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao dan beberapa OPD lainnya yang tergabung dalam Group ini.	

E. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2021

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menerima beberapa penghargaan atas Kinerja yang di laksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Peringkat 1 (Satu) Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Wilayah Provinsi NTT dan Terbaik Se-Regional Atas Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Tahun 2019-2021 di Provinsi NTT.
2. Peringkat Anugerah Pesona Indonesia (API) Kategori Wisata Air Atas Pengembangan Destinasi Wisata Telaga Nirwana di Kecamatan Rote Barat oleh Anugerah Pesona Indonesia (API) Awards 2021;
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Pegelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia;
4. Peringkat Ke-4 (Empat) Kabupaten Tersukses Menurunkan Angka Kemiskinan Tertinggi Se-Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
5. Peringkat 3 (Tiga) Besar Terbaik Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021; dan
6. Predikat terbaik ke-1 (Kesatu) Dengan Kinerja Penyaluran Dana Desa Hasil Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Tahun 2021.

F. REALISASI ANGGARAN.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021

Gambaran realisasi APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.77
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021

URAIAN			ANGGARAN	REALISASI	%
A.	**PENDAPATAN**		**777.278.052.926,00**	**747.540.766.856,25**	**96,17**
	1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.235.744.352,00	31.511.204.366,82	94,81
		Pendapatan Pajak Daerah	8.621.871.038,00	7.295.753.984,05	84,62
		Pendapatan Retribusi Daerah	8.341.056.772,00	7.738.476.195,00	92,78
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.347.141.404,00	6.347.141.404,00	100,00
		Lain-lain PAD Yang Sah	9.925.675.138,00	10.129.832.783,77	102,06
	2.	PENDAPATAN TRANSFER	711.825.787.639,00	687.613.381.142,00	96,60
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	583.740.016.000,00	567.081.097.751,00	97,15
		Dana Bagi Hasil	6.854.664.000,00	11.947.941.056,00	174,30
		Dana Alokasi Umum	419.624.046.000,00	419.624.046.000,00	100,00
		Dana Alokasi Khusus Fisik	88.991.284.000,00	77.141.670.204,00	86,68
		Dana Alokasi Khusus Non Fisik	68.270.022.000,00	58.367.440.491,00	85,49
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	106.456.783.000,00	106.456.783.000,00	100,00
		Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
		Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
		Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
		Dana Desa	106.456.783.000,00	106.456.783.000,00	100,00
		Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.628.988.639,00	14.075.500.391,00	65,08
		Pendapatan Bagi Hasil	21.628.988.639,00	14.075.500.391,00	65,08
		Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.216.520.935,00	28.416.181.347,43	88,20
		Pendapatan Hibah	0,00	91.969.347,43	0,00
		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	91.969.347,43	0,00
		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.216.520.935,00	28.324.212.000,00	87,92
		Lain-lain Pendapatan	32.216.520.935,00	28.324.212.000,00	87,92
B.	**BELANJA**		**833.095.042.264,00**	**751.544.314.473,51**	**90,21**
	1.	BELANJA OPERASI	533.158.667.241,00	480.534.585.725,51	90,13
		Belanja Pegawai	303.045.438.264,00	279.191.863.455,00	92,13
		Belanja Barang dan Jasa	221.595.215.777,00	192.893.663.481,51	87,05
		Belanja Hibah	5.674.508.000,00	5.610.553.789,00	98,87
		Belanja Bantuan Sosial	2.843.505.200,00	2.838.505.000,00	99,82

URAIAN			ANGGARAN	REALISASI	%
	2.	BELANJA MODAL	121.841.385.009,00	105.810.657.251,00	86,84
		Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.998.555.291,00	18.703.962.914,00	77,94
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.973.074.508,00	25.276.757.114,00	84,33
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.688.324.500,00	59.758.354.399,00	90,97
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.181.430.710,00	2.071.582.824,00	94,96
	4.	BELANJA TAK TERDUGA	26.470.642.014,00	13.993.322.296,00	52,86
		Belanja Tak Terduga	26.470.642.014,00	13.993.322.296,00	52,86
	5.	BELANJA TRANSFER	151.624.348.000,00	151.205.749.201,00	99,72
		Belanja Bagi Hasil	1.734.694.000,00	1.316.095.201,00	152,50
		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	906.588.000,00	614.669.124,00	67,80
		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	828.106.000,00	701.426.077,00	84,70
		Belanja Bantuan Keuangan	149.889.654.000,00	149.889.654.000,00	100,00
		Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.889.654.000,00	149.889.654.000,00	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(55.816.989.338,00)	(4.003.547.617,26)	7,17
C.	**PEMBIAYAAN**				
	1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.316.989.338,00	65.295.375.390,76	98,46
		Penggunaan SiLPA	66.316.989.338,00	65.295.125.390,76	98,46
		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	250.000,00	0,00
	2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00
		Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00
		Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO			55.816.989.338,00	54.795.375.390,76	98,17
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			**0,00**	**50.791.827.773,50**	**0,00**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Kab. Rote Ndao, Kondisi Desember 2021.

Tampilan tabel diatas menunjukan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran 2021 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Adapun rincian realisasi APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.777.278.052.926,- (*tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) yang terealisasi sebesar Rp.747.540.766.856,25 (*tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen*) atau sebesar 96,17%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah, ditargetkan sebesar Rp.33.235.744.352,- (*tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) terealisasi sebesar Rp.31.511.204.366,82 (*tiga puluh satu miliar lima ratus sebelas juta dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh dua sen*) atau sebesar 94,81;
2) Pendapatan Transfer, ditargetkan sebesar Rp.711.825.787.639,- (*tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*) terealisasi sebesar Rp.687.613.381.142,- (*enam ratus delapan puliuh tujuh miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah*) atau sebesar 96,60%.
3) Lain – Lain Pendapatan Yang Sah, ditargetkan sebesar Rp.32.216.520.935,- (*tiga puluh dua miliar dua ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 28.416.181.347,43 (*dua puluh delapan miliar empat ratus enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen*) atau sebesar 88,20%.

b. Belanja Daerah.

Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp.833.095.042.264,- (*delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) terealisasi sebesar Rp.751.544.314.473,51 (*tujuh ratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen*) atau sebesar 90,21%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi, ditargetkan sebesar Rp.533.158.667.241,- (*lima ratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu*

rupiah) terealisasi sebesar Rp.480.534.585.725,51 (*empat ratus delapan puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah lima puluh satu sen*) atau sebesar 90,13%.

2) Belanja Modal, ditargetkan sebesar Rp.121.841.385.009,- (*seratus dua puluh satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan rupiah*) terealisasi sebesar Rp.105.810.657.251,- (*seratus lima miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) atau sebesar 86,84%;
3) Belanja Tak Terduga, ditargetkan sebesar Rp.26.470.642.014,- (*dua puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu empat belas rupiah*) terealisasi sebesar Rp.13.993.322.296,- (*tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puuh enam rupiah*) atau sebesar 52,86%.
4) Belanja Transfer, ditargetkan sebesar Rp.151.624.348.000,- (*seratus lima puluh satu miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) terealisasi sebesar Rp.151.205.749.201,- (*seratus lima puluh satu miliar dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah*) atau sebesar 99,72%.

c. Pembiayaan, terdiri dari :

1) Penerimaan Daerah, ditargetkan sebesar Rp.66.316.989.338,- (*enam puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*) terealisasi sebesar Rp.65.295.375.390,76 (*enam puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh enam sen*) atau sebesar 98,46%.
2) Pengeluaran Daerah, ditargetkan sebesar Rp.10.500.000.000,- (*sepuluh miliar lima ratus juta rupiah*) terealisasi sebesar 100%

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Adapun gambaran Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pencapaian kinerja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.78
Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung		Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran			Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5		6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING														
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.	Indeks Pembangunan Manusia	95,40	95,40	1.	Program Pengelolaan Pendidikan	143.998.795.365,00	113.805.398.232,51	79,03	30.193.397.132,49	20,97	Efisien	1,21	Efektif
					2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
					3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan								
					4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan								
					5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan								
					6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
					7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
					8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan								

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung		Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran			Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5		6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2.	Harapan Lama Sekolah	93,48	93,48	1.	Program Pengelolaan Pendidikan	48.768.171.802,00	47.975.366.173,51	98,37	792.805.628,49	1,63	Efisien	0,95	Kurang Efektif
					2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
					3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan								
					4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan								
					5.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan								
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.	Kasus Kematian Ibu	100,00	100,00	1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	95.230.623.563,00	65.830.032.059,00	69,13	29.400.591.504,00	30,87	Efisien	1,45	Efektif
	4.	Prevalensi Stunting	100,00		2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
					3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan								
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	5.	Indeks Pembanguan Gender (IPG)	91,36	89,19	1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	369.994.200,00	349.614.246,00	94,49	20.379.954,00	5,51	Efisien	0,94	Kurang Efektif

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung		Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran			Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5		6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
Anak														
	6.	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	87,01		2.	Program Perlindungan Perempuan								
					3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga								
					4.	Program Pemenuhan Hak Anak								
					5.	Program Perlindungan Khusus Anak								
Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	7.	Laju pertumbuhan Penduduk	78,00	78,00	1.	Program Pengendalian Penduduk	5.650.206.600,00	5.081.009.934,00	89,93	569.196.666,00	10,07	Efisien	0,87	Kurang Efektif
					2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								
					3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)								
MISI 2 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN														
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing	8.	PDRB Per Kapita ADHB	93,90	93,90	1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.782.963.200,00	2.742.776.680,00	98,56	40.186.520,00	1,44	Efisien	0,95	Kurang Efektif
					2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
					3.	Program Penelitian dan Pengembangan								

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung		Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran			Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5		6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
						Daerah								
					4.	Program Pengelolaan Perbatasan								
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat	9.	Kemiskinan Ekstrem	100,00	100,00	1.	Program Pemberdayaan Sosial	1.219.170.600,00	1.122.948.920,00	92,11	96.221.680,00	7,89	Efisien	1,09	Efektif
					2.	Program Rehabilitasi Sosial								
					3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
					4.	Program Penanganan Bencana								
Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian	10.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB	83,76	83,76	1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	8.418.395.510,00	8.073.798.400,00	95,91	344.597.110,00	4,09	Efisien	0,87	Kurang Efektif
					2.	Program Pengembangan UMKM								
					3.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen								
					4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting								
					5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
					6.	Program Pengelolaan Sistem Industri Nasiona								

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung		Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran			Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5		6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan	11.	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	93,21	93,21	1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.710.613.850,00	4.510.637.763,00	95,75	199.976.087,00	4,25	Efisien	0,97	Kurang Efektif
					2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
					3.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
					4.	Program Penyuluhan Pertanian								
Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	12.	Produksi Sektor Pertanian	102,24	102,24	1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.710.613.850,00	4.510.637.763,00	95,75	199.976.087,00	4,25	Efisien	1,07	Efektif
					2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
					3.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
					4.	Program Penyuluhan Pertanian								
Meningkatnya Peran Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah	13.	Jumlah Kunjungan Wisata	83,33	83,33	1.	Program Pengembangan Kebudayaan	905.279.870,00	899.256.476,00	99,33	6.023.394,00	0,67	Efisien	0,84	Kurang Efektif
					2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya								
					3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi								
					4.	Program Pemasaran Pariwisata								

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung		Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran			Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5		6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
					5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
Meningkatnya Ketahanan Pangan	14.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	114,26	114,26	1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	520.911.800,00	508.673.421,00	97,65	12.238.379,00	2,35	Efisien	1,17	Efektif
					2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan								
					3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan								
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN														
Meningkatnya Konektivitas, Ketersediaan Sumber Daya Air dan Permukiman Yang Layak	15.	Cakupan Kualitas Infrastruktur	101,19	101,19	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	86.161.085.328,00	79.463.751.272,00	92,23	6.697.334.056,00	7,77	Efisien	1,10	Efektif
					2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								
					3.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional								
					4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah								
					5.	Program Pengembangan Permukiman								

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung		Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran			Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5		6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
					6.	Program Penataan Bangunan Gedung								
					7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya								
					8.	Program Penyelenggaraan Jalan								
					9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi								
					10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
					11.	Program Pengembangan Perumahan								
					12.	Program Kawasan Permukiman								
					13.	Program Penatagunaan Tanah								
					14.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup								
					15.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
					16.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)								

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung		Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran			Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5		6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
					17.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)								
					18.	Program Pengelolaan Persampahan								
Meningkatnya Konektivitas	16.	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	99,16	99,16	1.	Program Penyelenggaraan Jalan	44.240.561.560,00	41.015.393.178,00	92,71	3.225.168.382,00	7,29	Efisien	1,07	Efektif
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air	17.	Rasio Jaringan Irigasi	101,24	101,24	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19.154.421.840,00	18.369.191.450,00	95,90	785.230.390,00	4,10	Efisien	1,06	Efektif
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100,23	100,23	1.	Program Kawasan Permukiman	11.637.870.708,00	\11.637.870.708,00	100,00	-	0,00	Efisien	1,00	Efektif
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,45	101,45	1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	366.000.000,00	317.930.111,00	86,87	48.069.889,00	13,13	Efisien	1,17	Efektif

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung			Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran				Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
									Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5			6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
					2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)										
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	20.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	228,04	164,02	1.	Program Pengelolaan Persampahan		1.001.940.900,00	944.775.100,00	94,29	\57.165.800,00	5,71	Efisien	1,74	Efektif
	21.	Emisi Gas Rumah Kaca	100,00		2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
					3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)									
Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	22.	Ketaatan terhadap RTRW	99,77	99,77	1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		32.832.000,00	24.010.000,00	73,13	8.822.000,00	26,87	Efisien	1,36	Efektif
Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah	23.	Desa Tangguh Bencana	100,00	100,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja (%)		Program Pendukung		Total Anggaran			Tingkat Efsiensi Kinerja Tujuan/Sasaran			Tingkat Efektifitas Kinerja Tujuan/Sasaran	
			Indikator	Rata-Rata Tujuan/ Sasaran			Pagu (Rp)	Realisasi		Efisensi Anggaran		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah	%			
1	2		3	4	5		6	7	8	9 = 6 – 7	10	11	12 = 4 / 8	13
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA														
Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	24.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	100,00	50,00		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	654.815.580,00	651.213.636,00	99,45	3.601.944,00	0,55	Efisien	0,50	Kurang Efektif
	25.	Indeks Reformasi Birokrasi	0,00											
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	26.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00	100,00	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	182.911.917.814,00	169.298.414.902,00	92,56	13.613.502.912,00	7,44	Efisien	1,08	Efektif
					2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah								
Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	27.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	111,52	111,52	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	654.815.580,00	651.213.636,00	99,45	3.601.944,00	0,55	Efisien	1,12	Efektif
KINERJA PENDUKUNG LAINNYA					Program Pendukung Lainnya		394.790.892.547,00	365.036.820.591,00	92,46	29.754.071.956,00	7,54	Efisien	1,00	Efektif
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA MISI			**95,11**		**TOTAL APBD**		**833.095.042.264,00**	**751.544.314.473,51**	**90,21**	**81.550.727.790,49**	**9,79**	**Efisien**	**1,05**	**Efektif**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA			**98,47**		**TOTAL APBD**		**833.095.042.264,00**	**751.544.314.473,51**	**90,21**	**81.550.727.790,49**	**9,79**	**Efisien**	**1,05**	**Efektif**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Belanja Daerah dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 sebesar Rp.833.095.042.264,- (*delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah*) terealisasi sebesar Rp.751.544.314.473,51 (*tujuh ratus lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen*) atau sebesar 90,21%, sehingga terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp.81.550.727.790,49 (*delapan puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah empat puluh sembilan sen*) yang menunjukan tingkat efisiensi sebesar 9,79% dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio rata-rata capaian indikator kinerja (98,47%) terhadap realisasi anggaran (90,21%) menunjukkan tingkat efektiftas sebesar 1,05 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif.**

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

3.1.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : PER.9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir Tahun Anggran 2021.
13. DIPA No. SP DIPA-067.07.4.350368/2021 tanggal 23 November 2020.

3.1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Tujuan diberikannya tugas pembantuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat dan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan karakternya. Adapun hakekat pemberian tugas pembantuan yakni :

1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
2. Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud di atas hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.
3. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.
4. Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
5. Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp.439.547.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.427.971.300,-** atau 97,37%. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai penugasan kepada Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun Anggaran 2021 meliputi :

a. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi

1) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

   Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Ditjen. Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

2) Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

   Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan :

   - Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi
   - Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
   - SAB yang dibangun dan ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas
   - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
   - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;

3) Sumber dan Jumlah Anggaran

   Anggaran bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui DIPA Nomor SP DIPA-067.07.4.350368/2021 tanggal 23 November 2020 dengan jumlah anggaran **Rp.439.547.000,-**

4) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi dilaksanakan oleh OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao.

3.1.3 Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagai berikut :

1. Pada Tahun Anggaran 2021 tingkat pencapaian pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao sebesar 97,37% dari target yang telah ditetapkan
2. Target Kinerja

   Adapun target kinerja tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Rote Ndao yaitu :

   a. Target Kinerja Tugas Pembantuan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao yaitu Peningkatan SAB 1 Lokasi di UPT. Lidor Desa Lidor.
3. Realisasi

   Adapun realisasi tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Rote Ndao yaitu :

   a. Realisasi tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran **Rp.439.547.000,-** realisasi sebesar **Rp.427.971.300,-** atau 97,37% dengan kegiatan sebagai berikut :
      - Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan alokasi dana sebesar **Rp.300.312.000,-** dan realisasi sebesar **Rp.297.314.000,-** atau 99%.
      - Dukungan Manajemen Eselon 1 Dirjen. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Alokasi dana sebesar **Rp.139.235.000,-** dan realisasi sebesar **Rp.130.657.300,-** atau 93,84%.

Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat

Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program,Kegiatan, OutPut dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan • Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2021 ttg Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi TA. 2021 • DIPA No. SP DIPA-067.07.4-350368/2021 tgl. 23 Nov 2020	1.Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi sebagai berikut:	Rote Ndao	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	439.547.000	427.971.300	97,37	100	100	
			Kegiatan ; 1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi **Output** : Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya dan SAB yang dibangun/ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi **Rincinan Kegiatan :** ➢ Fasilitasi Lembaga Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi ➢ SAB yang dibangun dan ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	Rote Ndao		300.312.000	297.314.000	99,00	100	100	
			Kegiatan : 2. Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi **Rincian Kegiatan :** ➢ Layanan Perkantoran ➢ Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			139.235.000	130.657.300	93,84	100	100	

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Tahun 2021 Tidak Ada Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program,Kegiatan , OutPut dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				NIHIL							

3.3 Permasalahan dan Kendala

a. Banyak sarana prasarana di unit permukiman transmigrasi yang rusak sedang maupun rusak berat.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

1. Menunggu penyerahan aset dari Pusat ke Daerah sehingga dapat diupayakan rehabilitasi dan prasarana tersebut dengan menggunakan APBD Kabupaten Rote Ndao.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan menetapkan 5 jenis layanan dasar pendidikan sebagai berikut :

a. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal;
b. SPM Pendidikan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar;
c. Penerima pelayanan dasar pada :
   - SPM Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
   - SPM Pendidikan Dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
   - SPM Pendidikan Kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
d. Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota trediri atas 3 (tiga) indikator antara lain : Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Kesetaraan; dan
e. Mutu pelayanan dasar pada setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Standar Pelayanan Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan dan tanggungjawab kabupaten/kota.

Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan mencakup 3 indikator pelayanan yaitu :

Tabel 4.1

Target Pencapaian Standar Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan dasar	Jumlah Warga negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	2021
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2021
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	2021

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Adapaun target dan pembiayaan pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Mencakup 3 (tiga) indikator pelayanan dasar, yaitu:

a. Pelayanan Pendidikan Dasar

Pelayanan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun secara minimal baik peserta

pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) dan peserta pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs).

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan dukungan dana sebesar **Rp.21.531.427.822,00** (DAK) dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan dukungan dana sebesar **Rp.15.606.696.868,00** (DAK).

b. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pendidikan Kesetaraan meliputi :

- Paket A;
- Paket B; dan
- Paket C.

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan dukungan dana sebesar **Rp.1.041.400.000,00** (DAU).

c. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan dukungan dana sebesar Rp. 3.713.686.310,00 (DAU).

C. Realisasi

Adapun realisasi Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan pada tahun 2021, pada tabel 4.2. berikut:

Tabel 4.2.
Realisasi Pencapaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

No	Indikator	Capaian Tahun (n-1)			Capaian Tahun (n)			Target Capaian (%)	Keterangan
		Sasaran	Realisasi	Hasil (%)	Sasaran	Realisasi	Hasil (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	29.476	29.456	99,93	2.590	1.832	70,73	100	Total Usia 5-6 tahun: - TK (L) : 1.329 - TK (P) : 1.261 (Belum Berhasil)
2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	82	82	100	19.986	19.986	100	100	Total Siswa: - SD 18.970 - SMP 1.016 (Berhasil)
3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5.502	4.130	75,06	100	82	82,00	100	Total Peserta: - Paket A : 17 - Paket B : 41 - Paket C : 24 (Belum Berhasil)

Sumber : Data Olahan Bidang Pendidikan Tahun 2021

D. Alokasi Anggaran

Alokasi jumlah anggaran Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pendidikan pada Tahun 2021 meliputi:

1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2) Personal/sumber daya manusia; dan
3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Pendidikan.

Oleh karena itu perlu menginventarisir program, kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, pada tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3.
Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp.3.713.686.310	DAK
2	Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs	Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp.21.531.427.82 Rp.15.606.696.86	DAU
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rp.1.041.400.000	DAU
JUMLAH				**Rp.38.179.524.690**	**DAU**
TOTAL				**Rp.41.893.211.000**	**DAK & DAU**

Sumber : Anggaran berasal dari DPPA Dinas PKO Tahun Anggaran 2021

E. Dukungan Personil

Adapun jumlah dukungan personil dalam pemenuhan pelayanan dasar pada Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, pada tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4.
Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Pendidikan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	SD	SMP	CABDIN	Dinas PKO
1	Tenaga Kependidikan	-	9	-	-
2	Tenaga Pendidik/Guru	987	379	-	-
3	Pengawas	18	4	15	4
4	Pegawai	-	-	7	46
Total		***1.005***	***392***	***22***	***50***

Sumber : Data Olahan Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2021

F. Permasalahan dan Solusi

Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021 di Kabupaten Rote Ndao jika dilihat dari realisasi / persentase capaian, maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua indikator mencapai target yang ditetapkan, baik itu target kabupaten maupun target nasional dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah baik itu anggaran dari APBD Kabupaten, APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Pencapaian setiap indikator masih terdapat kendala dan permasalahan terhadap indikator pelayanan dasar bidang urusan pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   * **Permasalahan**
     a. Masih terdapat lembaga PAUD yang tidak berjalan aktif;
     b. Minimnya tenaga pendidik/Guru PAUD yang profesional/belum memenuhi kualifikasi S1 PG-PAUD;
     c. Tingkat ekonomi Guru PAUD masih rendah;
     d. Fasilitas, sarana prasarana yang masih minim; dan
     e. Masih terdapat daerah kecamatan yang belum ada lembaga PAUD.
   * **Solusi**
     a. Dilakukan pelatihan dan atau diklat bagi Guru PAUD;
     b. Pengadaan sarana dan prasarana untuk lembaga PAUD; dan
     c. Pemerataan pembangunan lembaga PAUD di daerah kecamatan yang belum ada lembaga PAUD.
2. Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs)
   * **Permasalahan**
     a. Masih rendahnya kualitas sarana fisik;
     b. Masih rendahnya kualitas Tenaga Pendidik/Guru;
     c. Rendahnya prestasi belajar siswa;
     d. Kurangnya pemerataan kesempatan Pendidikan;
     e. Rendahnya relevansi Pendidikan dengan kebutuhan; dan
     f. Pendidikan yang belum berbasis pada Masyarakat dan Potensi Daerah.

* **Solusi**

a. Penambahan dana guna rehabilitasi gedung sekolah;
b. Penambahan kegiatan diklat pendidikan bagi Guru dan Tenaga kependidikan;dan
c. Penambahan sarana dan prasarana pendidikan.

3. Pendidikan Kesetaraan

* **Permasalahan**

a. Latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadirannya sangat rendah;
b. Warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, sehingga mereka hanya belajar ketika ada waktu;
c. Motivasi belajar rendah;
d. Minimnya Tutor yang memiliki latar belakang keguruan;
e. Kurangnya kesejahteraan Tutor;
f. Minimnya ketersediaan sarana belajar (jumlah modul dan buku terbatas); dan
g. Langkah penilaian hasil belajar yang masih rendah.

* **Solusi**

- Dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan;
- Dilakukan diklat bagi Tutor;dan
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi peserta pendidikan kesetaraan.

4.2 Bidang Urusan Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, ditetapkan 12 Jenis layanan dasar sebagaimana berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

   Pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

   Pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

   Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

   Pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

   Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

   Pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

   Pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

   Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

   Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

    Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

    Pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*=HIV)

    Pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Tahun 2021, pada tabel 5.5. berikut:

Tabel 4.5.

Target Pencapaian Standar Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

No	Indikator	Target (%)	Anggaran (Rp)
1	*2*	*3*	*4*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	861.900.312
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	5.840.388.120
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	115.365.710
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	902.314.336
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	493.104.005
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	647.184.216
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	186.235.620
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	97.322.020
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100	108.486.400
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100	326.492.140
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	100	383.963.750
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	100	343.123.800

Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

C. Realisasi

Adapun realisasi Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2021, pada tabel 4.6. berikut:

Tabel 4.6.

Realisasi Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

No	Indikator	Capaian (n-1)			Capaian (n)			Target Capaian (%)	Keterangan
		Pembilang	Penyebut	Hasil (%)	Pembilang	Penyebut	Hasil (%)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.807	5.402	70,47	2.563	3.353	76,44	100	Belum berhasil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.871	5.157	55,67	2.491	3.200	77,84	100	Belum berhasil

3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.871	4.926	58,28	2.602	3.048	85,37	100	Belum berhasil
4	Pelayanan Kesehatan Balita	11.167	17.827	62,64	11.191	14.111	79,31	100	Belum berhasil
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	5.149	21.085	24,42	26.607	29.456	90,33	100	Belum berhasil
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	32.564	102.733	31,70	39.514	82.955	47,63	100	Belum berhasil
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	6.058	17.662	34,30	1.706	14.635	11,66	100	Belum berhasil
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.761	26.619	14,13	3.990	21.577	18,49	100	Belum berhasil
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	341	1.625	20,98	400	1.317	30,37	100	Belum berhasil
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	126	143	88,11	174	115	151,74	100	Berhasil
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	866	2.819	30,72	1.014	2.387	42,48	100	Belum berhasil
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	3.880	5.989	64,79	5.600	3.893	143,85	100	Berhasil

Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021, pada tabel 4.7. berikut:

Tabel 4.7.

Anggaran Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	861.900.312	DAK, Pajak Rokok
2	Pelayanan Kesehataan Ibu Bersalin	5.840.388.120	DAK, Pajak Rokok
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	115.365.710	DAK, Pajak Rokok
4	Pelayanan Kesehatan Balita	902.314.336	DAK, Pajak Rokok
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	493.104.005	DAK, Pajak Rokok
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	647.184.216	DAK, Pajak Rokok
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	186.235.620	DAK, Pajak Rokok
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	97.322.020	DAK, Pajak Rokok
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	108.486.400	DAK, Pajak Rokok
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	326.492.140	DAK, Pajak Rokok
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	383.963.750	DAK, Pajak Rokok dan Global Fund
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	343.123.800	DAK, Pajak Rokok
	TOTAL	**10.305.880.429**	

Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

E. Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021, pada tabel 4.8. berikut:

Tabel 4.8.

Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	Jumlah & Satuan
1	PNS/CPNS	599 orang
2	Kontrak Daerah	325 orang
3	Penugasan Khusus : Nusantara Sehat PTT Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)	 37 orang 8 orang 1 orang
4	TKD Spesialis	3 orang
5	Dokter Kontrak	15 orang
6	Internsip	12 orang
7	BOK	20 orang
8	Sukarela	60 orang
	Total	**1.020 orang**

Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

F. Permasalahan dan Solusi

Adapun Kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Bidang Urusan Kesehatan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2021, baik internal maupun eksternal dan solusi yang dilakukan oleh Bidang Urusan Kesehatan dalam penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

   Pernyataan standarnya adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, yaitu standar kuantitas dan kualitas. Standar kuantitasnya adalah kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Sedangkan standar kualitasnya yaitu pelayanan antenatal memenuhi 10T, yaitu pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim, penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin, pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, dan konseling.

Capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 76,44%, dengan permasalahan dan solusinya adalah:

a. Standar kuantitas dan kualitas K6 belum mencapai target, solusinya yaitu peningkatan KIE kepada sasaran dan peningkatan kapasitas SDM agar dapat bekerja sesuai standar;
b. Kurangnya logistik pendukung ddalam pemeriksaan kesehatan Ibu Hamil, solusinya penyediaan logistik sesuai jumlah sasaran ibu hamil;
c. Pelayanan tidak terlaporkan dari jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah kabupaten maupun provinsi, solusinya yaitu meningkatkan koordinasi dan mewajibkan Puskesmas untuk mendata serta mencatat semua ibu yang mendapatkan pelayanan di luar fasilitas pelayanan kesehatan setiap bulan dan melaporkan secara berjenjang;
d. Kurangnya koordinasi lintas sektor terkait di tingkat kecamatan, dan desa/kelurahan, solusinya memperkuat kerjasama lintas sektor melalui rapat koordinasi di tingkat kecamatan dengan penandatangan komitmen bersama; dan
e. Pencatatan pada register/kohort di semua tempat pelayanan belum lengkap, solusinya Orientasi pencatatan dan pelaporan pelayanan pada register/kohort baik manual maupun aplikasi berbasis web melalui aplikasi mamabo'i ataupun e kohort Kementerian Kesehatan yang dilaporkan secara real time dan monitoring untuk validasi data secara berkala.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pernyataan standarnya yaitu setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.

Capaian SPM pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu 77,84%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. Kurangnya implementasi Standar Operasional Prosedur pada saat melakukan pertolongan persalinan, solusinya penegasan penggunaan standar operasional prosedur dari Dinas Kesehatan

ke Puskesmas dan monitoring evaluasi secara berkala di lapangan;

b. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan (bidan) untuk tinggal di desa karena sarana prasarana yang kurang memadai (bangunan pustu rusak), solusinya perbaikan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan;
c. Masih tingginya pertolongan persalinan di rumah/tidak di fasilitas kesehatan, solusinya rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan semua stakeholder terkait agar berkomitmen semua persalinan di fasilitas kesehatan melalui peraturan desa; dan
d. Pelayanan tidak terlaporkan dari jaringan dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta ataupun fasilitas pelayanan kesehatan di luar wilayah kabupaten maupun provinsi, solusinya Orientasi pencatatan dan pelaporan pelayanan pada register/kohort baik manual maupun aplikasi berbasis web melalui aplikasi mamabo'i ataupun e kohort Kementerian Kesehatan yang dilaporkan secara real time dan monitoring untuk validasi data secara berkala.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pernyataan standarnya yaitu setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas yaitu kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dan standar kualitas yaitu pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam) dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari).

Capaian SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu 85,37%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. Kurangnya prasarana pendukung pelayanan bayi baru lahir, solusinya menambah prasarana pendukung pelayanan bayi baru lahir.
b. Standar kuantitas dan kualitas bayi baru lahir belum mencapai target, solusinya yaitu peningkatan KIE kepada orang tua bayi, dan peningkatan kapasitas SDM bagi tenaga kesehatan (Bidan dan Perawat) agar dapat bekerja sesuai standar.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pernyataan standarnya yaitu setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang. Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Capaian SPM pelayanan kesehatan balita yaitu 79,31%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. Petugas kesehatan belum dilatih tentang pelayanan SDIDTK, solusinya Pelatihan/Orientasi tenaga kesehatan terkait pelayanan SDIDTK;
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan balita (alat ukur terstandar di posyandu), solusinya pengadaaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan balita dan koordinasi dengan Dinas PMD tentang pengadaan alat ukur posyandu dari dana desa;
c. Pencatatan dan pelaporan pelayanan balita (kohort) tidak lengkap, solusinya penegasan pencatatan dan pelaporan pada kkohort secara manual maupun melalui aplikasi EPPGBM;
d. Kurangnya KIE/konseling kepada sasaran pada saat posyandu (meja 4), solusinya peningkatan KIE dan konseling pada meja ke 4; dan
e. Kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan terhadap balita, solusinya rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan stakeholder terkait pembuatan komitmen.

5. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pernyataan standarnya yaitu setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar didalam dan diluar satuan pendidikan dasar. Pelayanan kesehatan sesuai standar

meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 disekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai dengan 15 tahun diluar sekolah.

Capaian SPM pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar yaitu 90,33%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. Belum terbentuknya Tim Pembina UKS di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, solusinya adalah berkoordinasi dengan Pemkes Setda Kabupaten Rote Ndao untuk pembentukan Tim Pembina UKS Kabupaten;
b. Belum adanya data tentang jumlah anak yang tidak sekolah formal maupun putus sekolah, solusinya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan desa terkait data formal dan non formal;
c. Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, banyak kegiatan tatap muka disekolah tidak dilakukan sehingga kegiatan skrining kesehatan yang sasaran pelayanannya di sekolah tidak dapat dilakukan dengan maksimal, solusinya melakukan skrining kesehatan di luar gedung sekolah; dan
d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan UKS (UKS KIT), solusinya pengadaan UKS KIT.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Pernyataan standarnya yaitu setiap warga negara usia 15 tahun sampai dengan 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular berupa Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, Anamnesa perilaku beresiko minimal 1 kali setahun.

Capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif yaitu 47,63%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. Belum semua penduduk usia produktif berpartisipasi aktif dalam skrining kesehatan, solusinya meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan partisipasi aktif penduduk usia produktif untuk mengunjungi pos pelayanan di desa;
b. Kurangnya peralatan pendukung (KIT Posbindu PTM) dan bahan medis habis pakai (stik gula darah, solusinya pengusulan pengadaan peralatan KIT posbindu PTM dan bahan medis habis pakai (stik gula darah);
c. Posbindu PTM di desa/kelurahan belum beroperasi secara maksimal, solusinya meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait baik di tingkat kecamatan ataupun desa untuk pengaktifan posbindu; dan
d. Pencatatan dan pelaporan di Posbindu PTM, Pustu, Pos UKK dan pelayanan terpadu di FKTP belum akurat dan valid, solusinya melakukan koordinasi dan pembinaan secara integrasi tentang pencatatan dan pelaporan di tingkat Posbindu, Pos UKK dan FKTP.

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pernyataan standarnya yaitu setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular.

Capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu 11,66%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. PPKM karena Pandemi Covid 19 karena lansia merupakan usia rentan, solusi pelayanan dilakukan dari rumah ke rumah;
b. Kurangnya logistik BMHP untuk skrining faktor resiko, solusi pengadaan BMHP sesuai jumlah sasaran;
c. Kurangnya kompetensi petugas karena terjadi pergantian pengelola, solusi penegasan agar petugas yang sudah dilatih tetap bertanggungjawab terhadap pelayan kesehatan lansia dan peningkatan kapasitas petugas yang baru; dan

d. Belum adanya register khusus pencatatan pelayanan usila di pos pelayanan usila, solusinya mewajibkan semua tempat pelayanan mempunyai kohort/register serta mencatat semua pelayanan dalam register/kohort usila.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pernyataan standarnya yaitu setiap penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi perubahan gaya hidup dan edukasi kepatuhan minum obat.

Capaian SPM pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu 18,49%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. Belum semua penduduk usia >15 tahun berpartisipasi aktif dalam skrining kesehatan, solusinya meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan partisipasi aktif penduduk usia >15 tahun untuk mengunjungi FKTP dan pos pelayanan di desa/kelurahan;
b. Kurangnya peralatan pendukung (tensimeter digital), solusinya pengusulan pengadaan peralatan pengukuran deteksi dini hipertensi (tensimeter digital);
c. Pos pelayanan kesehatan pemberdayaan masyarakat (Posbindu PTM, pos lansia dan pos UKK) belum beroperasi secara maksimal, solusinya meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait; dan
d. Pencatatan/pelaporan di Posbindu PTM, pos lansia, pustu, pos UKK dan pelayanan terpadu di FKTP belum akurat dan valid, solusinya koordinasi dan pembinaan secara terintegrasi tentang pencatatan dan pelaporan di tingkat Posbindu PTM, pos lansia, pustu, pos UKK dan FKTP.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Pernyataan standarnya yaitu setiap penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran gula darah minimal

1 kali sebulan di fasilitas kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan atau nutrisi.

Capaian SPM pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus yaitu 30,37%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. Belum semua penderita diabetes melitus berpartisipasi aktif dalam melakukan kunjungan rutin di fasilitas kesehatan. solusinya meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan partisipasi aktif penderita hipertensi untuk mengunjungi FKTP dan pos pelayanan di desa/kelurahan;
b. Kurangnya bahan medis habis pakai (stik gula darah), solusinya pengusulan pengadaan bahan medis habis pakai (stik gula darah);
c. Pos pelayanan kesehatan pemberdayaan masyarakat (Posbindu PTM, pos lansia dan pos UKK) belum beroperasi secara maksimal, solusinya meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait; dan
d. Pencatatan/pelaporan di Posbindu PTM, pos lansia, pustu, pos UKK dan pelayanan terpadu di FKTP belum akurat dan valid, solusinya koordinasi dan pembinaan secara terintegrasi tentang pencatatan dan pelaporan di tingkat Posbindu PTM, pos lansia, pustu, pos UKK dan FKTP.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan standarnya yaitu setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa (pemeriksaan status mental/wawancara dan edukasi kepatuhan minum obat.

Capaian SPM pelayanan kesehatan ODGJ berat yaitu 151,30%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. Tenaga kesehatan terlatih (dokter dan perawat) pada tahun 2018-2020 tentang deteksi dini dan tatalaksana gangguan jiwa sebanyak 54 yang terdiri dari 21 dokter dan 33 perawat, namun dikarenakan Sebagian besar Dokter dan Perawat tersebut juga merangkap tugas sebagai tim Vaksinator vaksinasi COVID-19, sehingga pelayanan tetrhadap ODGJ menjadi kurang optimal. Solusinya berkoordinasi dengan tenaga terlatih di Puskesmas dan tenaga Bidan/Perawat di tingkat Desa/Pustu terkait untuk meningkatkan deteksi dini dan tatalaksana;
b. Kurang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan keluarga pasien terkait Kepatuhan Minum Obat, solusinya meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait untuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan keluarga pasien serta kunjungan rumah terintegrasi; dan
c. Adanya laporan bahwa sebagian besar Penderita ODGJ tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK yang merupakan syarat untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) yang dapat membantu dalam pelayanan pengobatan dan rujukan. Solusinya adalah berkoordinasi dengan perangkat Desa setempat terkait data pasien tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk pemecahan masalah tersebut.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC

Pernyataan standarnya yaitu semua orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksanaan penunjang, dan edukasi.

Capaian SPM pelayanan kesehatan orang dengan TBC yaitu 42,48%, dengan permasalahan dan solusinya yaitu:

a. Pada bulan Juni tahun 2021 instruksi dari Subdit TBC Kemenkes bahwa semua tindakan pemeriksaan TBC wajib di Fasilitas Tes Cepat Mulekuler (TCM), di Kabupaten Rote Ndao hanya tersedia 1 alat TCM yaitu di RSUD Ba'a sehingga menyulitkan bagi Puskesmas yang sulit aksesnya ke RSUD Ba'a. Solusinya penambahan alat TCM dan pemberlakuan pemeriksaan menggunakan mikroskop bagi Puskesmas yang memiliki akses sulit;
b. Banyak sasaran/masyarakat yang secara klinis menujukkan gejala sebagai teduga TBC namun tidak bisa mengeluarkan dahak secara sempurna solusinya petugas kesehatan beberapa kali berkunjung memberikan edukasi dan menitipkan pot dahak; dan
c. Pencatatan/pelaporan melalui SITB online bagi semua Fasyankes belum makasimal sehingga semua pelaporan belum akurat dan valid, solusinya koordinasi dan pembinaan secara terintegrasi tentang pencatatan dan pelaporan di tingkat Fasyankes.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pernyataan standarnya yaitu setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining.

Capaian SPM pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV yaitu 143,85%, dengan gambaran sebagai berikut:

a. Semua fasilitas pelayanan kesehatan telah menjadi layanan tes HIV;
b. Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan berbagai upaya dilakukan oleh masing-masing layanan dengan melakukan deteksi dini HIV AIDS pada populasi beresiko di desa;
c. Bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dan Klinik VCT RSUD Ba'a melalui kegiatan mobile VCT di desa;
d. Melakukan deteksi dini pada semua Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas III Ba'a;
e. Melakukan notifikasi pasangan; dan

f. Melakukan deteksi dini pada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka memperingati Hari AIDS.

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelaynan Minimal (SPM) yang kemudian menjadi rujukan untuk ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, ditetapkan 2 Jenis layanan dasar sebagaimana pada tabel 4.9. berikut:

Tabel 4.9.

Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kab. Rote Ndao Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar		Penerima Pelayanan
		Kuantitas	Kualitas	
1	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antaralain : 1) Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. 2) Berwarna: air minum terlihat berwana seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. 3) Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air	Diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar		Penerima Pelayanan
		Kuantitas	Kualitas	
			4) Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. 5) Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik	1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.	Setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air

Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun target dan perhitungan pembiayaan SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tabel 4.10. berikut:

Tabel 4.10.

Target Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target s/d 2024		Pembiayaan Tahun 2021 (Rp)
		Nasional (%)	Kabupaten (%)	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	2.090.000.000
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	100	1.698.420.000

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018

C. Realisasi

Adapun realisasi Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum tahun 2021, pada tabel 4.11. berikut:

Tabel 4.11.

Hasil Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN/ INDIKATOR			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN SPM					Hasil	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*					*7*	*8*	*9*	*10*
I	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari						X	/	Y	x	%				
		X	Jumlah kumulatif rumah tangga terlayani dalam sebuah kabupaten/kota	Tersedianya akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan	100	Setiap Tahun	26.909	/		X	100	71,23%	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.090.000.000	DAU
		Y	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut		100	Setiap Tahun			37.778				Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dan prasarana air minum bagi masyarakat		

II	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik						X	/	Y	x	%				
		X	Jumlah kumulatif rumah tangga terlayani pelayanan pengolahan air limbah domestik dalam sebuah kabupaten/kota	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	100	Setiap Tahun	28.733	/		X	100	76,06 %	Program : pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1.698.420.000	DAK
		Y	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut		100	Setiap Tahun			37.778				Kegiatan : koordinasi dan monitoring kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		

Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

D. Alokasi Anggaran

Adapun anggaran yang mendukung pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, pada tabel 4.12. berikut:

Tabel 4.12.

Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Program	Indikator	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.090.000.000	DAU
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1.698.420.000	DAK
	Total		**3.788.420.000**	

Sumber : Anggaran DAU & DAK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

E. Dukungan Personil

Adapun jumlah dukungan personil dalam pemenuhan pelayanan dasar pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, pada tabel 4.13. berikut:

Tabel 4.13.

Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil	
			PNS	NON PNS
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Tersedianya akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan	8 PNS	Kontraktor pengerjaan pembangunan
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	8 PNS	6 Tenaga Fasilitator

Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

F. Permasalahan dan Solusi

Adapun Kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Bidang Urusan Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal dan solusi yang dilakukan oleh Bidang Urusan Pekerjaan Umum dalam penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut:

* **Permasalahan**

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2021 di Kabupaten Rote Ndao jika dilihat dari realisasi / persentase capaian pada tabel 2.3 maka dapat disimpulkan bahwa hampir semua indikator Belum mencapai target yang ditetapkan, baik itu target kabupaten maupun target nasional. Hal ini terjadi karena indikator pelayanan yang dipakai sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor : 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keterbatasan Anggaran juga merupakan satu permasalahan yang di hadapi oleh dinas PUPR dalam mengejar target sesuai dengan target Kabupaten (Target RPJMD) dan taget Nasional

* **Solusi**

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2021 telah tercapai tagetnya sesuai dengan target RPJMD tahun Anggaran 2021 yang targetnya 79,29 % dan realisasi 79,49%, namun capaian Akhir RPJMD dan Target Nasional 100% akan di optimalkan sampai dengan target tahun akhir RPJMD dan RPJMN;dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2021 telah tercapai tagetnya sesuai dengan target RPJMD tahun Anggaran 2021 yang targetnya 79,36 % dan realisasi 79,92%, namun capaian Akhir RPJMD dan Target Nasional 100% akan di optimalkan sampai dengan target tahun akhir RPJMD dan RPJMN.

Dalam upaya untuk mencapai target dan permasalahan anggaran dinas PUPR sedang mengupayakan untuk mendapatkan Anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Proposal Bantuan Dana Dari Kementrian PUPR, Dalam pelaksanaan serta pencapaian realisasi fisik untuk mancapai target 100% perlu adanya kerja sama yang baik antara fasilitator, kontraktor serta pihak dari dinas dalam pengerjaan pembangunan.

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelaynan Minimal (SPM) yang kemudian menjadi rujukan untuk ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, ditetapkan 2 Jenis layanan dasar sebagaimana pada tabel 4.14. berikut:

Tabel 4.14.
Jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar		Penerima Pelayanan
		Standar Jumlah	Kualitas Pelayanan Dasar	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana. 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana. 3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana. 4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah. b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. c) Tidak memiliki aset bangunan lain. d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani	1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan 2) Subsidi Uang Sewa 3) Penyediaan Rumah Layak Huni	a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta; b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai; c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat, maka dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021, pada tabel 4.15. berikut:

Tabel 4.15.

Target Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target s/d 2024		Pembiayaan Tahun 2021 (Rp)
		Nasional (%)	Kabupaten (%)	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	95.200.000,00
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	-

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018

C. Realisasi

Adapun realisasi Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2021, pada tabel 4.16. berikut:

Tabel 4.16.

Hasil Capaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN/ INDIKATOR			INDIKATOR	TARGET CAPAIAN (%)	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN SPM					Hasil	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	*2*			*3*	*4*	*5*	*6*					*7*	*8*	*9*	*10*
I	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota						X	/	Y	x	%				
		X.	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N	Tersedianya jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N	100	Setiap Tahun	2	/		x	100	100%	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	95.200.000	DAU
		Y.	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N		100	Setiap Tahun		/	2	x	100	100%	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	95.200.000	DAU

II	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota						X	/	Y	x	%					
		X.	Jumlah unit rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kab Kota yang ditangani pada tahun N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Y.	Jumlah total rencana rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kab Kota yang ditangani pada tahun N	-	-	-	-		-				-			

Sumber : Data Dinas Perkim dan LH Tahun 2021

D. Alokasi Anggaran

Adapun anggaran yang mendukung pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, pada tabel 4.17. berikut:

Tabel 4.17.

Alokasi Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N 2. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N	95.200.000,00	DAU

Sumber : Anggaran DAU Tahun 2021

E. Dukungan Personil

Adapun jumlah dukungan personil dalam pemenuhan pelayanan dasar pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, pada tabel 4.18. berikut:

Tabel 4.18.

Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	Jumlah & Satuan
1	PNS	4 orang
2	Fasilitator	2 orang
	Total	**6 orang**

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

F. Permasalahan dan Solusi

Penerapan SPM Bidang perumahan tahun 2021 di Kabupaten Rote Ndao jika dilihat dari realisasi/persentase capaian pada tabel 2.3 maka dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator telah mencapai target yang ditetapkan, baik itu target kabupaten maupun target nasional. Hal ini terjadi karena indikator pelayanan yang dipakai sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

nomor : 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana;dan
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan di lapangan terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana terdapat beberapa data berdasarkan bencana yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao pada Bulan April 2021 yang dikenal dengan Bencana Alam akibat Siklon Tropis yang disebut Seroja.

Berdasarkan Kajian Kebutuhan Usulan Kegiatan Perbaikan Rumah Warga Pasca Bencana Alam Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim, Banjir dan Longsor di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 660/81/DPKPLH2.2, data yang didapat antara lain:

No	Kondisi	Unit	Total Kerugian (Rp)
1	Rusak Berat	153	1.635.187.500
2	Rusak Sedang	836	4.221.000.000
3	Rusak Ringan	8.071	22.699.687.500

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ada 9.060 Unit rumah yang terkena dampak bencana alam siklon tropis seroja, sementara yang ditangani oleh bidang perumahan hanya 2 Unit, hal ini terjadi karena anggaran yang tersedia hanya cukup untuk 2 unit tersebut. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan pelayanan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah untuk wilayah Kabupaten Rote Ndao, belum ada Program / Kegiatan terkait hal tersebut dikarenakan belum adanya angggaran untuk melakukan pembangunan.

Solusi atas masalah yang terjadi adalah memberikan tambahan anggaran untuk rekonstruksi bencana untuk memberikan hasil optimal

bagi pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana alam agar semua masyarakat yang terkena dampak dapat merasakan bantuan secara merata dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

4.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rote Ndao terdapat 5 (lima) jenis Pelayanan Dasar yaitu:

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Jenis Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao memiliki kewenangan melaksanakan 2 (dua) yaitu :

- Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Jenis Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan 3 (tiga) yaitu:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

(Trantibumlinmas) telah ditetapkan Indikator Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Pencapaian.

Adapun Indikator Pencapaian, Target Capaian dan batas Waktu Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk dilaksanakan pada Tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel 4.19. berikut:

Tabel 4.19.

Target Capaian SPM Bidang Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Pembiayaan Tahun 2021 (Rp)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	19.999.890
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	100%	315.114.800
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	100%	199.999.000
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	95.000.000
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	19.999.980

Sumber : Data OPD Tahun 2021

C. Realisasi

Adapun Capaian pada SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021, dapat dilihat pada table 4.20. berikut:

Tabel 4.20.

Capaian Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian (n-1)			Capaian (n)			Target Capaian	Keterangan
		Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)		
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44	37	84,09	44	37	84,09	100%	Belum Berhasil
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	3.000	3.000	100	2.500	2.500	100	100%	Berhasil
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.029	1.029	100	500	500	100	100%	Berhasil
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.029	1.029	100	50	50	100	100%	Berhasil
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	10	20	200	3	3	100	100%	Berhasil

Sumber : Data OPD Tahun 2021

D. Alokasi Anggaran

Adapun anggaran pada SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021, dapat dilihat pada table 4.21. berikut:

Tabel 4.21.

Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada	19.999.890	DAU
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	315.114.800	DAU
3	Pelayanan	Jumlah warga Negara yang	199.999.000	DAU

	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana		
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	95.000.000	DAU
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	19.999.980	DAU

Sumber : Data OPD Tahun 2021

E. Dukungan Personil

Adapun jumlah dukungan personil dalam pemenuhan pelayanan dasar pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021, pada tabel 4.22. berikut:

Tabel 4.22.
Dukungan Personil SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil	
			PNS	NON PNS
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada	1 orang PPNS, 1 orang Petugas Penyuluh dan 12 Orang Anggota Pol.PP	-
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	9	17 TRC & 1 Tenaga Administrasi
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	9	17 TRC & 1 Tenaga Administrasi
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9	17 TRC & 1 Tenaga Administrasi
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1 Orang Komandan Damkar	-

Sumber : Data OPD Tahun 2021

F. Permasalahan dan Solusi

Adapun Kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal dan solusi yang dilakukan oleh Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut yaitu:

a. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP)

1) Kendala dan Permasalahan pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Warga Negara yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada masih hanya sebatas pada pelayanan kepada Warga masyarakat dan/atau Badan Hukum di Kabupaten Rote Ndao yang terkena dampak akibat tidak memiliki ijin usaha baik Ijin Usaha Tempat, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Hotel dan Pemondokan sehingga diarahkan untuk mengurus ijin Usaha dimaksud yang langsung ditangani oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengurusan ijin usaha;

2) Solusi pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Turut membantu pelaku usaha untuk mendapatkan ijin usaha.

b. Bidang Urusan Perlindungan Masyarakat (BPBD)

1) Kendala dan Permasalahan

   Terbatasnya tenaga TRC dan sarana prasarana yang ada sehingga tidak bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di daerah yang terkena dampak bencana secara cepat.

2) Solusi

   Adanya penambahan tenaga TRC dan sarana prasarana untuk mendukung operasional dilapangan dalam menghadapi situasi dan kondisi bencana pada wilayah yang sulit di jangkau.

4.6 Bidang Urusan Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial, maka ditetapkan 2 (Dua) indikator pelayanan dasar yaitu bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Bantuan Jaminan Sosial pada bidang urusan sosial tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Jenis pelayanan dasar, yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota.

Adapun penjabaran dari 2 (Dua) indikator pelayanan dasar yaitu bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Bidang Bantuan Jaminan Sosial pada tabel 4.23. berikut:

Tabel 4.23.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

No	Jenis pelayanan dasar	Mutu Pelayanan Dasar		Penerima Pelayanan
		Standar Jumlah	Kualitas Pelayanan Dasar	
1	Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial: 1. Penyandang Disabilitas Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Lanjut Usia Terlantar 4. Gelandangan 5. Pengemis	Setiap Orang Yang Dikategorikan Dengan Jenis Masalah Sosial Yang Di Alami (Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis)	Rehabilitasi bagi jenis masalah sosial yang di alami (Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis)	a) Pemberian bantuan logistik bagi para penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan korban bencana alam dan bencana sosial b) Pendampingan dan home visit bagi anak terlantar

2	Bidang Bantuan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial: 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Setiap orang yang mengalami bencana alam dan bencana social	Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban bencana alam dan bencana sosial	c) Bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan bencana sosial d) Komda lanjut usia dan pendampingan anak

Sumber : Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana pada tabel 4.24. berikut:

Tabel 4.24.

Target Pencapaian Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Presentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Presentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Presentase (%)Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Presentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	Presentase (%) Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

C. Realisasi

Realisasi dan target yang ditetapkan terhadap capaian pelayanan dasar SPM pada Bidang Urusan Sosial Tahun 2021, pada tabel 4.25. berikut:

Tabel 4.25.

Capaian Pelayana Dasar Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian (n-1)			Capaian (n)			Target Capaian	Ket
			Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	Presentase (%)Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	509	100	19,64	509	210	41,25	100%	Belum Berhasil
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Presentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	319	15	4,70	349	37	10,60	100%	Belum Berhasil
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Presentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2.301	250	10,86	2.301	150	6,51	100%	Belum Berhasil
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Presentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	-	-	-	-	-	-	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/ Kota	Presentase (%) Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/ Kota	10.500	10.600	100,95	10.500	9.607	100,95	100%	Berhasil

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial Kab. Rote Ndao Tahun 2021

D. Alokasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021, maka alokasi anggaran guna mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 beserta realisasi anggarannya pada tabel 4.26. berikut:

Tabel 4.26.

Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Anggaran
I	**Program Rehabilitasi Sosial** 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti social	**Rp. 346.450.600**
	a. Penyediaan Alat Bantu	Rp. 346.450.600
	2. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	**Rp. 15.000.000**
	a. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Rp. 15.000.000
II	**Program Penanganan Bencana**	**Rp. 281.552.000**
	a. Penyediaan Makanan	Rp. 281.552.000
	Total	**Rp. 643.002.600**

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial Kab. Rote Ndao Tahun 2021

E. Dukungan Personil

Ketersediaan SDM turut mempengaruhi capaian pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial. Kondisi pegawai yang relatif terbatas yang secara kualitas atau kemampuan belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada. Hal ini terlihat dengan masih sangat kurangnya tenaga – tenaga ahli sosial atau pekerja sosial.

Adapun gambaran dari SDM dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif membantu memberikan pelayanan dasar Bidang Urusan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dapat dilihat pada tabel 4.27. dan tabel 4.28. berikut :

Tabel 4.27.

Kondisi Pegawai berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2021

No	Uraian	Es.II	Es.III	Es.IV	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	4	8
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	1	1	2	4
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	1	-	1	2
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	1	2	1	4
6	Bidang Penanganan Fakir Miskin	-	1	2	1	4
	Total	**1**	**5**	**8**	**9**	**23**

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Tabel 4.28.

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2021

No	Jumlah PSKS	Jumlah Populasi (Orang)
1	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30
2	Karang Taruna	22
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10
4	SDM PKH	43
5	Pekerja Sosial	1
6	Lembaga kesejahteraan Sosial Anak	2
7	Organisasi Sosial	1

Sumber : Data Olahan Dinas Sosial Kab. Rote Ndao Tahun 2021

F. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Bidang Urusan Sosial dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal dan solusi yang dilakukan oleh Bidang Urusan Sosial dalam penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut yaitu:

a. Sumber daya manusia yang masih kurang dimana pegawai yang berpendidikan khusus bidang sosial terbatas;
b. Sarana dan prasarana kantor yang belum lengkap dan mendukung kinerja pelayanan seperti rumah shelter dan lain sebagainya;

c. Alokasi anggaran khusus penerapan dan pencapaian SPM belum dianggarkan;
d. Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
e. Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang masih sangat terbatas guna mendukung upaya penerapan SPM terkait pelayanan terhadap masyarakat;
f. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
g. Belum adanya kerjasama yang relevan antara instansi terkait dan dunia usaha dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Permasalahan yang terjadi diperlukan solusi dan penanganan yang signifikan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang urusan Soaial yaitu:

a. Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Rote Ndao berupa alokasi anggaran khusus penerapan dan penacapaian SPM Bidang Sosial;
b. Adanya dukungan pemerintah pusat dan Provinsi dalam upaya mendukung penerapan SPM di Kabupaten Rote Ndao berupa bantuan sosial; dan
c. Adanya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan dinas terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan SPM.

4.7 Program dan Kegiatan

A. Bidang Urusan Pendidikan

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun program dan kegiatan dalam penerapan dan pencapaian pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan pada tabel 4.29 berikut:

Tabel 4.29
Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
Tahun 2021

No	Indikator SPM	Program	Kegiatan
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2	Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3	Pendidikan Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Sumber : Data Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2021

B. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun program dan kegiatan dalam penerapan dan pencapaian pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Kesehatan pada tabel 4.30 berikut:

Tabel 4.30
Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Obat, Vaksin
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Operasional Pelayanan Puskesmas

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2021

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor : 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun program dan kegiatan dalam penerapan dan pencapaian pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tabel 4.31. berikut:

Tabel 4.31.
Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Kegiatan
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Tersedianya akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Data Dinas PUPR Kab. Rote Ndao Tahun 2021

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor : 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun program dan kegiatan dalam penerapan dan pencapaian pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada tabel 4.32. berikut:

Tabel 4.32.
Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jenis Pelayanan Dasar
1	Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Sumber : Data Dinas Perkim dan LH Kab. Rote Ndao Tahun 2021

E. Bidang Urusan Trantibumlinmas

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rote Ndao terdapat 5 (lima) jenis Pelayanan Dasar, pada tabel 4.33. berikut:

Tabel 4.33.

Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021

NO	Program	Kegiatan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada

NO	Program	Kegiatan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
2	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana
3	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
4	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Sumber : Data Satpol PP dan BPBD Kab. Rote Ndao Tahun 2021

F. Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial. Adapun program dan kegiatan dalam penerapan dan pencapaian pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada tabel 4.34 berikut:

Tabel 4.34
Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Indikator
I	**Rehabilitasi Sosial** Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti social	Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas terlantar
	3. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Terlaksananya pelayanan, pendampingan dan rehabilitasi psikososial bagi PMKS non HIV/AIDS dan NAPZA
	b. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Terbimbingnya klien secara fisik, mental, spiritual dan sosial
II	**Penanganan Bencana**	
	b. Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan dan rehabilitasi social

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Rote Ndao Tahun 2021

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi tugas dan kewenangan. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah melaksanakan 24 (dua puluh empat) urusan wajib, 6 (enam) urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum (Kesbangpol) serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaran tugas umum pemerintahan melalui beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, banyak keberhasilan pembangunan yang dicapai pada tahun 2021, namun demikian masih adanya hambatan yang dihadapi dan karena itu dilakukan pembenahan melalui berbagai kebijakan dalam rangka pencapaian dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat secara optimal. Kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka pembinaan dan penataan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat kearah yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan amanat rakyat dan terus membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ba'a, Maret 2022

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU, SE

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1. IKK Outcome : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD						
1.	**Pendidikan**	**1.**	Mengukur Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ---------- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan 2909 ---------- x 100% 5.359	**54,28%**	**Dinas PKO**

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1) Jumlah Satuan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	26	**Dinas PKO**
	2) Jumlah peseta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	**Dinas PKO**
	3) Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	**Dinas PKO**
	4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	120	**Dinas PKO**
	5) Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	52	**Dinas PKO**
	6) Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	72	**Dinas PKO**

		7)	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	40	**Dinas PKO**	
2. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar						
1.	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan 3.263 ---------- x 100% 19.573	**16,67%**	**Dinas PKO**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	97	**Dinas PKO**
	2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7.100	**Dinas PKO**
	3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.010	**Dinas PKO**
	4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	**Dinas PKO**
	5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	**Dinas PKO**

	6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	483	**Dinas PKO**
	7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	370	**Dinas PKO**
	8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	940	**Dinas PKO**
	9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	380	**Dinas PKO**
	10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	137	**Dinas PKO**
	11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	31	**Dinas PKO**
	12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3	**Dinas PKO**
	13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	14	**Dinas PKO**
	14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 732 orang Swasta : 71 Sertifikat Pendidik Negeri : 418 orang Swasta : 43	**Dinas PKO**
	15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 361 orang Swasta : 2 Sertifikat Pendidik Negeri : 204 orang Swasta : 2	**Dinas PKO**
	16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 119 orang Swasta : 19 Sertifikat Pendidik Negeri : 107 orang Swasta : 14 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 81 orang	**Dinas PKO**

				Swasta : 11		
		17)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 39 orang Swasta : 1 Sertifikat Pendidik Negeri : 35 orang Swasta : 1 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 32 orang Swasta : 1	**Dinas PKO**	
		18)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Negeri : 2 orang Swasta : -	**Dinas PKO**	
		19)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Negeri : 11 orang Swasta : -	**Dinas PKO**	
3. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama						
1.	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ---------- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan 3.401 ---------- x 100% 40.309	**8,43%**	**Dinas PKO**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama		1)	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD Negeri : Akreditasi A : 6 Sekolah Akreditasi B : 52 Sekolah Akreditasi C : 59 Sekolah	**Dinas PKO**	

		SMP Negeri : Akreditasi A : 3 Sekolah Akreditasi B : 24 Sekolah Akreditasi C : 12 Sekolah	
	2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	7.100	**Dinas PKO**
	3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.010	**Dinas PKO**
	4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	**Dinas PKO**
	5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	**Dinas PKO**
	6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Negeri : 407 orang Swasta : 76 orang	**Dinas PKO**
	7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 370 orang Swasta : -	**Dinas PKO**
	8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	940 orang	**Dinas PKO**
	9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri 378 orang Swasta : 2 orang	**Dinas PKO**
	10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Negeri 118 orang Swasta : 19 orang	**Dinas PKO**
	11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 31 orang Swasta : -	**Dinas PKO**
	12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Negeri : 3 orang Swasta : -	**Dinas PKO**
	13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Negeri : 14 orang Swasta : -	**Dinas PKO**
	14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 732 orang Swasta : 71 Sertifikat Pendidik Negeri : 418 orang Swasta : 43	**Dinas PKO**

			15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Negeri : 361 orang Swasta : 2 Sertifikat Pendidik Negeri : 204 orang Swasta : 2	**Dinas PKO**	
			16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 119 orang Swasta : 19 Sertifikat Pendidik Negeri : 107 orang Swasta : 14 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 81 orang Swasta : 11	**Dinas PKO**	
			17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Negeri : 39 orang Swasta : 1 Sertifikat Pendidik Negeri : 35 orang Swasta : 1 Sertifikat Calon Kepala Sekolah Negeri : 32 orang Swasta : 1	**Dinas PKO**	
			18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Negeri : 2 orang Swasta : -	**Dinas PKO**	
			19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Negeri : 11 orang Swasta : -	**Dinas PKO**	
4. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
1.	Pendidikan	1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	**50,50**	**Dinas PKO**

				100 ---------- x 100% 198		

IKK OUTPUT			
IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Negeri : - Swasta 1	**Dinas PKO**
	2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	**Dinas PKO**
	3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	**Dinas PKO**
	4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Negeri 10 Orang Swasta : -	**Dinas PKO**
	5) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Negeri : 14 orang Swasta : 41	**Dinas PKO**
	6) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	49 orang	**Dinas PKO**
	7) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	**Dinas PKO**
	8) Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Negeri 1 orang Swasta : 3 orang	**Dinas PKO**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5. IKK Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan						
2.	Kesehatan	1	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ---------- x 100 % Jumlah pendudukan di Kabupaten 100 ---------- x 100% 149.007	**54,28%**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan		1) Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		1 RS	**Dinas Kesehatan**	
6. IKK Outcome : Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi						
2.	Kesehatan	1	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten 1 --------- x 100% 1	**100%**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi		1) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		1 RS	**Dinas Kesehatan**	

7. IKK Outcome : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil						
2.	Kesehatan	1	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ---------- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten 2.563 ---------- x 100 % 3.353	**76,44%**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		12 Paket ANC	**Dinas Kesehatan**	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		189 Bidan	**Dinas Kesehatan**	
8. IKK Outcome : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan						
2.	Kesehatan	1	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ---------- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten 2.491 ---------- x 100 % 3.200	**77,84%**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		12 Paket Alat Partus	**Dinas Kesehatan**	

		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	189 Bidan	**Dinas Kesehatan**	
9. IKK Outcome : Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						
2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir ---------- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten 2.598 ---------- x 100 % 3.048	**85,37%**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3048 Amp Vit K Inj. 3048 uniject Vaksin HBO	**Dinas Kesehatan**	
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	189 Bidan	**Dinas Kesehatan**	
10. IKK Outcome : Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar						
2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten 11.191 ---------- x 100 % 14.111	**79,31%**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		54 Paket	**Dinas Kesehatan**	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		10 Orang	**Dinas Kesehatan**	
11. IKK Outcome : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten 26.607 ---------- x 100 % 29.456	**90,32%**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		12 Paket	**Dinas Kesehatan**	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		60 Orang	**Dinas Kesehatan**	
12. IKK Outcome : Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten 39.514 ---------- x 100 % 82. 955	**47,63%**	**Dinas Kesehatan**

IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Kit Posbindu = 100 Stik Gula = 39.514	**Dinas Kesehatan**	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		47 Orang	**Dinas Kesehatan**	
13. IKK Outcome : Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten 1.706 ---------- x 100 % 14.636	**11,66**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		12 KIT Lansia BMHP	**Dinas Kesehatan**	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		60 Nakes	**Dinas Kesehatan**	
14. IKK Outcome : Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas di	**18,49**	**Dinas Kesehatan**

				Kabupaten 3.990 ---------- x 100 % 21.577		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase penderita hipertensi yang		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Tensimeter Digital = 100	**Dinas Kesehatan**	
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		24 Orang	**Dinas Kesehatan**	
15. IKK Outcome : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten 400 ---------- x 100 % 1.317	**30,37**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Alat Pemeriksaan Gula Darah = 50 Stik Gula = 39.514	**Dinas Kesehatan**	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		24 Orang	**Dinas Kesehatan**	
16. IKK Outcome : Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar						

2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten 173.306 ---------- x 100 % 306	**56,53**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Amitriphilin 25 mg (HCl) 1.070 Tab Carbamazepine 200 mg 6.592 Tab Chlorpromazin HCl 100 mg 29.750 Tab Clobamazam tab. 10 mg 5.000 Tab Diazepam tab. 5 mg 11.570 Tab Diazepam 5 mg/ml Inj. 310 Amp Haloperidol tab 5 mg 26.330 Tab Haloperidol Decanoat 50 Inj 297 Amp Phenobarbital Tab 30 mg 9.710 Tab Risperidon tab 2 mg 36.845 Tab Triheksifenidil tab. 2 mg 35.760 Tab	**Dinas Kesehatan**	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		21 Dokter 33 Perawat	**Dinas Kesehatan**	
17. IKK Outcome : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar						
2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah penderitaTBC di Kabupaten 1.014	**42,48%**	**Dinas Kesehatan**

				---------- x 100 % 2.387		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		OAT KAT I : 187 Paket OAT KAT II : 0 Paket OAT ANAK : 7 Paket OAT KAT.I Combipak : 9 Paket ZN .: 45 Paket Sputum Pot Dahak : 500 Pot	**Dinas Kesehatan**	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dokter : 2 Perawat : 12 ATLM : 8	**Dinas Kesehatan**	
18. IKK Outcome : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
2.	Kesehatan	1	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten 5.600 ---------- x 100 % 3.893	**143,85%**	**Dinas Kesehatan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		R1 = 4500 R2 = 225 R3 = 125 ARV = 14 Botol	**Dinas Kesehatan**	
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		50 orang	**Dinas Kesehatan**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
19. IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten						
3.	Pekerjaan Umum	1	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenganan Kabupaten (ha) 0	0	**Dinas PUPR**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	0	**Dinas PUPR**
	2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	0	**Dinas PUPR**
	3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	0	**Dinas PUPR**
	4) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	0	**Dinas PUPR**
	5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	0	**Dinas PUPR**
	6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	0	**Dinas PUPR**
	7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	0	**Dinas PUPR**

20. IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten						
3.	Pekerjaan Umum	1	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenganan Kabupaten (m) 0	0	**Dinas PUPR**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	0	**Dinas PUPR**
	2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	0	**Dinas PUPR**
	3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	0	**Dinas PUPR**
	4) Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	0	**Dinas PUPR**
	5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	0	**Dinas PUPR**
	6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	0	**Dinas PUPR**
	7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	0	**Dinas PUPR**
21. IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi			

3.	Pekerjaan Umum	1	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) ---------- x 100 % Luas irigasi kewenangan kabupaten (ha) 425 ----------x 100% 14.455	**2,94%**	**Dinas PUPR**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	120 ----------x 100%= 0,31% 38.502,52	**Dinas PUPR**
	2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	4.602,31 ----------x 100%= 13,26% 34.708,33	**Dinas PUPR**
	3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	**Dinas PUPR**

22. IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

3.	Pekerjaan Umum	1	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten ---------- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten 26.909 ---------- x 100% = 71,23% 37.778		**Dinas PUPR**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten	Ada	**Dinas PUPR**
terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten	Ada	**Dinas PUPR**
	3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten penyelenggaran SPAM	1 BUMD	**Dinas PUPR**
	4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	**Dinas PUPR**
	5) Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	5	**Dinas PUPR**

23. IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

3.	Pekerjaan Umum	1	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ---------- x 100 % Jumlah rumah di kabupaten 28.733 ----------x100%= 86,71% 33.135		**Dinas PUPR**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	**Dinas PUPR**
	2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	**Dinas PUPR**
	3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	**Dinas PUPR**
	4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	**Dinas PUPR**
	5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	**Dinas PUPR**
	6) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	**Dinas PUPR**
	7) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	**Dinas PUPR**
	8) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	**Dinas PUPR**
	9) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	**Dinas PUPR**
	10) Kinerha penyediaan unit pengolahan setempat	0	**Dinas PUPR**
	11) Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	**Dinas PUPR**
	12) Kinerja penyediaan prasarana pengangkutan lumpur tinja	0	**Dinas PUPR**
	13) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	**Dinas PUPR**
	14) Kinerja penyampaian jasa penyedotan lumpur tinja	0	**Dinas PUPR**
24. IKK Outcome : Rasio kepatuhan IMB kabupaten			

3.	Pekerjaan Umum	1	Mengukur rasio kepatuhan IMB kabupaten	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ---------- x 100 % Jumlah IMB yang berlaku 207 ---------- x 100% 207	**100%**	**Dinas PM dan PTSP**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Rasio kepatuhan IMB kabupaten	1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	1.270 ---------- x 100% = 100% 1. 270	**BKA**
	2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam tahun eksisting	207 IMB	
	3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	**Dinas PUPR**
	4) Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ADA	**Dinas PUPR**
	5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	3	**Budpar**
	6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	**BKA**
	7) Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten	1419	**BKA**
	8) Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kabupaten yang dipelihara/ dirawat	1419	**BKA**

25. IKK Outcome : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten

3.	Pekerjaan Umum	1	Mengukur tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap ---------- x 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten 28.010 ---------- x 100% 459.833	**6,09%**	**Dinas PUPR**

IKK OUTPUT			
IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	495,833 Km	**Dinas PUPR**
	2) Panjang jalan yang dibangun	0	**Dinas PUPR**
	3) Panjang jembatan yg dibangun	11 Meter	**Dinas PUPR**
	4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	29,497 Km	**Dinas PUPR**
	5) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	**Dinas PUPR**
	6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	1,28 Km	**Dinas PUPR**
	7) Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	**Dinas PUPR**
	8) Panjang jalan yang dipelihara	0,25 Km	**Dinas PUPR**
	9) Panjang jembatan yang dipelihara	0	**Dinas PUPR**

26. IKK Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

3.	Pekerjaan Umum	1	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah kanupaten yang dibutuhkan dengan sertfikat pelatihan operator dan teknis/analis ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten 120 ----------x100%= 5,22%	5,22%	**Dinas PUPR**

				2.300		

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten	1 Kali	**Dinas PUPR**
	2) Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten	120 Orang	**Dinas PUPR**
	3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kabupaten	120 Orang	**Dinas PUPR**
	4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir	0	**Dinas PUPR**
	5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten	0	**Dinas PUPR**
	6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	**Dinas PUPR**
	7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	**Dinas PUPR**
	8) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi	0	**Dinas PUPR**

	yang termutakhir secara berkala		
	9) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten	0	**Dinas PUPR**
	10) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0	**Dinas PUPR**
	11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	120	**Dinas PUPR**
	12) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten	120	**Dinas PUPR**
	13) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	0	**Dinas PUPR**
	14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	**Dinas PUPR**
	15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	**Dinas PUPR**
	16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	**Dinas PUPR**
	17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	**Dinas PUPR**

		18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten		0	**Dinas PUPR**	
		19) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten		0	**Dinas PUPR**	
		20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten		0	**Dinas PUPR**	
		21) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten		0	**Dinas PUPR**	
		22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		0	**Dinas PUPR**	
		23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	**Dinas PUPR**	
		24) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	**Dinas PUPR**	
		25) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		0	**Dinas PUPR**	
27. IKK Outcome : Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi						
3.	Pekerjaan Umum	1	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenganan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi ---------- x 100 % Jumlah total proyeksi yang menjadi kewenangn pengawasannya 62 -------- x 100% = 100% 62	**100%**	**Dinas PUPR**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
28. IKK Outcome : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten						
4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah total bencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n 2 ---------- x 100% 2	**100%**	**Dinas Perkim & LH**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	8) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	117	**Dinas Perkim & LH**
	9) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	117	**Dinas Perkim & LH**
	10) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	468	**Dinas Perkim & LH**
	11) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	**Dinas Perkim & LH**
	12) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2	**Dinas Perkim & LH**
	13) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	**Dinas Perkim & LH**
	14) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	**Dinas Perkim & LH**
	15) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	2 KK/12 Jiwa	**Dinas Perkim & LH**

		16) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		0	**Dinas Perkim & LH**	
29. IKK Outcome : Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten						
4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan 0	**0**	**Dinas Perkim & LH**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten		8) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	**Dinas Perkim & LH**	
		9) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	**Dinas Perkim & LH**	
		10) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	**Dinas Perkim & LH**	
		11) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	**Dinas Perkim & LH**	
		12) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	**Dinas Perkim & LH**	
		13) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		0	**Dinas Perkim & LH**	
30. IKK Outcome : Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani						

4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha) 0	**0**	**Dinas Perkim & LH**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	4) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	77,33	**Dinas Perkim & LH**
	5) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	**Dinas Perkim & LH**
	6) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	**Dinas Perkim & LH**

31. IKK Outcome : Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak laya huni ---------- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten 5.602 ---------- x 100% 33.135	**17,84%**	**Dinas Perkim & LH**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1) Jumlah rumah di kabupaten	33.135	**Dinas Perkim & LH**
	2) Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	0	**Dinas Perkim & LH**
	3) Jumlah rumah tidak layak huni	5.675	**Dinas Perkim & LH**
	4) Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	**Dinas Perkim & LH**
	5) Rasio rumah dan KK	39.207 ---------- x 100% 33.135 = 1,18	**Dinas Perkim & LH**

		6) Jumlah rumah pembangunan baru		1.333	**Dinas Perkim & LH**	
32. IKK Outcome : Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						
4.	Perumahan Rakyat	1	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100 % Jumlah unit rumah di kabupaten 0	**0**	**Dinas Perkim & LH**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		0	**Dinas Perkim & LH**	
		2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		0	**Dinas Perkim & LH**	
		3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		0	**Dinas Perkim & LH**	
		4) Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)		0	**Dinas Perkim & LH**	
		5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		0	**Dinas Perkim & LH**	
		6) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		0	**Dinas Perkim & LH**	
		7) Jumlah pengembang yang tersertifikasi		0	**Dinas Perkim & LH**	
		8) Jumlah pengembang yang teregistrasi		0	**Dinas Perkim & LH**	
		9) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		0	**Dinas Perkim & LH**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
33. IKK Outcome : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan						
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1.**	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah pengaduan yang ditangani ---------- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 5 ------ x 100% = 100% 5		**SATPOL PP**
IKK OUTPUT						

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten yang ditangani	5 Kasus	**SATPOL PP**
	2) Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	1.908 Orang	**SATPOL PP**
	3) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	**SATPOL PP**
	4) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 Orang	**SATPOL PP**
	5) Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	**SATPOL PP**
	6) Tersedianya sarana prasarana minimal	9 Unit	**SATPOL PP**

34. IKK Outcome : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan						
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1.**	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 3	**20%**	**SATPOL PP**

				-------- x 100% 15		
35. IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1.**	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 17.700 ---------- x 100% 149.007	**11,87%**	**BPBD**
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		0/0 x 100% = 0%	**BPBD**	
		2) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		17.700/143.764x100%= 12,311%	**BPBD**	
36. IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1.**	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2.500 ---------- x 100% 149.007	**1,50%**	**BPBD**
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		1) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		0	**BPBD**	
		2) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		0	**BPBD**	
		3) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		0	**BPBD**	
		4) Persentase warga negara yang ikut pelatihan		0	**BPBD**	
		5) Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		0	**BPBD**	

		6)	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	**BPBD**	
37. IKK Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1.**	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 0	**0**	**BPBD**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		1)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	1/1 x 100% = 100%	**BPBD**	
		2)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	1/3 x 100% = 33,33%	**BPBD**	
		3)	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	40/40 x 100% = 100%	**BPBD**	
		4)	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	2/3 x 100% = 66,66%	**BPBD**	
38. IKK Outcome : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1.**	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tangkap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ---------- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten	**90%**	**SATPOL PP**

				9 --------- x 100% = 90% 10		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		1) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten		0	**SATPOL PP**	
		2) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		0	**SATPOL PP**	
		3) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		0	**SATPOL PP**	
		4) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		0	**SATPOL PP**	
		5) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		0	**SATPOL PP**	
		6) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		0	**SATPOL PP**	
		7) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		0	**SATPOL PP**	
		8) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		0	**SATPOL PP**	
39. IKK Outcome : Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran						

5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**1.**	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 10,6 menit	**10,6 menit**	**Rata2 waktu tanggap**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
40. IKK Outcome : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)						
6.	**Sosial**	**1.**	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti ---------- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis 397 ---------- x 100% = 12,57 % 3.159	**12,57%**	**Dinas Sosial**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2 Aplikasi	**Dinas Sosial**
	8) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	**Dinas Sosial**
	9) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	**Dinas Sosial**
	10) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	397 Orang	**Dinas Sosial**
	11) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 Kendaraan	**Dinas Sosial**
	12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	348 Orang	**Dinas Sosial**

	menerima paket permakanan sesuai standar gizi		
	13) Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	**Dinas Sosial**
	14) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	6 Orang	**Dinas Sosial**
	15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	170 Orang	**Dinas Sosial**
	16) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	**Dinas Sosial**
	17) Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	**Dinas Sosial**
	18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	**Dinas Sosial**
	19) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	**Dinas Sosial**
	20) Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	54 Orang	**Dinas Sosial**
	21) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	0	**Dinas Sosial**
	22) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1	**Dinas Sosial**
	23) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	**Dinas Sosial**

		24) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		0	**Dinas Sosial**
		25) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		0	**Dinas Sosial**
		26) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		0	**Dinas Sosial**
		27) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		0	**Dinas Sosial**
41. IKK Outcome : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten					
6.	**Sosial**	**1.**	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 (satu) tahun anggaran ---------- x 100 % Populasi korban bencana alam dan social di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social 9.607 ---------- x 100% = 100% 10.500	**100%**	**Dinas Sosial**
IKK OUTPUT					
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**
persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		1) Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		9.603 KK	**Dinas Sosial**
		2) Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		0	**Dinas Sosial**
		3) Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		0	**Dinas Sosial**
		4) Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		0	**Dinas Sosial**

	5) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	**Dinas Sosial**
	6) Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	30 Orang	**Dinas Sosial**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
42. IKK Outcome : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja						
7.	**Ketenagakerjaan**	**1.**	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ---------- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten 1 ---------- x 100 % 1	**100%**	**Dinas Transnaker**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		28) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten		0	**Dinas Transnaker**	
		29) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		0	**Dinas Transnaker**	
		30) Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten		0	**Dinas Transnaker**	
43. IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi						
7.	**Ketenagakerjaan**	**1.**	Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan 93 ---------- x 100 %	**6,93%**	**Dinas Transnaker**

				1.342		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		1) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		0	**Dinas Transnaker**	
		2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		0	**Dinas Transnaker**	
		3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		1/10 x 100% = 0,01%	**Dinas Transnaker**	
		4) Persentase LPK yang terakreditasi		2/5 x 100% = 0,4%	**Dinas Transnaker**	
		5) Persentase LPK yang memiliki perizinan		5/5 x 100% = 100%	**Dinas Transnaker**	
		6) Jumlah penganggur yang dilatih		10 Orang	**Dinas Transnaker**	
		7) Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan		10/10 x 100% = 100%	**Dinas Transnaker**	
		8) Presentase penyerapan lulusan		0	**Dinas Transnaker**	
		9) Lulusan bersertifikat kompetensi		10	**Dinas Transnaker**	
		10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan		0	**Dinas Transnaker**	
		11) Jumlah Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		0	**Dinas Transnaker**	
44. IKK Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja						
7.	**Ketenagakerjaan**	**1.**	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja 0	**0**	**Dinas Transnaker**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Tingkat produktivitas		1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		2/107 x 100% = 1,86%	**Dinas Transnaker**	

tenaga kerja	2) Data tingkat produktivitas total	0	**Dinas Transnaker**

45. IKK Outcome : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

7.	**Ketenagakerjaan**	**1.**	Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100 % Jumlah perusahaan 34 ---------- x 100% 107	**31,776%**	**Dinas Transnaker**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	3/46 x 100% = 58,70%	**Dinas Transnaker**
	2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	27/3 x 100% = 133,33%	**Dinas Transnaker**
	3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	3	**Dinas Transnaker**
	4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	0	**Dinas Transnaker**
	5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	34/27x100%= 125,92%	**Dinas Transnaker**
	6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	5/107 x 100% = 4,67%	**Dinas Transnaker**

			7) Jumlah mogok kerja	0	**Dinas Transnaker**
			8) Jumlah penutupan perusahaan	1 Perusahaan	**Dinas Transnaker**
			9) Jumlah perselisihan kepentingan	0	**Dinas Transnaker**
			10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	**Dinas Transnaker**
			11) Jumlah perselisihan PHK	2 Kasus	**Dinas Transnaker**
			12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	2 Orang	**Dinas Transnaker**
			13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	4 Kasus	**Dinas Transnaker**
			14) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten yang diberdayakan	0	**Dinas Transnaker**
			15) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	4/5 x 100% = 80%	**Dinas Transnaker**
46. IKK Outcome : Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten					
7.	**Ketenagakerjaan**	**1.**	Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---------- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar 77 ---------- x 100 % 77	**100%**	**Dinas Transnaker**
IKK OUTPUT					
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten	195 Orang	**Dinas Transnaker**
	2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten	27	**Dinas Transnaker**
	3) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten	0	**Dinas Transnaker**
	4) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten	0	**Dinas Transnaker**
	5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	**Dinas Transnaker**
	6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten	4 LPTKS	**Dinas Transnaker**
	7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten	0	**Dinas Transnaker**
	8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	**Dinas Transnaker**
	9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	**Dinas Transnaker**
	10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0	**Dinas Transnaker**
	11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	**Dinas Transnaker**
	12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	**Dinas Transnaker**
	13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	**Dinas Transnaker**
	14) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0	**Dinas Transnaker**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
47. IKK Outcome : Persentase ARG pada belanja langsung APBD						
8.	**Perlindunganan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**1.**	Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ---------- x 100 % Jumlah seluruh belanja langsung di APBD 141.851.000 ---------- x 100% = 0,017% 8.161.617.150	**0,017%**	**Dinas P3AP2 KB**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD		31) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten yang telah dilatih PUG		0	**Dinas P3AP2 KB**	
		32) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten		0	**Dinas P3AP2 KB**	
48. IKK Outcome : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten						
8.	**Perlindunganan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**1.**	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi kabupaten yang didampingi ---------- x 100 % Jumlah Anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) 48 ---------- x 100% = 52.164		**Dinas P3AP2 KB**

IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten		1) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		0	**Dinas P3AP2 KB**	
		2) Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		1 Lembaga	**Dinas P3AP2 KB**	
		3) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		42 --------- x 100% = 100% 42	**Dinas P3AP2 KB**	
		4) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		1 Lembaga	**Dinas P3AP2 KB**	
		5) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab (APBD kabupaten)		1 Lembaga	**Dinas P3AP2 KB**	
49. IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)						
8.	**Perlindunganan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**1.**	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ---------- x 100 % Jumlah penduduk perempuan 45 ---------- x 100% =0,06% 74.035	**0,06%**	**Dinas P3AP2 KB**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten yang mendapatkan pelatihan		0	**Dinas P3AP2 KB**	
		2) Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih		0	**Dinas P3AP2 KB**	

	3) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	**Dinas P3AP2 KB**
	4) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	4 Lembaga	**Dinas P3AP2 KB**
	5) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2 Kebijakan	**Dinas P3AP2 KB**
	6) Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 Lemabag	**Dinas P3AP2 KB**
	7) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	45 --------- x 100% = 100% 45	**Dinas P3AP2 KB**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Kabupaten Rote Ndao

A	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
50. IKK Outcome : Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)						
9.	**Pangan**	**1.**	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten	Jumlah cadangan pangan ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan pangan 33.739 ---------- x 100 % 15.742	**214%**	**Dinas Ketahanan Pangan**
IKK OUTPUT						

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	33) Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	**Dinas Ketahanan Pangan**
	34) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	**Dinas Ketahanan Pangan**
	35) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	**Dinas Ketahanan Pangan**
	36) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	**Dinas Ketahanan Pangan**
	37) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	**Dinas Ketahanan Pangan**
	38) Tertanganinya kerawanan pangan	1	**Dinas Ketahanan Pangan**
	39) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	1	**Dinas Ketahanan Pangan**
	40) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	**Dinas Ketahanan Pangan**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
51. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
10.	**Pertanahan**	**1.**	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi ---------- x 100 % Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi 0	**0**	**Dinas PM & PTSP**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	0	**Dinas PM & PTSP**
	2) SK Bupati tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	**Dinas Perkim dan LH**
	3) SK Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan maksimum/ absentee	0	**Dinas Perkim dan LH**
	4) Dokumen Izin membuka tanah	0	**Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao**
	5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten	0	**Dinas Perkim dan LH**

52. IKK Outcome : Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum						
10.	**Pertanahan**	**1.**	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 0	**0**	**Dinas Perkim dan LH**

53. IKK Outcome : Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal						
10.	**Pertanahan**	**1.**	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi ---------- x 100 % Luas izin lokasi yang diterbitkan	**0**	**Dinas PM dan PTSP**
54. IKK Outcome : Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						
10.	**Pertanahan**	**1.**	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luas tanah yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha ---------- x 100 % Jumlah penerima tanah obyek landreform 0	**0**	**Dinas Perkim dan LH**
55. IKK Outcome : Tersedianya tanah untuk masyarakat						
10.	**Pertanahan**	**1.**	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ---------- x 100 % Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	**0**	**Dinas Perkim dan LH**
56. IKK Outcome : Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi						
10.	**Pertanahan**	**1.**	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang diangani ---------- x 100 % Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan 2 ---------- x 100 % 2	**100%**	**Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
57. IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten						
11.	**Lingkungan Hidup**	**1.**	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	71,60	**71,60**	**Dinas Perkim & LH**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		1) Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks Tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)		0	**Dinas Perkim & LH**	
58. IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten						
11.	**Lingkungan Hidup**	**1.**	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total volume sampah yang ditangani ---------- x 100 % Total volume timbunan sampah kabupaten 7,248 ---------- x 100% 13,244	54,73%	**Dinas Perkim & LH**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten		1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten		0	**Dinas Perkim & LH**	
59. IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten						

11.	**Lingkungan Hidup**	**1.**	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang nelanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten ---------- x 100 % usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 0	**0**	**Dinas Perkim & LH**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	30/30 x 100% = 100%	**Dinas Perkim & LH**
	2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	0	**Dinas Perkim & LH**
	3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten	0	**Dinas Perkim & LH**
	4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	**Dinas Perkim & LH**
	5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	**Dinas Perkim & LH**
	6) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani	2/2x100%=100%	**Dinas Perkim & LH**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
60. IKK Outcome : Perekaman KTP Elektronik						
12.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.**	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ---------- x 100 % Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas 92.470 ---------- x 100% 101.724	**90,90%**	**Dinas Dukcapil**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Perekaman KTP-el		41) Penerbitan akta perkawinan		1090/1090 x 100% = 100%	**Dinas Dukcapil**	
		42) Penerbitan akta perceraian		47/47 x 100% = 100%	**Dinas Dukcapil**	
		43) Penerbitan akta kematian		591/591 x 100% = 100%	**Dinas Dukcapil**	
		44) Penyajian data kependudukan		2/2 x 100% = 100%	**Dinas Dukcapil**	
61. IKK Outcome : Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA						
12.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.**	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ---------- x 100 % Jumlah anak usia 0-17 tahun 4.658 ---------- x 100% 50.549	**9,21%**	**Dinas Dukcapil**

62. IKK Outcome : Kepemilikan akta kelahiran						
12.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.**	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran ---------- x 100 % Jumlah anak usia 0-18 tahun 40.409 ---------- x 100 % 54.098	**74,69%**	**Dinas Dukcapil**
63. IKK Outcome : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama						
12.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.**	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama ---------- x 100 % Jumlah OPD 1 ---------- x 100% 46	**2,17%**	**Dinas Dukcapil**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
64. IKK Outcome : Persentase Pengentasan Desa Tertinggal						
13.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**1.**	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun ---------- x 100 % Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) 0	**0**	**Dinas PMD**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase pengentasan desa tertinggal		45) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		0	**Dinas PMD**	
		46) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		0	**Dinas PMD**	
		47) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		0	**Dinas PMD**	
		48) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		0	**Dinas PMD**	
65. IKK Outcome : Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri						
13.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**1.**	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun ---------- x 100 % Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)	**0**	**Dinas PMD**

				0		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**			**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase peningkatan status desa mandiri	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		0	**Dinas PMD**	
	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		0	**Dinas PMD**	
	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		0	**Dinas PMD**	
	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		0	**Dinas PMD**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
66. IKK Outcome : TFR (Angka Kelahiran Total)						
14.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**1.**	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	3,67%	**3,67%**	**Dinas P3AP2KB**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**		**KETERANGAN**
TFR (Angka Kelahiran Total)		1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		0		**Dinas P3AP2KB**
		2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		14.506		**Dinas P3AP2KB**
		3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		ASFRi = $\frac{b_i}{p^f} \times k$ 1.434 ---------- x 100% = 18,55% 7.731		**Dinas P3AP2KB**
		4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		4.320 ---------- x 100% =100% 4.320		**Dinas P3AP2KB**
		5) Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		program KKBPK adalah 57 Stakeholders		**Dinas P3AP2KB**

67. IKK Outcome : : Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)						
14.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**1.**	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	15.186 ----------x 100% = 79,05% 19.211	**79,05%**	**Dinas P3AP2KB**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1) Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	16 --------- x 100% = 100% 16	**Dinas P3AP2KB**
	2) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7.491 ---------- x 100% = 38,99 % 19.211	**Dinas P3AP2KB**
	3) Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	29 Kelompok	**Dinas P3AP2KB**
	4) Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	691 ---------- x 100% =54,28% 1.273	**Dinas P3AP2KB**

68. IKK Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)						
14.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**1.**	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need)	2.594 ----------x 100% = 13,50% 19.211	**13,50%**	**Dinas P3AP2KB**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need	1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	46 ---------- x 100% = 27,22% 169	**Dinas P3AP2KB**
	2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	8.286 ----------x100%= 82,26% 10.073	**Dinas P3AP2KB**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
69. IKK Outcome : Rasio konektivitas Kabupaten						
15.	**Perhubungan**	**1.**	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten	81,67	**81,67**	**Dinas Perhubungan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Rasio konektivitas provinsi		49) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		1/1 x 100% = 100%	**Dinas Perhubungan**	
		50) Terlaksananya pelayanan uji berkala		395/487 x 100% = 81,11%	**Dinas Perhubungan**	
		51) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		83/83 x 100% =100%	**Dinas Perhubungan**	
		52) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten		831/2.054 x 100% = 40,44%	**Dinas Perhubungan**	
70. IKK Outcome : V/C Ratio di Jalan Kabupaten						
15.	**Perhubungan**	**1.**	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten	0,32	**0,32**	**Dinas Perhubungan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
V/C Ratio di Jalan Kabupaten		1) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten		831/2.054 x 100% = 40,44%	**Dinas Perhubungan**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
71. IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						
16.	**Komunikasi dan Informatika**	**1.**	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- x 100 % Jumlah OPD 0	**0**	**Dinas KOMINFO**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		0	**Dinas KOMINFO**	
		2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		0	**Dinas KOMINFO**	
		3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		0	**Dinas KOMINFO**	
72. IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						
16.	**Komunikasi dan Informatika**	**1.**	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan intergrasi ---------- x 100 % Jumlah layanan public 0	**0**	**Dinas KOMINFO**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	0	**Dinas KOMINFO**
	2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	2/46 x 100% = 4 %	**Dinas KOMINFO**
	3) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	19/46 x 100% = 41%	**Dinas KOMINFO**
	4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	**Dinas KOMINFO**
	5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0	**Dinas KOMINFO**
	6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	**Dinas KOMINFO**
	7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0	**Dinas KOMINFO**
	8) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0	**Dinas KOMINFO**
	9) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0	**Dinas KOMINFO**
	10) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	**Dinas KOMINFO**
	11) Persentase data yang dapat berbagi pakai	0	**Dinas KOMINFO**
	12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0	**Dinas KOMINFO**

		13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		0	**Dinas KOMINFO**	
		14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		0	**Dinas KOMINFO**	
73. IKK Outcome : : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten						
16.	**Komunikasi dan Informatika**	**1.**	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten ---------- x 100 % Jumlah penduduk 97.590 ---------- x 100% 143.764	**67,88%**	**Dinas KOMINFO**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		1) Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi		0	**Dinas KOMINFO**	
		2) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		0	**Dinas KOMINFO**	
		3) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		0	**Dinas KOMINFO**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
74. IKK Outcome : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas						
17.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**1.**	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha da aset ---------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi 42 ---------- x 100% 203	**21%**	**Dinas Koperindag**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		53) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		0	**Dinas Koperindag**	
		54) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten		3/3 x 100% = 100%	**Dinas Koperindag**	
		55) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		0/203 x 100% = 0%	**Dinas Koperindag**	
		56) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		15/203 x 100% = 7,39%	**Dinas Koperindag**	
		57) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		20/203 x 100% = 9,9%	**Dinas Koperindag**	

		58) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		20/10.835 x 100% = 0,37%	**Dinas Koperindag**	
		59) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		0	**Dinas Koperindag**	
		60) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		-	**Dinas Koperindag**	
		61) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		14/203 x 100% = 6,9%	**Dinas Koperindag**	
		62) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		0	**Dinas Koperindag**	
		63) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		0	**Dinas Koperindag**	
		64) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		0	**Dinas Koperindag**	
		65) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten		0	**Dinas Koperindag**	
75. IKK Outcome : Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha						
17.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**1.**	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ---------- x 100 % Jumlah usaha mikro keseluruhan 50 ---------- x 100% 888	**6%**	**Dinas Koperindag**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	50/888 x 100% = 6 %	**Dinas Koperindag**
	2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	**Dinas Koperindag**
	3) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	**Dinas Koperindag**
	4) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	**Dinas Koperindag**
	5) Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	**Dinas Koperindag**
	6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0	**Dinas Koperindag**
	7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0	**Dinas Koperindag**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
76. IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di Kabupaten						
18.	**Penanaman Modal**	**1.**	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n) – (Jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten ---------- x 100 % Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten 61.065.395.000 - 4.900.000.000 ---------- x 100% 4.900.000.000	**61,06%**	**Dinas PM & PTSP**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	0	**Dinas PM & PTSP**
	2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	**Dinas PM & PTSP**
	3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	**Dinas PM & PTSP**
	4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	**Dinas PM & PTSP**
	5) Kegiatan pameran penanaman modal	0	**Dinas PM & PTSP**
	6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	**Dinas PM & PTSP**
	7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	5 Kali	**Dinas PM & PTSP**
	8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman	846 izin	**Dinas PM & PTSP**

	modal		
	9) Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 119.446.765.389	**Dinas PM & PTSP**
	10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten	21 Orang 49 Penanaman Modal	**Dinas PM & PTSP**
	11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	52 Perusahaan	**Dinas PM & PTSP**
	12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten	846 Data	**Dinas PM & PTSP**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
77. IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri						
19.	**Kepemudaan dan Olahraga**	**1.**	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten ---------- x 100 % Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten 31 Orang	**31 Orang**	**Dinas PKO**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		100 Orang	**Dinas PKO**	
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		6	**Dinas PKO**	
78. IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan						
19.	**Kepemudaan dan Olahraga**	**1.**	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Jumlah pemuda (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan olahraga social kemasyarakatan di kabupaten ---------- x 100 % Jumlah pemuda (16-30) tahun di kabupaten 85 Orang	**85 Orang**	**Dinas PKO**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial		1) Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		0	**Dinas PKO**	

kemasyarakatan						
		2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		0	**Dinas PKO**	
79. IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga						
19.	**Kepemudaan dan Olahraga**	**1.**	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional 0	**0**	**Dinas PKO**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Peningkatan prestasi olahraga		1) Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		17	**Dinas PKO**	
		2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		0	**Dinas PKO**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
80. IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						
20.	**Statistik**	**1.**	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistiK dalam penyusunan perencanan pembangunan daerah ---------- x 100 % Jumlah OPD 46 ---------- x 100% 46	**100%**	**Bapelitbang**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1) Tersedianya buku profil daerah	1	**Dinas KOMINFO**
	2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	**Dinas KOMINFO**
	3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	46	**Dinas KOMINFO**
	4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	**Dinas KOMINFO**
	5) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	**Dinas KOMINFO**
	6) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	34/46 x 100% = 74%	**Dinas KOMINFO**
	7) Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	1/46 x 100% = 2%	**Dinas KOMINFO**

81. IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah						
20.	**Statistik**	**1.**	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistiK dalam melakuka evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100 % Jumlah OPD 46 ---------- x 100% 46	**100%**	**Dinas KOMINFO**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
82. IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah						
20.	**Persandian**	**1.**	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten	Jumlah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100 % Jumlah area penilaian 0	**0**	**Dinas KOMINFO**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Tingkat keamanan informasi pemerintah		8) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		0	**Dinas KOMINFO**	
		9) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		0	**Dinas KOMINFO**	
		10) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		0	**Dinas KOMINFO**	
		11) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan		0	**Dinas KOMINFO**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
83. IKK Outcome : Terlestarikannya Cagar Budaya						
22.	**Kebudayaan**	**1.**	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ---------- x 100 % Jumlah cagar budaya yang terdata 6 --------- x 100% 23	**26%**	**Dinas Budpar**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Terlestarikannya Cagar Budaya		1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		29	**Dinas Budpar**	
		2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman		6	**Dinas Budpar**	
		3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		6	**Dinas Budpar**	
		4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		0	**Dinas Budpar**	
		5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		6	**Dinas Budpar**	
		6) Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		6	**Dinas Budpar**	
		7) Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		0	**Dinas Budpar**	

	8) Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	2	**Dinas Budpar**
	9) Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	2	**Dinas Budpar**
	10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	**Dinas Budpar**
	11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	**Dinas Budpar**
	12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	**Dinas Budpar**
	13) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	**Dinas Budpar**
	14) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	**Dinas Budpar**
	15) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	**Dinas Budpar**
	16) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	**Dinas Budpar**
	17) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	**Dinas Budpar**
	18) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	**Dinas Budpar**
	19) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	**Dinas Budpar**
	20) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	**Dinas Budpar**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
84. IKK Outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						
23.	**Perpustakaan**	**1.**	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat 0		**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		74.249/103.779 = 0,71	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**	
		2) Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		908/103.779 x 100% = 0,87%	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**	
		3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		25/103.779 = 0,002	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**	
		4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		0/186 x 100%= 0%	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**	
		5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		908	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**	
85. IKK Outcome : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat						
23.	**Perpustakaan**	**1.**	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	8,95	**8,95**	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**

IKK OUTPUT			
IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
	2) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
	3) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	7	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
86. IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						
24.	**Kearsipan**	**1.**	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a + i + s + j)/4 (291+5535+44+44)/4	**1478,5**	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		291/291 x 100% = 100%	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**	
		2) Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		5.535/5.535 x 100% = 100%	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**	
		3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		44/44 x 100% = 100%	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**	
		4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		44/44 x 100% = 100%	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**	
87. IKK Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
24.	**Kearsipan**	**1.**	sda	T = (m + b + g + a + c + i)/6 0	**0**	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai	1) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	2) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	72	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
	3) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
	4) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK	0	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
	5) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	44	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**
	6) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten yang sesuai NSPK	0	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
88. IKK Outcome : Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)						
25.	**Kelautan dan Perikanan**	**1.**	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten di wilayah Provinsi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) 2.642 Ton + 9,90 Ton	**2.651,90 Ton**	**Dinas Perikanan**

IKK OUTPUT			
IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	2.414 KK	**Dinas Perikanan**
	2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	**Dinas Perikanan**
	3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	0	**Dinas Perikanan**
	4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	11 Kelompok 55 Orang	**Dinas Perikanan**
	5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	9.800 Ekor	**Dinas Perikanan**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
89. IKK Outcome : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan						
26.	**Pariwisata**	**1.**	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten	Jumlah wisatawan tahun-n - Jumlah wisatawan tahun n-1 ---------- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1 51-96 ---------- x 100% 96	**-47%**	**Dinas Budpar**
IKK OUTPUT						

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi	1 Lokasi	**Dinas Budpar**
	2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1 Paket	**Dinas Budpar**
	3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	0	**Dinas Budpar**
	4) Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	51	**Dinas Budpar**
	5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1	**Dinas Budpar**
	6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0	**Dinas Budpar**
	7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	90	**Dinas Budpar**
	8) Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0/0 x 100% = 0%	**Dinas Budpar**
	9) Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	20/20 x 100% = 100%	**Dinas Budpar**

		10)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	36 Desa/Kelurahan (9 Kecamatan)	**Dinas Budpar**	
90. IKK Outcome : Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten						
26.	**Pariwisata**	**1.**	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	Jumlah wisatawan tahun-n - Jumlah wisatawan tahun n-1 ---------- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1 7449-3510 ---------- x 100% 3510	**112,22%**	**Dinas Budpar**
91. IKK Outcome : Tingkat Hunian Akomodasi						
26.	**Pariwisata**	**1.**	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten	Jumlah kamar yang terjual ---------- x 100 % Jumlah kamar yang tersedia 101 ---------- x 100% 401	**25,19**	**Bapenda**
92. IKK Outcome : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku						
26.	**Pariwisata**	**1.**	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten (harga berlaku)	**5.967,9**	**5.967,9**	**Dinas Budpar**
93. IKK Outcome : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD						
26.	**Pariwisata**	**1.**	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten (harga berlaku)	**12.061.000**	**12.061.000**	**Dinas Budpar**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
94. IKK Outcome : Produktivitas pertanian per hektar per tahun						
27.	**Pertanian**	**1.**	Mengukur tingkat produktivitas pertanian	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ---------- x 100 % Luas panen 118.350,2 ton ---------- x 100% 25.336 Ha	**467,12 ton/Ha**	**Dinas Pertanian**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Produktivitas pertanian per hektar per tahun		11) Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		227 Unit	**Dinas Pertanian**	
		12) Prasarana pertanian yang digunakan		5 Unit	**Dinas Pertanian**	
		13) Penerbitan izin usaha pertanian		0	**Suket Dinas PM dan PTSP**	
		14) Persentase prasarana yang digunakan		5 ------ x 100% = 100% 5	**Dinas Pertanian**	
		15) Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten		0	**Suket Dinas PM dan PTSP**	
95. IKK Outcome : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular						
27.	**Pertanian**	**1.**	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya ---------- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun	**-54,62%**	**Dinas Pertanian**

				sebelumnya (t-1) 649-1.430 ---------- x 100% = -54,62% 1.430		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		1) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana		768 Ha ---------- x 100% = 100% 768 Ha	**Dinas Pertanian**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao

IKK OUTPUT			
IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	**UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao**
	2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	**UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao**
	3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	**UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao**
	4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	**UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao**

Indikator Kinerja Kunci Urusan ESDM Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
96. IKK Outcome : Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten						
29.	**ESDM**	**1.**	Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ---------- x 100 % Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi Tidak Ada	**Tidak Ada**	
IKK OUTPUT						

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	16) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	Tidak Ada	**Tidak Ada**

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Umum Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
97. IKK Outcome : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)						
30.	**Perdagangan**	**1.**	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiiki izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) ---------- x 100 % Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten 15 ---------- x 100% 227	**6,608%**	**Dinas PM dan PTSP**
IKK OUTPUT						

IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	KETERANGAN
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Pusat Perbelanjaan = 5/5 x 100% = 100% Toko Swalayan = 10/10 x 100% = 100%	**Dinas PM dan PTSP**
	2) Persentase penerbitan TDG	0	**Dinas PM dan PTSP**
	3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	0	**Dinas PM dan PTSP**
	4) Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	**Dinas PM dan PTSP**

		5) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kabupaten		0	**Dinas Koperindag**	
		6) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		0	**Dinas Koperindag**	
		7) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		0	**Dinas Koperindag**	
		8) Persentase koefisien variasi harga antar waktu		23,97	**Dinas Koperindag**	
98. IKK Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk						
30.	**Perdagangan**	**1.**	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ---------- x 100 % RDKK 5.380 ---------- x 100% 13.490,17	39,88%	**Dinas Pertanian**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase kinerja realisasi pupuk		1) Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan		5.380/(12.141,15+13.490,17) x 100% = 2,10%	**Dinas Pertanian**	
99. IKK Outcome : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku						
30.	**Perdagangan**	**1.**	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan ---------- x 100 % Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten 201	**0,16%**	**Dinas Koperindag**

				---------- x 100% 1.240		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		1) Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		201/1.240 x 100% = 0,16%	**Dinas Koperindag**	
		2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlak		0	**Dinas Koperindag**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
100.IKK Outcome : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten						
31.	Perindustrian	1	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n) – (Jumlah industry kecil dan menengah tahun n-1) ---------- x 100 % Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 2.823-2.766 ---------- x 100% 2.766	**2,81%**	**Dinas Koperindag**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten		17) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten		0	**Dinas PM dan PTSP**	
101.IKK Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK						
31.	Perindustrian	1	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut 0	**0**	**Dinas Koperindag**

IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		14) Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA		0	**Dinas Koperindag**	
102. IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi						
31.	Perindustrian	1	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0	**0**	**Dinas PM dan PTSP**
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		7) Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		0	**Dinas PM dan PTSP**	
103. IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi						

31.	Perindustrian	1	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0	**0**	**Dinas PM dan PTSP**

IKK OUTPUT

IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	**Dinas PM dan PTSP**

104.IKK Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten

31.	Perindustrian	1	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan 0	**0**	**Dinas PM dan PTSP**

105.IKK Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

31.	Perindustrian	1	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi :	**0**	**Dinas Koperindag**

				- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2) 0		
IKK OUTPUT						
IKK OUTCOME		**IKK OUTPUT**		**RUMUS**	**KETERANGAN**	
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		1) data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten		2.823/2.823 x 100% = 100%	**Dinas Koperindag**	

Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao

IKK OUTPUT			
IKK OUTCOME	**IKK OUTPUT**	**RUMUS**	**KETERANGAN**
	1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	**Dinas Transnaker**
	2) Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 UPT	**Dinas Transnaker**
	3) Jumlah satuan pemukiman yang dibina	2 UPT	**Dinas Transnaker**

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
106.Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Provinsi 1) IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan						
33.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)**	**1.**	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan ---------- x 100 % Jumlah APBD 100.357.700.600 ---------- x 100% 762.044.314.473	**13,7%**	**BKA**
107.IKK Outcome : Rasio PAD						
33.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)**	**1.**	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.	Jumlah PAD ---------- x 100 % Jumlah PDRB Non Migas 31.511.204.366,82 ---------- x 100% 3.146.985.400.000	**1,001%**	**BKA**
108.IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						
33.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)**	**1.**	Mlihat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Rote Ndao adalah **level 2** berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	**level 2**	**Inpektorat**

109.IKK Outcome : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)						
33.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)**	**1.**	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP **belum dinilai**	**belum dinilai**	**Inpektorat**
110.IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)						
33.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)**	**1.**	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.	(Jumlah Belanja urusan pemerintahan) –(transfer expenditures) ---------- x 100 % Jumlah Belanja APBD 63.930.933.331,51 ---------- x 100% 751.544.314.473,51	**8,50%**	**BKA**
111.IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan						
33.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)**	**1.**	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir	KETERANGAN : ▪ Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	**1 WTP**	**WTP Tahun 2020**

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
112.IKK Outcome : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama						
34.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Pengadaan)**	**1.**	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartel yang ditandatangi pada kuartel pertama tahun n ---------- x 100 % Jumlah kontrak keseluruhan tahun n 0	**0**	**Bagian PBJ**
113.IKK Outcome : Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif						
34.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Pengadaan)**	**1.**	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ---------- x 100 % Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 96.395.631.008 ---------- x 100% 95.092.857.575	**101,37%**	**Bagian PBJ**
114.IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan						
34.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Pengadaan**	**1.**	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ---------- x 100 % Total belanja langsung 191.488.488.583 ---------- x 100% 673.371.660.870	**28,44%**	**Bagian PBJ**

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
115.IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)						
35.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian)**	**1.**	Mengukur rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke Bawah 2.486 ---------- x 100% 603	**412,27%**	**BKPP**
116.IKK Outcome : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan						
35.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian)**	**1.**	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1.026 ---------- x 100% 1.543	**66,49%**	**BKPP**
117.IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)						
35.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Kepegawaian)**	**1.**	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	Jumlah PNS fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 60 ---------- x 100%	**5,85%**	**BKPP**

				1.026		

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
118.IKK Outcome : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD						
36.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Manajemen Keuangan)**	**1.**	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	$\left[\left(\frac{Nilai\ absolut\ dari\ total\ belanja\ dalam\ realisasi}{total\ belanja\ APBD}\right) - (1)\right] x\ 100\%$ 762.044.314.473,51 ---------- x 100% 796.146.557.412	**4,28%**	**BKA**
119.IKK Outcome : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD						
36.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Manajemen Keuangan)**	**1.**	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	$\left[\left(\frac{Nilai\ absolut\ dari\ total\ belanja\ dalam\ realisasi}{total\ belanja\ APBD}\right) - (1)\right] x\ 100\%$ 31.511.204.366,82 ---------- x 100% 796.146.557.412	**96,04%**	**BKA**
120.IKK Outcome : Assets Management						
33.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Manajemen Keuangan)**	**1.**	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	**Ada**	**BKA**

				Ada		
121.IKK Outcome : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun sebelumnya						
36.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Manajemen Keuangan)**	**1.**	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA ----------x 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya 62.201.201.572,53 ---------- x 100% 599.138.717.910,35	**0,07%**	**BKA**

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Pemerintahan (Transparasi dan Partisipasi Publik) Kabupaten Rote Ndao

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
122.IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan						
37.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Transparasi dan Partisipasi Publik)**	**1.**	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda ---------- x 100 % Total jumlah dokumen yang telah dirinci 187 ---------- x 100% 187	**100%**	**Dinas KOMINFO**
123.IKK Outcome : Akses publik terhadap informasi keuangan daerah						
37.	**Fungsi Penunjang Pemerintahan (Transparasi dan Partisipasi Publik)**	**1.**	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Belanja Anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda ---------- x 100 % Total Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda 3 ---------- x 100% 187	**1,60%**	**Dinas KOMINFO**